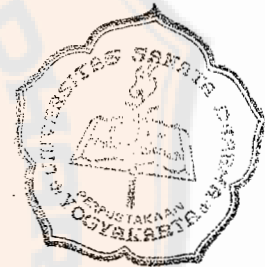


**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**MOHAMAD ROEM  
PERJUANGAN DAN PENGABDIANNYA  
TAHUN 1924 - 1983**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah**



**Disusun oleh :**

**Endah Retno Riyanti**

**NIM : 001314048**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2005**

SKRIPSI

MOHAMAD ROEM  
PERJUANGAN DAN PENGABDIANNYA  
TAHUN 1924 - 1983

Oleh :

Endah Retno Riyanti

NIM : 001314048

Telah disetujui oleh :

Pembimbing



Drs. Sutarjo Adisusilo J. R., S.Th.

Tanggal 24 September 2005

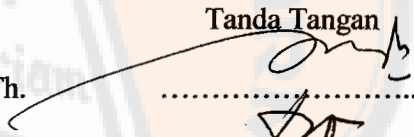
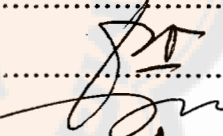
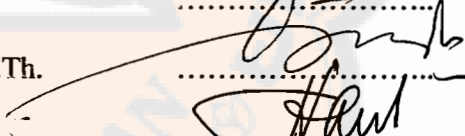
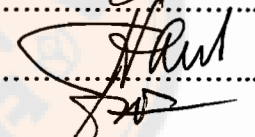
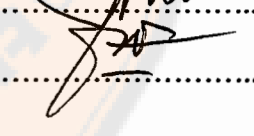
SKRIPSI

MOHAMAD ROEM  
PERJUANGAN DAN PENGABDIANNYA  
TAHUN 1924 - 1983

Dipersiapkan dan ditulis oleh :  
**Endah Retno Riyanti**  
NIM : 001314048

Telah dipertahankan di Depan Panitia Penguji  
pada tanggal 7 Oktober 2005  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Sutarjo Adikusilo J. R., S.Th.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: Drs. Sutarjo Adikusilo J. R., S.Th.	
Anggota	: Drs. A. K. Wiharyanto, M.M.	
Anggota	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	

Yogyakarta, 7 Oktober 2005  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sanata Dharma



Prof. Dr. Sosisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.

## MOTTO

- *Kegagalan bukanlah suatu hal yang harus ditangisi, kegagalan juga bukanlah suatu hal yang harus diratapi karena susah, senang, sedih dan gembira itu batasmnya terlalu tipis.. (Penulis)*
- *Segala sesuatu yang benar dan adil bila diperjuangkan dengan jujur dan ikhlas cepat atau lambat pasti akan memperoleh kemenangan. (Mohamad Roem)*
- *Ada hal yang mungkin kamu tidak suka tapi itulah yang baik buat kamu, dan apa pula yang amat kamu sukai, namun itu ada buruknya buat kamu. Allah-lah yang tahu dan kamu tidaklah tahu.. (Al-Qur'an, Surat Al Baqoroh, ayat 216)*
- *Keberhasilan seseorang tidak dinilai dari hasil yang diraih tetapi dari bagaimana usaha kita dalam meraih keberhasilan itu.. (Penulis)*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ucapan syukur, kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

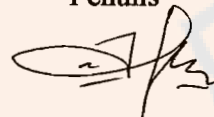
- Gusti Allah yang telah memberikan karuniaNya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
- Ayah dan Bundaku, Bambang Riyanto dan Endang Sugiati serta adikku Endra Baskoro Artiyanto, yang telah memberikan kasih dan dorongannya baik material maupun spiritual.
- Keluarga Besar Alm. Eyang Soejiatomo Soediraatomo dan Keluarga Besar Alm. Eyang Moeljanto, yang telah memberikan dukungannya.
- Keluarga Besar Bapak Parmo, terima kasih atas perhatian, kasih sayang dan semangatnya selama ini.
- Sahabat-sahabatku terkasih : Rina, Tini, Vikki, Cicil, Mbak Missa, Sri May, Dina, Dani, Yutik, Desri, Leni, Inung, Andi, Mardi, Dodi, Pras, Trias, Wisni, Tari, Evik, dik Euy, Vivin.
- Teman-teman Pendidikan Sejarah Angkatan 00.
- Mas Edi terkasih yang telah memberikan semangat, perhatian, dorongan, bimbingan dan kasihnya selama ini. Thank's for being light of my life.

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

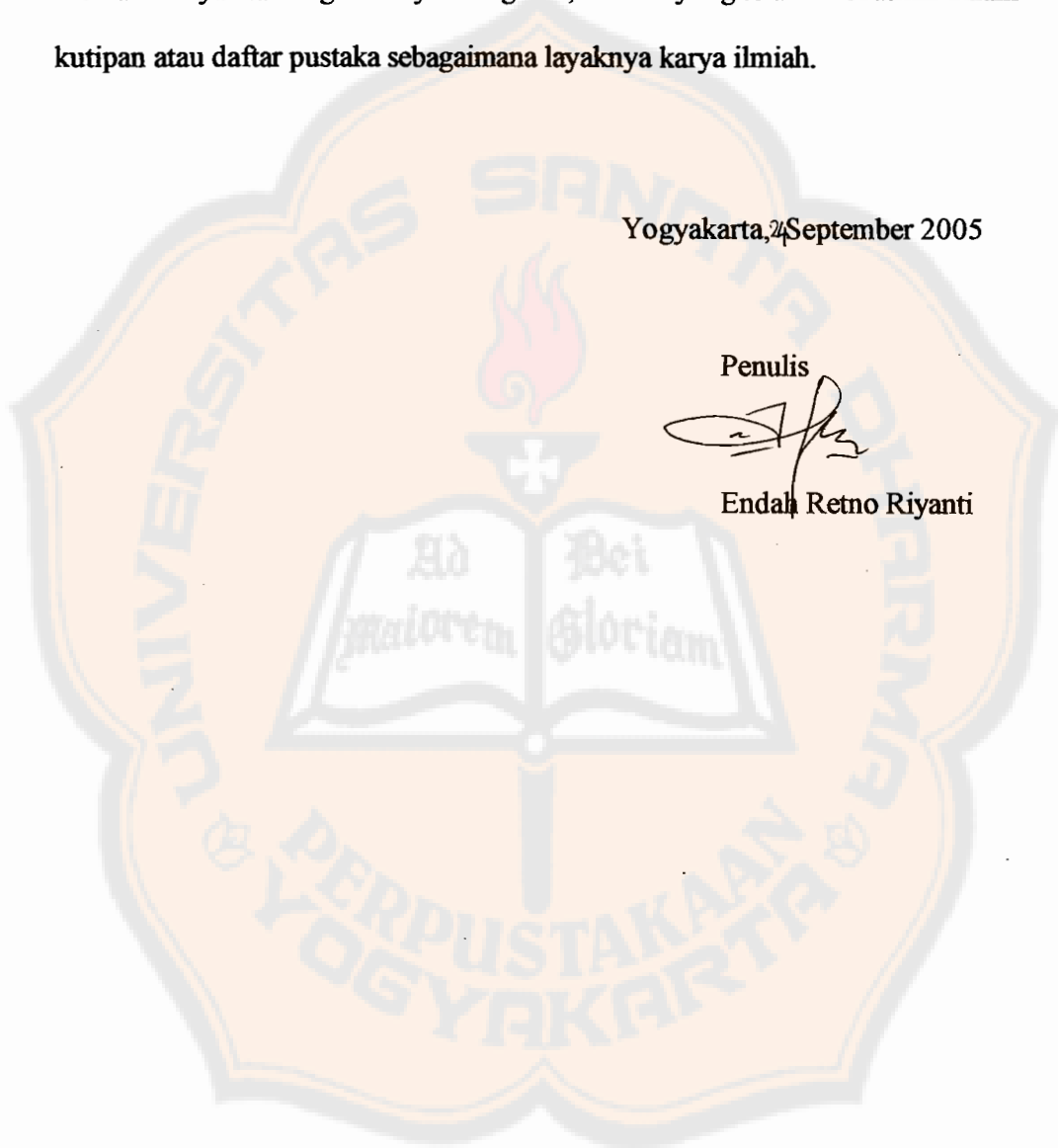
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan atau daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 24 September 2005

Penulis



Endah Retno Riyanti



**ABSTRAK**

**Judul : “ Mohamad Roem, Perjuangan dan Pengabdianya  
Tahun 1924-1983 ”**

**Penulis : Endah Retno Riyanti**

Skripsi ini berjudul “ Mohamad Roem, Perjuangan dan Pengabdianya Tahun 1924-1983”. Dalam skripsi ini terdapat 3 tujuan yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa 1). Awal karier politik Mohamad Roem; 2). Bentuk perjuangan Mohamad Roem; 3). Dan wujud pengabdian Mohamad Roem kepada bangsa Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah. Adapun langkah-langkah metode penelitian sejarah mencakup heuristik, kritik sumber, intepretasi serta historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik dan sosial, sedangkan penulisannya dikaji secara diskriptif analitis.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa 1). Karier politik Mohamad Roem dimulai pada tahun 1924 ketika ia bergabung dalam organisasi Jong Java yang berkembang dalam lingkungan STOVIA; 2).Perjuangannya dalam bidang politik dimulai ketika ia ditunjuk sebagai anggota delegasi dalam beberapa perundingan yaitu Perundingan Linggajati, Perundingan Renville, Perundingan Roem-Royen dan KMB. Perjuangannya dalam bidang pemerintahan pasca KMB tahun 1949-1957 nampak ketika ia menjabat sebagai Menteri Negara tanpa Portofolio pada Kabinet Hatta tahun 1949-1950, Menteri Luar Negeri tahun 1950-1951 pada Kabinet Natsir, Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Wilopo tahun 1952-1953 dan Wakil Perdana Menteri I pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II tahun 1956-1957. Perjuangannya dalam bidang sosial-keagamaan dimulai pada tahun 1968 ketika karier politiknya berakhir. Ia kemudian mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan, keagamaan dan sosial masyarakat dengan melakukan ceramah tentang pendidikan dan agama diberbagai tempat, menulis artikel di surat kabar, menulis buku dan mewakili Indonesia dalam berbagai konfrensi tingkat dunia; 3). Pengabdianya kepada bangsa Indonesia ia wujudkan dalam perjuangannya sebagai seorang pejuang dan perunding.



**ABSTRACT**

**Title : “ Mohamad Roem, Struggle and Dedication in 1924-1983 ”**

**Writer : Endah Retno Riyanti**

The thesis is entitled “ Mohamad Roem, Struggle and Dedication in 1924-1983 ”. In this thesis there are three main purpose, namely to describe and analyze 1). The started of Mohamad Roem’s political career’s; 2). How the type of his struggle; 3). How the shape of his dedication to Indonesia.

In this research, the writer used the history method. The step of the method of history research include, heuristic, source of criticism, intepretation and historiography. Where as the approach which is used in this research is political and social approach. While the writing of the study is a form of descriptif analysis.

By doing the research it is found that 1). Mohamad Roem’s political carrer started in 1924, when he join in Jong Java which grown in STOVIA; 2).His struggle in politic began when he was pointed as the delegation in many confrence, such as Linggajati Confrence, Renville Confrence, Roem-Royen Confrence and KMB. The struggle in Indonesian’s government after KMB 1949-1957 was shown when he got the important position’s in many cabinet’s, such as Minister of State non Portfolio in Hatta Cabinet’s 1949-1950, Minister of Foreign Affairs in Natsir Cabinet’s 1950-1951, Secretary of Interior in Wilopo Cabinet’s 1952-1953 and Vice Prime Minister in Ali Sastroamidjojo Cabinet’s 1956-1957. His struggle in social and religion began in 1968 by the end of his carrer. He gave full attention to education, religion and social public by giving education and religious speech in many places, wrote articles for some newspapers, wrote books and became the representative of Indonesia in many confrences; 3). His dedication was shown through his struggle as a hero and negisiator.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kuhaturkan kehadiran Gusti Allah atas karunia serta kemulyaanNya telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Mohamad Roem, Perjuangan dan Pengabdiannya Tahun 1924-1983 “ ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dekan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Sutardjo Adisusilo, J.R, S.Th., selaku Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Segenap Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis belajar di Universitas Sanata Dharma.
6. Sekretariat Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi perkuliahan.
7. Karyawan perputakaan yang telah membantu penulis dalam menyediakan berbagai buku yang berguna dalam penulisan skripsi ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Kedua orangtua dan adik, beserta Keluarga Besar Alm. Soegiattomo Soediroatmodjo dan Keluarga Besar Alm. Moeljanto, serta Keluarga Besar Bapak Parno yang senantiasa memberikan perhatian, dorongan dan semangatnya selama ini.
9. Teman-teman seperjuanganku di Pendidikan Sejarah Angkatan 2000, 1999, 2001, terimakasih atas persahabatannya selama ini.
10. Bapak Hasyim Afandi yang telah bersedia membantu melengkapi sumber buku dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih bantuannya.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis menerima saran dan kritikan yang sekiranya dapat membantu demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi Universitas Sanata Dharma.

Penulis



DAFTAR ISI

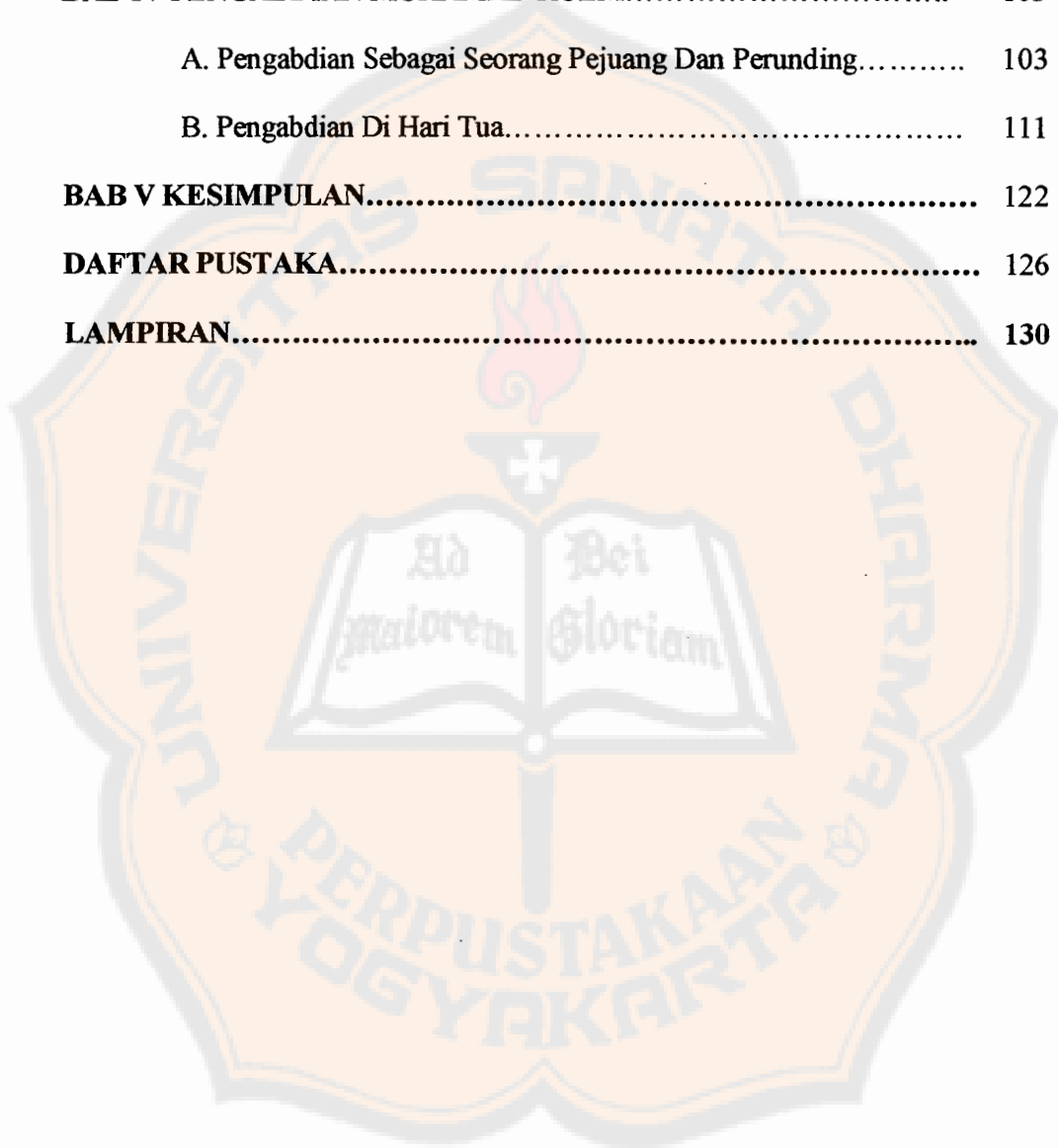
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Kajian Teori.....	15
F. Hipotesis.....	22
G. Metodologi Penelitian.....	23
H. Pendekatan Penelitian.....	27
I. Sistematika Penulisan.....	29

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<b>BAB II. AWAL KARIER POLITIK MOHAMAD ROEM.....</b>	<b>31</b>
A. Latar Belakang Keluarga.....	31
B. Latar Belakang Pendidikan.....	38
C. Awal Karier Politik Mohamad Roem.....	39
<b>BAB III. BENTUK PERJUANGAN MOHAMAD ROEM.....</b>	<b>59</b>
A. Perjuangan Dalam Bidang Politik.....	59
1. Keikutsertaan Mohamad Roem Dalam Perundingan Linggajati Tahun 1946.....	60
2. Keikutsertaan Mohamad Roem Dalam Perundingan Renville Tahun 1947-1948.....	69
3. Mohamad Roem Sebagai Ketua Delegasi RI Dalam Perundingan Roem-Royen Tahun 1949.....	76
4. Mohamad Roem Sebagai Wakil Ketua Delegasi Dalam KMB Tahun 1949.....	87
B. Perjuangan Dalam Bidang Pemerintahan Pasca KMB Tahun 1949-1957.....	90
1. Menteri Negara Tanpa Portofolio Dalam Kabinet Hatta Tahun 1949-1950.....	90
2. Menteri Luar Negeri Dalam Kabinet Natsir Tahun 1950-1951.....	91
3. Menteri Dalam Negeri Dalam Kabinet Wilopo Tahun 1952-1953.....	93

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4	Wakil Perdana Menteri I Dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II Tahun 1956-1957.....	97
	C. Perjuangan Dalam Bidang Sosial-Keagamaan.....	99
	<b>BAB IV PENGABDIAN MOHAMAD ROEM.....</b>	<b>103</b>
	A. Pengabdian Sebagai Seorang Pejuang Dan Perunding.....	103
	B. Pengabdian Di Hari Tua.....	111
	<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>122</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>130</b>



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Gambar Tokoh Mohamad Roem.
2. Lampiran 2 : Dokumen Hasil Pernyataan Roem-Royen Tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes Jakarta.
3. Lampiran 3 : Gambar Suasana Perundingan Linggajati tahun 1946.
4. Lampiran 4 : Gambar Suasana Perundingan Renville Tahun 1947.
5. Lampiran 5 : Gambar Suasana Perundingan Roem-Royen Tahun 1949.
6. Lampiran 6 : Gambar Penandatanganan Piagam Penyerahan Kedaulatan
7. Lampiran 7 : Suasana Pelaksanaan KMB Tahun 1949.
8. Lampiran 8 : Gambar Mohamad Roem saat menghadiri sidang Pimpinan dari A.C.R.P. (Asian Conference of Religion for Peace) Konferensi Asia dari Agama untuk Perdamaian tahun 1977.
9. Silabus.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perjalanan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan secara penuh dari Belanda tidaklah mudah. Proklamasi Kemerdekaan yang di Proklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 telah berhasil membawa Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari tangan Belanda. Tetapi ternyata perjuangan tidak berhenti sampai disitu, karena pada kenyataannya Belanda belum mau mengakui secara penuh kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Sikap Belanda tersebut nampak pada usaha yang dilakukan Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaan kolonialnya di Indonesia.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 secara mengejutkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dengan demikian berakhirilah Perang Dunia Ke-II.<sup>1</sup> Hal itu berarti kekuasaan Jepang atas Indonesia berakhir sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta segera menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Proklamasi tersebut mula-mula ditanggapi secara dingin di kalangan dunia internasional, karena penerangan terbatas dan Indonesia sama sekali tertutup pada waktu pendudukan Jepang, juga karena intelejen Sekutu tidak dapat menyimak proses perkembangan kebangsaan pada waktu itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, *Persetujuan Linggajati, Prolog dan Epilog*, Yayasan Pustaka Nusantara & UNS-Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 4



Proklamasi kemerdekaan Indonesia di kalangan Pemerintah Belanda dan politisi di Negeri Belanda hanya dianggap sebagai anugerah Panglima Besar Angkatan Perang Jepang di Saigon.

Sebagai anggota Sekutu yang menang dalam Perang Dunia Ke-II, Belanda berpendapat bahwa kedudukannya patut dikembalikan seperti sebelum perang. Karena itu Belanda tidak mau melakukan perundingan dengan Indonesia. Sikap Belanda tersebut tercermin dalam ucapan Prof Logemmen, Menteri Daerah Seberang Negeri Belanda yang menyatakan bahwa, "*Praten met Soekarno is even onwaardig als onvruchtbaar*", yang berarti, "Berunding dengan Soekarno adalah hina sekaligus tanpa guna".<sup>3</sup> Sikap tersebut diperkuat oleh sikap Gubernur Jenderal terakhir di Hindia Belanda yaitu Tjarda Van Stankerborg Stachower, yang ketika itu menolak untuk diajak berunding dengan Indonesia. Tetapi kemudian atas desakan Inggris, Belanda tidak dapat menolak untuk diajak berunding dengan Indonesia. Maka sebagai konsekuensinya Tjarda Van Stankerborg Stachower meletakkan jabatannya sebagai Gubernur Jenderal terakhir dari Nederlands Indie.

Perkembangan selanjutnya terjadi setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Segera setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dalam Perang Dunia Ke-II, pihak Sekutu mengeluarkan perintah kepada Jepang agar memelihara *status quo* di masing-masing wilayah termasuk Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945 Mayor Green Halgh, salah seorang perwira Sekutu tiba di Kebayoran Jakarta. Green diberi mandat untuk

---

<sup>3</sup> Mohamad Roem, *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI*, PT. Gramedia, Jakarta. 1989, hlm. 4

mempersiapkan pembentukan markas besar tentara Sekutu di Jakarta. Tentara Sekutu ini merupakan komando khusus dari *South Asia Command (SEAC)* yang diberi nama *Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI)* dibawah konsolidasi Letnan Jenderal Sir Philip Chrisor.

Belanda yang masih berkeinginan untuk menguasai Indonesia kembali datang ke Indonesia bersama pasukan Sekutu. Pasukan Belanda yang dikenal dengan nama NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) ini datang ke Indonesia dengan maksud ingin menegakkan kembali kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Tentu saja hal itu mendapat reaksi keras dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Tindakan reaksioner rakyat Indonesia yang menentang kembalinya Belanda ke Indonesia kemudian terjadi di beberapa daerah di wilayah Indonesia.

Ketegangan kemudian terjadi di antara Indonesia-Belanda. Maka untuk mengatasinya, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perundingan. Perundingan tersebut akan diadakan di Linggajati yang akan dimulai pada tanggal 11 November 1946. Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Sutan Sjahrir, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Selain Sutan Sjahrir delegasi Indonesia yang juga hadir adalah Mr. Mohamad Roem, Mr. Amir Sjarifudin, Dr. J. Leimena dan Mr. A.K Pringgodigdo.

Pada tanggal 15 November 1946 perundingan ini menghasilkan persetujuan yang terdiri dari 17 pasal. Salah satu isi persetujuan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Indonesia secara *de facto* atas Jawa, Madura dan Sumatra. Disepakati juga bahwa di

antara kedua belah pihak yaitu Belanda dan Indonesia mengadakan gencatan senjata. Apabila timbul persengketaan dan tidak diselesaikan oleh kedua belah pihak maka persoalan tersebut akan diusahakan melalui perwasitan (arbitrase).

Meskipun sempat terjadi perdebatan seru di antara wakil delegasi RI dan Belanda, akhirnya persetujuan Linggajati ini diparap pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1946. Muncul perbedaan penafsiran misalnya mengenai pengakuan *de facto* atas Indonesia. Perbedaan ini sulit dipecahkan sehingga muncul konflik. Selain itu, pelaksanaan isi persetujuan itu berjalan sangat lambat, terutama disebabkan oleh sikap Belanda yang melanggar butir-butir persetujuan dengan alasan yang dibuat-buat. Konflik semakin berlarut tersebut dilanjutkan dengan aksi militer Belanda yang kemudian disebut sebagai Agresi Militer, yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Belanda telah menghapuskan gencatan senjata secara sepihak sekaligus menyatakan dirinya tidak terikat lagi dengan isi persetujuan Linggajati. Oleh Belanda agresi yang dilancarkanya tersebut hanya dinamakan sebagai '*politioele actie*' atau aksi politik, bukan sebagai agresi.<sup>4</sup>

Agresi yang dilancarkan Belanda antara tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus 1947 ini, mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Salah satu negara yang menentang pelaksanaan agresi tersebut adalah Australia. Australia kemudian mengundang Dewan Keamanan PBB untuk segera melaksanakan sidang darurat guna membahas aksi militer Belanda tersebut. Resolusi yang dihasilkan dari sidang tersebut diterima PBB sehingga

---

<sup>4</sup> Mohamad Roem, *op.cit*, hlm. 7

Indonesia dengan Belanda sepakat untuk melakukan gencatan senjata mulai tengah malam tanggal 4 Agustus 1947 dan 5 Agustus 1947.

Campur tangan Dewan Keamanan PBB melahirkan sebuah Panitia Jasa-Baik yang beranggotakan tiga negara yaitu Belgia, Australia dan Amerika Serikat. Panitia Jasa-Baik ini kemudian memprakarsai diadakannya perundingan antara Belanda dengan Indonesia di sebuah kapal milik Amerika Serikat yang bernama US Renville. Perundingan yang dilakukan di atas kapal US Renville ini kemudian dinamakan dengan Perundingan Renville. Dalam perundingan ini delegasi Indonesia terdiri dari Mr. Amir Sjarifuddin, Mr. Ali Sastroamidjojo, Dr. Tjoa Sik Ien, Mr. Mohamad Roem, K.H Agus Salim, Mr. Nasrun dan Ir. Juanda.

Dalam daftar nama delegasi Indonesia yang hadir dalam perundingan tersebut tercantum nama Mohamad Roem. Sebagai catatan, keikutsertaan Mohamad Roem dalam perundingan Renville bukan atas nama pribadi seperti halnya dalam perundingan Linggajati, melainkan atas nama Partai Masyumi. Hal ini terjadi karena Masyumi yang semula menolak untuk bekerjasama dengan Kabinet Amir Sjarifuddin I, akhirnya bersedia duduk dalam Kabinet Amir Sjarifuddin setelah kabinet ini melakukan *resuffle* (perubahan susunan).<sup>5</sup>

Atas prakarsa KTN, yang merupakan badan PBB yang ditugaskan membantu menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda, perundingan antara RI dan Belanda dimulai kembali pada pertengahan Maret 1948. Dalam

---

<sup>5</sup> Iin Nur Insaniwati, *Mohamad Roem, Karier Politik dan Perjuangannya*, Indonesiatara, Magelang, 2002, hlm. 70



perundingan tersebut Hatta mengangkat Mohamad Roem sebagai ketua delegasi RI, Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua delegasi dan Mr. Latuhatary, Dr. Tjoa Sik Ien, Mr. Nasrun, Prof. Dr. Soepomo serta Prof. Mr. Sunarjo Kolopaking sebagai anggota.

Dalam perkembangannya, perundingan antara pihak RI dan Belanda menemui jalan buntu. Hal itu bersumber pada perdebatan pendapat mengenai pemerintahan federal sementara. Belanda berpendapat bahwa pemerintah itu harus dipimpin wakil tinggi mahkota Belanda, sedangkan RI berpendirian pemerintah federal sementara harus bersifat nasional, jadi harus terdiri dari orang-orang Indonesia saja. Dalam suasana kemacetan perundingan, Belanda melakukan blokade dalam bidang ekonomi yang sebenarnya bertentangan dengan persetujuan Renville yang antara lain menentukan keharusan kedua belah pihak untuk bekerjasama dibidang ekonomi. Blokade tersebut menyebabkan Indonesia mengalami inflasi.

Dalam situasi yang semakin sulit tersebut, kelompok kiri yang tergabung dalam PKI-Muso dan dikepalai oleh bekas Perdana Menteri Amir Sjarifuddin mengadakan perebutan kekuasaan (*coup d'etat*) di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Bentuk dari pengkhianatan Amir Sjarifuddin adalah didirikannya FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang dibentuk tanggal 28 Juni 1948. Melalui FDR Amir Sjarifuddin berusaha melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan pemerintahan RI. Berkaitan dengan pemberontakan ini, pemerintah RI mengerahkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk mematahkan kaum pemberontak. Tikaman pihak PKI/FDR dibawah Muso dan Amir Sjarifuddin semakin memperlemah RI khususnya

dalam bidang kemiliteran.<sup>6</sup> Kelemahan pihak RI tersebut segera dimanfaatkan oleh Belanda dengan melancarkan agresinya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.

Belanda secara mendadak menyerang Yogyakarta Ibukota RI. Maguwo dan sekitarnya dibom, kemudian Belanda mendaratkan pasukannya dan dalam waktu singkat Ibukota RI Yogyakarta berhasil diduduki. Selain itu, Belanda juga berhasil menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohamad Hatta beserta para menteri termasuk Mohamad Roem dan mengasingkannya ke Bangka dan Prapat. Belanda mengira dengan dijatuhkannya kota Yogyakarta yang merupakan pusat pemerintahan RI maka dengan mudah menyingkirkan pimpinan pemerintah serta pemimpin militernya sehingga RI dapat dilenyapkan.<sup>7</sup> Tetapi sebelum mereka ditahan, Presiden Soekarno masih sempat mengirimkan radiogram berisi pemberian kekuasaan negara kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara, yang sedang mengadakan perjalanan di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat. Meskipun radiogram tersebut tidak pernah diterima oleh Sjafruddin, dengan inisiatif sendiri Sjafruddin tetap membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pembicaraan mengenai pembentukan pemerintahan darurat sudah menjadi pembicaraan dikalangan orang-orang Republik. Jika situasi memungkinkan maka pemerintah darurat dapat segera dibentuk. Alasan itulah yang kemudian mendorong Sjafruddin untuk segera membentuk PDRI. Andaikata karena sesuatu hal Sjafruddin tidak bisa menjalankan tugas,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 75

<sup>7</sup> Aboebakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi, Kenangan Pelaku dan Saksi*, UI-Press, 1992, hlm. 273

Presiden memerintahkan Soedarsono, Palar dan Maramis yang ada di New Delhi India untuk segera membentuk Pemerintahan Pelarian (*Exile Government*).<sup>8</sup>

Pengasingan tidak menyurutkan semangat para pemimpin RI untuk terus berjuang. Penawanan dan pembuangan yang dilakukan oleh Belanda terhadap pemimpin RI, khususnya ketua dan wakil ketua delegasi RI yaitu Mohamad Roem dan Ali Sastroamidjojo menyebabkan terputusnya perundingan RI-Belanda untuk sementara. Namun demikian, walaupun sempat ditawan dan dibuang oleh Belanda peran Mohamad Roem sebagai diplomat tidak berhenti sampai disini saja melainkan semakin melambungkan namanya dalam dunia perpolitikan Indonesia.<sup>9</sup> Peran Mohamad Roem nampak ketika ia menjadi ketua delegasi dalam perundingan dengan Van Royen, seorang wakil dari Belanda. Perundingan inilah yang kemudian dikenal dengan perundingan Roem-Royen. Perundingan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1949 ini mampu membuka jalan bagi perundingan baru dalam upaya menyelesaikan perselisihan dengan Belanda dan memperoleh kedaulatan RI dari Belanda. Karena dalam perundingan tersebut salah satu isinya adalah bahwa akan dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar guna mencari langkah penyelesaian konflik antara RI dengan Belanda.

Konferensi meja Bundar akhirnya berhasil dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949. Salah satu isi penting dari persetujuan KMB adalah Piagam Penyerahan Kedaulatan yang lengkap tanpa

---

<sup>8</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 Jilid II*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 42

<sup>9</sup> In Nur Insaniwati, *op. cit.*, hlm. 76



syarat selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949 oleh Belanda kepada Indonesia yang pada saat itu masih berbentuk serikat, kecuali Irian Barat dan RIS terdiri dari 15 negara bagian ciptaan Belanda.<sup>10</sup>

Kabinet Hatta yang dibentuk tanggal 19 Desember 1949 merupakan Kabinet Hatta III yang mempunyai tugas utama dan harus segera dilaksanakan yaitu menyelenggarakan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia sesuai hasil KMB yang telah ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag Belanda. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan upacara penyerahan kedaulatan di Istana Op den Dam Amsterdam, Belanda dan Istana Merdeka, Jakarta.<sup>11</sup>

Upacara penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda kepada Indonesia di Amsterdam dihadiri oleh Ratu Juliana yang berwenang menandatangani Piagam Penyerahan Kedaulatan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Mohamad Hatta yang disertai beberapa orang menteri, diantaranya Sultan Hamid II. Penyerahan kedaulatan di Jakarta diserahkan kepada wakil RIS yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX didampingi Mohamad Roem.

Dengan penyerahan kedaulatan tersebut, RIS diakui secara resmi oleh Belanda sebagai negara yang berdaulat penuh dan berkedudukan sejajar dengan Belanda. Keberhasilan yang dicapai tersebut tentu saja bukanlah suatu perjuangan yang mudah. Berbagai peristiwa telah dilalui dalam perjalanan Indonesia memperoleh kedaulatan secara penuh dari Belanda. Perjuangan tersebut terutama dalam bentuk perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi

---

<sup>10</sup> Mohamad Roem, *Suka Duka Berunding dengan Belanda*, Idayu Press, Djakarta, 1972, hlm. 25-26

<sup>11</sup> Mohamad Roem, *Bunga Rampai Sejarah Jilid I, Bulan Bintang*, Djakarta, 1972, hlm. 116

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan secara fisik dalam sejarah Bangsa Indonesia melawan pemerintah Kolonial Belanda yang bermaksud menjajah kembali Indonesia.

Perundingan dengan Belanda sejak Proklamasi Kemerdekaan RI telah berperan besar dalam dunia diplomasi Indonesia. Berbagai perundingan antara Indonesia dengan Belanda, khususnya pada masa awal kemerdekaan turut mewarnai gerak sejarah Indonesia, seperti perundingan Hoge Veluwe (1946), perundingan Linggajati (1947), Renville (1948), Room- Royen (1949) serta KMB (1949). Konfrensi Meja Bundar merupakan perundingan terpenting diantara perundingan tersebut, karena melalui konfrensi ini Belanda akhirnya bersedia mengakui kedaulatan Indonesia. Keberadaan KMB itu sendiri tidak lepas dari keberhasilan perundingan sebelumnya yaitu Roem-Royen.

Mohamad Roem adalah salah satu tokoh yang tidak bisa diabaikan jasanya dalam keberhasilan-keberhasilan tersebut. Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat namanya sebagai pejuang diplomasi yang sangat hebat. Baginya dunia diplomasi adalah suatu dunia yang tidak asing lagi. Sebelum Indonesia merdeka, ia telah mulai menekuni bidang ini bersama K.H Agus Salim dalam Pergerakan penyadar. K.H Agus Salim yang juga seorang politikus dan diplomat ulung, oleh Mohamad Roem dijadikan sebagai 'guru' yang membimbingnya baik dibidang agama, politik maupun diplomasi yang pada akhirnya membawa Mohamad Roem sebagai salah satu diplomat besar di Asia.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 58

Segala usaha diniatkannya dengan ikhlas untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang ditujukan bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sepenuhnya, walaupun pada masa itu perjuangannya terkadang menimbulkan berbagai tanggapan yang bersifat kontroversial, tetapi sejarah membuktikan bahwa perjuangannya tidak sia-sia karena Indonesia berhasil meraih kembali kedaulatannya secara penuh pada tanggal 27 Desember 1949. Sampai akhir hayatnya pun ia masih tetap mengabdikan diri kepada bangsa yang sangat ia cintai meskipun tidak lagi berkecimpung dalam dunia politik.

#### **B. Rumusan Permasalahan**

Untuk dapat mengetahui bagaimana perjuangan Mohamad Roem serta pengabdianya kepada Indonesia, maka dalam skripsi ini penulis mengambil beberapa rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana awal perjalanan karier Mohamad Roem sebagai seorang diplomat Indonesia yang berperan dalam perjuangan diplomasi Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk perjuangan Mohamad Roem kepada bangsa Indonesia dari tahun 1946-1957 ?
3. Apa wujud pengabdian Mohamad Roem kepada bangsa Indonesia ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana awal perjalanan karier Mohamad Roem sebagai seorang diplomat sejati Indonesia dalam perjuangan diplomasi Indonesia.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana bentuk perjuangan Mohamad Roem di Indonesia dari tahun 1946-1957.
- c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa wujud pengabdian Mohamad Roem kepada bangsa Indonesia.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Untuk dapat merekonstruksi dan mengenal peristiwa masa lampau, perlu diadakan sebuah penulisan sejarah. Pengenalan masa lampau tersebut akan membantu dalam usaha untuk mengetahui segala peristiwa yang terjadi dengan segala aspeknya. Dan setiap penulisan sejarah mengandung manfaat yang akan dicapai oleh adanya tulisan yang dibuat. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

##### **a. Bagi Universitas Sanata Dharma**

Selain untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian yaitu penelitian untuk Ilmu Pengetahuan Sosial, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kekayaan khasanah dunia sejarah sebagai bahan bacaan yang berguna bagi pembaca dan

pemerhati Sejarah dilingkungan Universitas Sanata Dharma maupun diluar lingkungan Unversitas Sanata Dharma.

b. Bagi dunia keguruan dan ilmu pendidikan

Penelitian ini akan menambah wawasan dan perbendaharaan ilmu pengetahuan terutama sejarah khususnya mengenai tokoh-tokoh penting yang tampil sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Sehingga dapat mengetahui jasa dan pengabdianya yang begitu besar bagi Indonesia.

c. Bagi peneliti

Bagi peneliti penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang perjuangan dan pengabdian Mohamad Roem kepada Indonesia.

**D. Tinjauan Pustaka**

Dalam menulis sebuah karya ilmiah diperlukan beberapa sumber guna mendukung kelengkapan sumber data. Salah satu sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku. Adapun buku primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

*Suka Duka Berunding dengan Belanda*, buku ini ditulis oleh Mohamad Roem dan diterbitkan oleh Idayu Press, Jakarta tahun 1972. Buku ini menceritakan berbagai peristiwa penting yang dialami Mohamad Roem selama berunding dengan Belanda. Buku ini dapat digunakan untuk membahas bab III tentang perjuangan Mohamad Roem dalam berbagai perundingan dengan Belanda.



*Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI*, buku ini ditulis oleh Mohamad Roem sendiri dan diterbitkan oleh P.T Gramedia Jakarta tahun 1989. Buku ini berisi kumpulan-kumpulan karangan Mohamad Roem mengenai beberapa bidang penting seperti politik dan sosial-keagamaan. Didalamnya ia juga menceritakan berbagai pengalamannya selama menekuni bidang politik Indonesia. Selain itu Mohamad Roem juga menceritakan beberapa tokoh penting yang ia kenal dengan baik. Buku ini dapat digunakan untuk membahas bab IV mengenai perjuangan Mohamad Roem dalam bidang sosial-keagamaan.

*Bunga Rampai Sejarah Jilid I-III*, buku ini merupakan rangkaian dari tiga jilid buku yang dikarang oleh Mohamad Roem sendiri dan diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta tahun 1972, 1977 dan 1978. Ketiga jilid buku ini pada umumnya berisi tentang berbagai peristiwa penting yang terjadi di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Selain itu juga mengenai berbagai peristiwa penting yang terjadi dalam upaya Indonesia memperoleh kedaulatan penuh dari Belanda. Buku ini penting digunakan untuk membahas bab III tentang perjuangan Mohamad Roem karena pada umumnya apa yang ditulisnya dalam buku ini merupakan pengalaman pribadinya selama ikut berjuang untuk memperoleh kedaulatan Indonesia dari Belanda.

Sumber sekunder yang digunakan adalah buku yang berjudul *Mohamad Reom 70 Tahun Pejuang Perunding*, buku ini ditulis oleh Soemarso Soemarsono dan diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta tahun 1978. Buku ini menceritakan perjuangan Mohamad Roem sebagai seorang pejuang dan perunding, selain itu juga berisi tulisan-tulisan beberapa tokoh mengenai

Mohamad Roem. Beberapa diantaranya menceritakan bagaimana sosok Mohamad Roem sebagai seorang diplomat sejati Indonesia. Buku ini digunakan untuk membahas bab III dan IV tentang perjuangan dan pengabdian Mohamad Roem sebagai seorang pejuang perunding.

*Mohamad Roem, Karier politik dan Perjuangannya*, buku ini ditulis oleh Iin Nur Insaniwati, diterbitkan oleh Indonesiatera Magelang tahun 2002. Buku ini mengupas karier politik dan perjuangan Mohamad Roem. Secara lengkap buku ini menceritakan bagaimana latar belakang pendidikan, keluarga sampai pada saat ia mulai terjun dalam bidang politik Indonesia. Buku ini penting digunakan dalam membahas bab II dan III mengenai bentuk – bentuk perjuangan Mohamad Roem.

*Mohamad Roem Karya dan Pengabdiannya*, buku ini ditulis oleh Suratmin dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986. Buku ini mengupas mengenai karya serta pengabdian Mohamad Roem kepada bangsa Indonesia terutama dalam bidang politik. Suratmin juga menceritakan tentang kehidupan Mohamad Roem mulai dari masa mudanya sampai pada saat dimana Mohamad Roem mulai tampil menjadi seorang diplomat.

#### **E. Kajian Teori**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Mohamad Roem, Perjuangan dan Pengabdiannya Tahun 1924-1983” perlu dikemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul dan tujuan skripsi yaitu :

Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Depdikbud tahun 1998, halaman 336-367



*perjuangan* dalam skripsi ini diartikan sebagai peperangan, usaha dengan penuh kesukaran dan bahaya. Perjuangan juga berarti suatu pembelaan untuk negara dengan cara atau alat apapun yang dimiliki. Perjuangan yang dibahas dalam skripsi ini menitikberatkan pada perjuangan yang dilakukan oleh Mohamad Roem. Perjuangan yang dilakukan oleh Mohamad Roem tidak hanya dalam bidang politik dan pemerintahan saja tetapi juga dalam bidang sosial-keagamaan. Dalam bidang politik Mohamad Roem turut berjuang melalui keikutsertaannya dalam berbagai perundingan dengan Belanda, sedangkan perjuangan dalam bidang pemerintahan, Mohamad Roem banyak menyumbangkan tenaga dan pikirannya melalui peran sertanya dalam pemerintahan dalam beberapa kabinet.

Selain faktor pengalaman pendidikan, ada satu faktor yang ikut mendukung kemampuannya, yaitu keyakinan yang mendalam akan kebenaran ajaran agama Islam yang dipeluknya. Islam dijadikan dasar dalam segala hal, sebab faktor demokrasi dan hak asasi manusia dalam Islam dijunjung tinggi mengingat Islam sendiri memandang kedudukan manusia dihadapan Allah adalah sama, yang membedakan hanyalah ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan berlandaskan keimanan yang kuat, Mohamad Roem sangat gigih mempertahankan segala sesuatu yang dianggapnya benar dan adil. Ia berpendapat bahwa sesuatu yang benar dan adil bila diperjuangkan dengan gigih cepat atau lambat akan memperoleh kemenangan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 59.

Berbekal keyakinan itulah Mohamad Roem berusaha mencurahkan segala daya pikir dan kemampuannya dalam perjuangan diplomasi Indonesia sampai pada saat yang paling menentukan ketika Indonesia berhasil memperoleh pengakuan kedaulatannya dari tangan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

*Diplomasi* adalah urusan atau penyelenggaraan hubungan resmi antara negara dengan negara.<sup>14</sup> Diplomasi merupakan bagian penting dalam sejarah Indonesia terutama dalam perjuangan untuk memperoleh kedaulatan secara penuh dari Belanda. Dalam mencari suatu langkah penyelesaian pertikaian dengan Belanda, diplomasi menjadi suatu senjata yang sangat ampuh, karena tanpa adanya kemampuan berdiplomasi, berbagai perundingan dengan pihak Belanda tidak akan pernah terlaksana dengan baik. Mohamad Roem-lah salah satu tokoh yang ada dibalik perundingan-perundingan tersebut. Mohamad Roem sebagai perunding (diplomat) memang menempati kedudukan yang khas dalam sejarah negara Indonesia. Sehingga walaupun kegiatan perundingan-perundingan itu sudah sekaligus, termasuk dalam rangkaian perjuangannya masih perlu untuk mengemukakan bahwa Mohamad Roem sebagai perunding diberi tempat tersendiri secara khusus pula.<sup>15</sup>

Diplomasi atau perundingan-perundingan yang dilakukan oleh seorang diplomat, merupakan karya gabungan dari pemberian bakat, ditambah pelajaran dan dilengkapi dengan pengalaman. Sebab diplomasi bukan hanya dilakukan secara resmi dibelakang meja perundingan saja, tetapi termasuk

<sup>14</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 253.

<sup>15</sup> Soemarso Soemarsono, *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 115.

juga runding-berunding secara tidak resmi dalam kesepakatan yang lebih leluasa.<sup>16</sup>

Mohamad Roem yang memiliki kemampuan berdiplomasi, turut serta dalam perundingan-perundingan dengan Belanda. Hal itu dibuktikan dalam keikutsertaannya sebagai anggota delegasi dalam perundingan Linggajati, Renville, Roem-Royen dan KMB. Mohamad Roem pernah menjabat sebagai ketua delegasi dalam perundingan Roem-Royen tahun 1949 yang membuka jalan dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda yang kemudian menjadi dasar dilaksanakannya pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

*Diplomat* dapat diartikan sebagai orang yang menyelenggarakan diplomasi, terutama menteri luar negeri dan para duta besar.<sup>17</sup> Keikutsertaan Mohamad Roem dalam perjuangan diplomasi Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai salah satu diplomat ulung yang dimiliki oleh Indonesia.

Berbekal pengalaman berpolitik dan sikapnya untuk selalu menghargai pendapat orang lain, meski berbeda dengan pendapatnya, menunjang keberhasilannya sebagai diplomat.<sup>18</sup> Secara resmi ia mampu melakukan perdebatan dengan delegasi Belanda ketika terjadi selisih pendapat pada saat perundingan sedang berlangsung.

Selama perundingan Linggajati tanggal 13-15 November 1946, Mohamad Roem menjadi salah satu anggota delegasi RI yang menjadi perhatian khusus dari Prof. Schermerhorn—yang tertuang dalam buku

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 118.

<sup>17</sup> W.J.S Poerwadarminta, *loc.cit*, hlm. 253.

<sup>18</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 14*, P.T Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 237.

hariannya—kehadiran Mohamad Roem merupakan pribadi yang diterimanya. Tetapi setelah perundingan mulai berjalan, barulah ia tahu bahwa Mohamad Roem adalah seorang perunding yang bersemangat dan seringkali tidak mudah untuk dihadapi.<sup>19</sup>

*Pengabdian* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal mengabdikan atau mengabdikan.<sup>20</sup> Dalam skripsi ini pengabdian erat kaitannya dengan perjuangan yang dilakukan oleh Mohamad Roem. Karena perjuangan yang dilakukan oleh Mohamad Roem adalah wujud dari pengabdian sebagai seorang pejuang diplomasi. Pengabdian ia tuju kepada perjuangan menegakkan kemerdekaan dan perjuangan dalam memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Bahkan setelah Indonesia berhasil memperoleh kedaulatannya Mohamad Roem masih mengabdikan dirinya kepada kepentingan Indonesia terutama dalam bidang politik maupun sosial-keagamaan.

Menurut Qurais Shihab, *pengabdian* berasal dari kata *abdi*, yang diambil dari kata *abd*. Kata *abd* mengandung tiga arti yaitu tumbuhan yang memiliki aroma yang harum, anak panah dan sesuatu yang dimiliki ( hamba sahaya ).<sup>21</sup> Sebagai seorang abdi seharusnya seseorang itu menggambarkan ketiga hal di atas yaitu bahwa dia memberi aroma yang harum bagi lingkungannya, menjadi alat bagaikan anak panah dan dimiliki secara penuh oleh si pemilik atau kepada siapa ia mengabdikan.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> In Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 61.

<sup>20</sup> W.J.S Poerwadarminta, *op.cit*, hlm. 12.

<sup>21</sup> Quraish Shihab, *Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Mizan, Jakarta, 1994, hlm. 378.

<sup>22</sup> *Ibid.*



Hakikat pengabdian yang sebenarnya ada tiga macam hal. Pertama, seorang abdi tidak menganggap apa yang berada dibawah genggam tangan atau wewenangnya sebagai milik pribadi, karena yang dinamakan abdi (hamba) tidak memiliki sesuatu. Dirinya pun adalah milik tuannya. Kedua, dia juga harus menjadikan segala aktivitasnya berkisar pada apa yang diperintahkan atau menjauhi apa yang dilarang tuannya. Ketiga, tidak memastikan sesuatu pun kecuali setelah ada ijin dari yang diabdi.

Segala kemampuan akan dikerahkan tanpa mempertimbangkan keuntungan apapun. Seseorang yang menjadikan segala usahanya bertumpu pada apa yang diperintahkan kepadanya tidak akan mengisi waktunya dengan sia-sia, tidak untuk memperebutkan kursi kebanggaan dan juga tidak untuk memperbanyak harta demi kemegahan. Apapun cobaan dan tugas yang dibebankan kepadanya akan dipikulnya dengan senang hati. Apabila ketiga hal tersebut telah menghiasi jiwa seseorang, maka dunia dengan segala gemerlapnya, iblis dengan berbagai tipu dayanya bahkan seluruh mahluk sekalipun tidak akan memberi dampak negatif bagi dirinya. Kepada siapapun seseorang mengabdikan, kepada Tuhan, negara atau mungkin seorang manusia-ketiga persyaratan tersebut harus dipenuhi demi kesempurnaan pengabdian.<sup>23</sup>

Persyaratan itulah yang telah dimiliki oleh Mohamad Roem sehingga ia layak disebut sebagai seorang pengabdian. Pengabdian tersebut diwujudkan dalam perjuangannya kepada bangsa Indonesia baik pada masa perjuangan memperoleh kedaulatan penuh dari Belanda maupun perjuangan pada masa

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

setelah penyerahan kedaulatan. Sebagai seorang pejuang ia mengabdikan dirinya tanpa pamrih. Alasan utama yang membuat ia rela mengabdikan dirinya kepada bangsa Indonesia adalah semata demi tetap tegaknya Negara Indonesia, bukan karena ia ingin namanya dicatat dalam tinta emas sejarah sebagai pahlawan. Apabila pada akhirnya namanya kemudian dicatat dalam tinta emas sejarah Indonesia adalah karena perjuangannya yang tiada henti.

Sampai akhir hayatnya Mohamad Roem masih aktif dalam kegiatan sosial keagamaan dimana pada tahun 1955 Ia menghadiri Conference for Moslem and Christian Cooperation di Iskandariyah Mesir. Kemudian pada tahun itu juga Mohamad Roem diundang oleh Yayasan Townhall Foundation di New York, bersama undangan lainnya dari Asia and Middle East Townhall Mission. Rombongan ini berkeliling di Amerika Serikat dalam kunjungan muhibah, memperkenalkan negara dan bangsa Asia dan Timur Tengah kepada rakyat Amerika Serikat.

Mohamad Roem aktif memberikan ceramah di berbagai tempat. Banyak ceramahnya yang dibukukan. Selain berceramah ia juga menulis di berbagai surat kabar. Melalui tulisannya Mohamad Roem berusaha menyumbangkan pikirannya, misalnya tulisannya tentang poligami, monogami dan pengadilan agama yang kemudian dibukukan. Sumbangan pikiran Mohamad Roem lainnya adalah tentang Keluarga Berencana. Ia berpendapat bahwa cara menganjurkan KB paling baik adalah menanamkan pengertian bukan paksaan.<sup>24</sup> Meskipun Mohamad Roem tidak lagi aktif dalam

---

<sup>24</sup> Mohamad Roem, *Monogami, Poligami dan Pengadilan Agama*, Jakarta, H. Ghazali Ismail, 1973, hlm. 9.

dunia perpolitikan Indonesia ia terus berusaha melanjutkan peranannya baik didalam maupun luar negeri dalam bidang yang berbeda. Tidaklah mengherankan bila Dr. J.H. Van Royen pernah menulis surat kepada Mohamad Roem dan berpendapat bahwa Mohamad Roem sudah lama tidak memegang jabatan formal di Indonesia tetapi ternyata tenaga dan pikirannya sangat diperlukan oleh lingkungan yang lebih luas di dunia.<sup>25</sup>

Perjuangan dan pengabdian Mohamad Roem merupakan wujud dari adanya semangat *patriotisme* yang menjadi landasan untuk ikut serta dalam menegakkan kemerdekaan dan memperoleh kedaulatan secara penuh Belanda. *Patriotisme* berasal dari perbendaharaan bahasa Inggris yaitu *patriot* yang berarti pencintaan tanah air.<sup>26</sup>

*Patriotisme* diartikan juga sebagai semangat cinta tanah air yaitu sikap seseorang yang bersedia untuk mengorbankan jiwa raga untuk membela tanah airnya dari serangan musuh. Semangat seperti itulah yang dimiliki oleh Mohamad Roem dalam melakukan perjuangan diplomasi menghadapi Belanda. Pengabdianannya merupakan wujud dari rasa *patriotisme* yang ia miliki. Untuk itulah maka skripsi ini berusaha membahas bagaimana perjuangan dan pengabdianannya kepada bangsa Indonesia.

#### F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan. Hipotesis dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

<sup>25</sup> Soemarso Soemarsono, *op.cit*, hlm. 164.

<sup>26</sup> John Echols & Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, 1990, Gramedia, hlm. 421.



1. Oleh karena latar belakang pendidikan yang tinggi dan aktif dalam organisasi tingkat nasional maka Mohammad Roem mengawali kariernya dalam politik tingkat nasional.
2. Oleh karena kepiawaiannya dalam berdiplomasi, khususnya melalui perjanjian Roem-Royen dan KMB maka kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda.
3. Oleh karena keuletannya dalam berdiplomasi maka Mohammad Roem disebut sebagai pejuang perunding.

#### G. Metodologi Penelitian

Seorang penulis sejarah harus menggunakan metode sejarah untuk menghasilkan suatu tulisan sejarah. Metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>27</sup> Metode adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Hal ini sangat bermanfaat bagi sejarawan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui historiografi.<sup>28</sup> Dalam penulisan sejarah terdapat empat tahap penulisan yaitu :

Tahap pertama penulisan skripsi ini adalah heuristik atau proses pengumpulan sumber yang berguna untuk keperluan menjawab subyek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur

---

<sup>27</sup> Luis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 35.

<sup>28</sup> *Ibid.*

yang terdapat di perpustakaan Universitas Sanata Dharma, perpustakaan UNY dan diberbagai tempat lain. Literatur tersebut berupa buku, jurnal pendidikan maupun artikel surat kabar. Menurut Koentowijoyo, sumber data dibagi dua yaitu sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari kesaksian seseorang secara langsung menyaksikan suatu peristiwa dengan pancainderanya sendiri. Sumber primer dapat disampaikan dalam bentuk tulisan yang ditulis oleh seseorang yang mengetahui peristiwa itu secara langsung. Sumber primer yang digunakan adalah buku karangan Mohamad Roem berjudul *Bunga Rampai Sejarah Jilid I-III* dan *Suka Duka Berunding dengan Belanda*. Sedangkan sumber skunder adalah kesaksiaan yang disampaikan oleh seseorang yang tidak secara langsung menyaksikan suatu peristiwa. Sumber skunder yang digunakan adalah buku karangan Iin Nur Insaniwati yang berjudul *Mohamad Roem, Karier Politik dan Perjuangannya*, *Mohamad Roem Karya dan Pengabdianya* karangan Suratmin dan *Mohamad Roem 70 tahun Pejuang Perunding* karangan Soemarso Soemarsono.

Tahap kedua, yaitu kritik sumber. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan kritik sumber yang merupakan suatu tahap untuk melihat dan mengkaji tingkat otensitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas (kebisaan dipercaya).<sup>29</sup> Dalam penelitian sejarah hal itu sangat perlu dilakukan untuk menghindari adanya ketidakeaslian atau kepalsuan dan adanya subyektivitas yang tinggi dalam suatu sumber.

---

<sup>29</sup> Koentowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Benteng Budaya, 1995, hlm. 99-100.



Dalam penelitian sejarah terdapat 2 kritik sumber yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah kritik sumber yang digunakan untuk menilai apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Pada umumnya kritik intern ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang didapat sehingga dapat memperoleh fakta yang jelas. Sedangkan kritik ekstern adalah kritik yang digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan. Kritik ini dilakukan dengan cara meneliti bahan yang digunakan misalnya sifat bahan, gaya penulisan, bahasa yang dipakai dan jenis huruf yang digunakan.

Dalam penulisan skripsi ini kritik sumber yang dilakukan adalah kritik intern. Sedangkan kritik ekstern tidak perlu dilakukan sebab keaslian sumber tidak perlu diuji kebenarannya. Dapat dikatakan demikian, karena data-data yang digunakan dalam skripsi ini berasal dari dokumen-dokumen yang sudah diuji kebenarannya. Kritik yang perlu dilakukan adalah kritik intern sebab kebenaran sumber data yang ada masih perlu diuji lagi kebenarannya, misalnya dalam penulisan tahun yang berbeda antara sumber yang satu dengan sumber yang lain. Hal ini dapat dimaklumi mengingat data-data yang diperoleh dari berbagai tempat ditulis oleh banyak orang sehingga banyak faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu perlu adanya perbandingan sumber agar dapat memperoleh sumber yang sesuai. Contoh kritik intern yang dilakukan adalah melakukan perbandingan sumber pada sumber-sumber yang diperoleh yang memerlukan penjelasan. Misalnya, kata perjanjian dalam kalimat Perjanjian Roem-Royen. Dalam buku-buku sejarah pada umumnya

ditulis dengan kata perjanjian atau persetujuan, ada pula yang menulis pernyataan. Maka perlu untuk dilakukan perbandingan sumber sehingga didapat kebenarannya.

Menurut Mohamad Roem penggunaan kata yang benar dalam peristiwa penting yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda tersebut adalah pernyataan bukan perjanjian atau persetujuan. Nama resmi dari peristiwa bersejarah tersebut adalah Pernyataan Roem-Roijen (Roem-Roijen Statements) dimana didalamnya tiap pihak yaitu antara Indonesia-Belanda, masing-masing membuat pernyataan yang satu berbeda dengan yang lain. Dan masing-masing akan mengerjakan apa yang telah diterangkan, seperti orang melaksanakan persetujuan.<sup>30</sup> Meskipun demikian dalam hukum ketatanegaraan kedudukan persetujuan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pernyataan, karena sebuah persetujuan merupakan persoalan penting dalam negara apalagi menyangkut kepentingan dengan negara lain. Persetujuan juga memerlukan pengesahan dari parlemen, sedangkan pernyataan dapat bersifat tidak resmi sehingga kedudukannya lebih rendah dari persetujuan.

Tahap ketiga adalah interpretasi. Interpretasi disebut juga sebagai sudut pandang dimana didalamnya dilakukan analisis sumber yang bertujuan untuk mengurangi unsur subyektivitas dalam kajian sejarah. Sudut pandang dalam penulisan ini adalah mengaji perjuangan dan pengabdian Mohamad Roem

---

<sup>30</sup> Mohamad Roem, *Bunga Rampai Sejarah Jilid II*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm. 43.

dalam bidang politik, pemerintahan dan sosial-keagamaan pada masa ketika Indonesia berjuang untuk memperoleh kedaulatannya dari Belanda.

Tahap terakhir yaitu historiografi atau merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>31</sup> Penulisan skripsi yang berjudul Mohamad Roem, Perjuangan dan Pengabdianya Tahun 1924-1983 disusun berdasarkan urutan waktu kejadian, mulai dari tahun 1924 sampai tahun 1983. Tahun 1924 dipilih sebagai awal pembahasan karena pada tahun inilah Mohamad Roem memulai kariernya sebagai seorang politikus, sedangkan tahun 1983 menjadi akhir semua aktivitasnya karena pada tahun tersebut ia tutup usia. Adapun tema-temanya disusun secara sistematis mulai dari awal perjalanan karier Mohamad Roem, bentuk perjuangan serta pengabdianya kepada bangsa Indonesia khususnya bagi kemerdekaan Indonesia.

#### H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik dan pendekatan sosial. Pendekatan politik digunakan untuk melihat bagaimana perjuangan Mohamad Roem dalam bidang politik dan pemerintahan, dimana di dalamnya Mohamad Roem banyak berperan pada perjuangan diplomasi Indonesia. Perjuangan diplomasi Indonesia yang diwujudkan dalam perundingan telah berperan besar pada tercapinya kemerdekaan dan kedaulatan penuh Indonesia dari Belanda. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa meskipun Indonesia telah merdeka pada tanggal 17

---

<sup>31</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, P.T Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 70.



Agustus 1945, Belanda belum mau melepaskan Indonesia sebagai sebagai daerah jajahannya. Berbagai upaya ditempuh guna mencari langkah penyelesaian, salah satunya melalui perundingan. Perundingan menjadi satu-satunya alternatif pilihan ketika pertempuran fisik tidak mampu lagi menjadi langkah penyelesai masalah. Melihat situasi demikian, para pemimpin bangsa berusaha dengan berbagai cara untuk mencari langkah penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Para pemimpin Indonesia sadar bahwa tidak akan mudah untuk berjuang melalui meja perundingan menghadapi Belanda, apalagi sikap Belanda yang selalu dingin dan arogan untuk diajak berunding. Mohamad Roem sebagai salah satu tokoh dibalik perundingan tersebut berusaha dengan segala kemampuan yang ia miliki untuk berjuang di meja perundingan menghadapi para diplomat Belanda. Kepercayaan penuh yang diberikan kepadanya tidak ia sia-siakan untuk memberikan yang terbaik yang ia bisa kepada bangsanya. Hal itulah yang kemudian membuatnya dikenal sebagai seorang pejuang perunding. Tidak hanya itu saja, dalam bidang pemerintahan ia masih tetap dipercaya untuk menjabat posisi penting di beberapa kabinet.

Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan sosial. Pendekatan sosial digunakan untuk melihat bagaimana perjuangan Mohamad Roem dalam bidang sosial-keagamaan serta bagaimana pengabdian Mohamad Roem kepada bangsa Indonesia. Perjuangan Mohamad Roem tidak hanya dalam bidang politik dan pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang sosial-keagamaan. Meskipun pada tahun 1968 menjadi akhir karier politiknya, ia tetap mencurahkan perhatiannya terhadap masalah sosial dan keagamaan, yang sudah sejak lama ia geluti ketika masih aktif dalam dunia politik.



Perjuangannya kali ini lebih di titikberatkan pada masalah sosial-keagamaan, dimana didalamnya ia banyak memberikan perhatian pada masalah sosial dan agama seperti berceramah diberbagai tempat mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat dan mengenai masalah agama. Selain itu, Mohamad Roem juga menulis diberbagai surat kabar, jurnal dan majalah serta menulis buku. Sedangkan pengabdian Mohamad Roem sebagai seorang pejuang dan perunding ia buktikan dalam keuletannya dalam berunding dengan Belanda. Untuk mengisi masa istirahatnya dari dunia politik, Mohamad Roem lebih banyak menyibukkan diri pada kegiatan penulisan sejarah perjuangan Indonesia dan penegakan kemerdekaan Indonesia. Meskipun ia telah memasuki usia tua, ia tetap mengabdikan dirinya kepada bangsa Indonesia walaupun dengan cara yang berbeda ketika ia masih aktif dalam dunia politik. Melalui perjuangan dan pengabdiannya inilah bangsa Indonesia mengakui bahwa ia adalah seorang pejuang dan pengabdi.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi yang berjudul “Mohamad Roem, Perjuangan dan Pengabdiannya” ini mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, berupa pendahuluan yang secara garis besar memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penulisan, pendekatan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berupa uraian mengenai bagaimana awal perjalanan karier Mohamad Roem sampai ia menjadi seorang diplomat Indonesia, yang diawali dari latar belakang keluarga, pendidikan serta awal

keikutsertaannya pada bidang politik yang diawali melalui keikutsertaannya dalam keanggotaan organisasi politik seperti JIB, PSII dan Masyumi.

Bab III, berupa uraian dan bahasan mengenai bentuk perjuangan Mohamad Roem kepada bangsa Indonesia dari tahun 1946-1957. Perjuangan tersebut diwujudkan dalam perjuangan di bidang politik melalui keikutsertaan Mohamad Roem dalam berbagai perundingan dengan Belanda dalam usaha mencari langkah penyelesaian bagi pertikaian antara Indonesia-Belanda serta perjuangan Mohamad Roem dalam bidang pemerintahan dan sosial-keagamaan. Perjuangannya dalam bidang pemerintahan ia wujudkan melalui keikutsertaannya dalam pemerintahan sebagai menteri dalam beberapa kabinet.

Bab IV, berupa uraian mengenai hasil wujud pengabdian Mohamad Roem kepada bangsa Indonesia sebagai seorang pejuang dan perunding serta pengabdianya dihari tua.

Bab V, berupa penutup yang memuat kesimpulan dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan pada bab II, III dan IV.

Melalui sistematika penulisan skripsi ini, penulis berusaha mengupas mengenai perjuangan dan pengabdian Mohamad Roem bagi bangsa Indonesia. Perjuangan dan pengabdian Mohamad Roem dapat dilihat mulai dari awal keikutsertaan Mohamad Roem dalam bidang politik sampai pada keikutsertaannya pada perjuangan diplomasi Indonesia. Bagian pokok lain yang ada dalam skripsi ini akan diuraikan dalam bab – bab selanjutnya.

## BAB II

### AWAL KARIER POLITIK MOHAMAD ROEM

#### A. Latar Belakang Keluarga

“ Omah gebyog wuwung telu”- rumah seluruhnya terbuat dari kayu dengan tiga bubungan atap- di desa Klewogan, Kawedanan Parakan Kabupaten Temanggung, Jateng ; disitulah Mohamad Roem dilahirkan pada hari Sabtu pahing tanggal 16 Mei 1908.<sup>32</sup> Ayahnya, Dulkarnaen Djojواسmito adalah Lurah Desa Klewogan, sedangkan ibunya merupakan anak dari Lurah Desa Kertosari, Temanggung.

Mohamad Roem lahir sebagai anak keenam dari tujuh bersaudara. Ia mempunyai lima orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan. Oleh ayahnya keempat saudara laki-lakinya diberi urutan nama Khalifah setelah jaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Tentu saja Roem tidak diberi nama dengan nama Khalifah karena Khalifah hanya terdiri dari empat orang saja. Untuk itu ayahnya memberi nama kepadanya Mohamad Roem. Nama Roem sendiri merupakan refleksi dari kesadaran historis ayahnya. Sebab didalam Al-Qur'an terdapat surat ar-Rum yng mengkisahkan tentang nasib imperium Romawi. Sedangkan kakaknya yang tertua adalah Muti'ah dan adik bungsunya bernama Siti Chadijah.

---

<sup>32</sup> Soemarso Soemarsono, *op.cit*, hlm, 1.

Desa Klewogan terletak di wilayah Kawedanan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah. Desa ini merupakan lingkungan santri dimana nilai-nilai keislaman tertanam kuat dalam kehidupan masyarakatnya sampai sekarang. Daerah Temanggung memang merupakan wilayah yang mempunyai penganut Islam yang cukup banyak.

Parakan sebagai tempat lahir Mohamad Roem merupakan daerah yang cukup dikenal dikalangan pejuang kemerdekaan pada masa pergerakan. Berdasarkan cerita rakyat setempat Parakan berasal dari kata "*parak*", yang merupakan nama dari seorang kyai yang bernama *Kyai Parak*. Kyai Parak adalah kyai yang cukup dihormati didaerah Parakan, Temanggung dan sekitarnya terutama dikalangan para pejuang kemerdekaan. Beliau dihormati karena memberikan ajaran-ajaran yang berguna kepada muridnya serta membekali murid-muridnya dengan ilmu kanuragan guna membela diri. Selain ilmu kanuragan, murid-muridnya juga ia bekali dengan senjata guna mempertahankan diri dari musuh terutama dari tentara Belanda.<sup>33</sup>

Pada umumnya senjata yang diberikan dalam bentuk jimat, yang ditujukan untuk memberikan keselamatan kepada murid-muridnya dalam berjuang menghadapi pasukan Belanda. Ribuan orang yang tergabung dalam gerakan Hizbullah/Sabilillah menerima gemblengan dari kyai guna membekali diri mereka. Setelah dinilai cukup menerima gemblengan, kyai kemudian memberikan jimat dalam bentuk *ketapel* dengan beberapa belas batunya, sebuah *tongkat dari bambu kuning*, *penthung* dari kayu, beberapa bilah *sujen*

---

<sup>33</sup> Bowo Asianto, dkk, *Temanggung : Tempo Dulu, Sekarang serta Prospek di Masa Datang*, Pemda TK II Temanggung, Temanggung, 1997, hlm. 22

(*tusuk sate*), dan *pedang samurai*. Bambu kuning itulah yang kemudian dikenal dengan bambu runcing, yang dipercaya oleh rakyat setempat berasal dari Parakan. Bambu runcing ini kemudian menjadi senjata tradisional rakyat dalam menghadapi Belanda.

Keberadaan Kyai Parak yang menjadi tonggak dasar berdirinya Parakan membuat Parakan dikenal sebagai daerah yang kental dengan budaya Islamnya. Di wilayah Temanggung, Parakan menjadi kota penting dalam beberapa bidang, baik ekonomi, agraris maupun agama. Dalam bidang ekonomi, Parakan menjadi pusat perdagangan penting di wilayah Temanggung karena daerah ini banyak bermukim orang-orang Thionghoa, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pengusaha dan pedagang. Dalam bidang agraris, wilayah Parakan merupakan daerah sentra tembakau di Temanggung. Hal ini dimungkinkan karena selain sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, wilayah Temanggung didukung oleh kondisi alam yang cukup menguntungkan untuk dijadikan lahan pertanian.

Tembakau menjadi primadona bagi masyarakat Temanggung. Tembakau asli dari Temanggung dikenal dengan nama tembakau *srinthil*. Tembakau ini banyak dicari dipasaran karena selain kualitasnya bagus, kadar nikotin yang terkandung didalamnya sangat tinggi. Hal itu membuat harga tembakau *srinthil* sangat mahal dipasaran. Setiap tahunnya, disekitar bulan Mei sampai Oktober seluruh lahan pertanian dilereng gunung Sumbing dan Sindoro ditanami tembakau.



Kehidupan agraris masyarakat Temanggung terutama Parakan ini juga diikuti dengan kehidupan agamis yang harmonis. Kentalnya bidang agamis dan agrarisnya membuat wilayah Temanggung dan Parakan dikenal sebagai wilayah yang agraris-agamis.

Kehidupan agamis masyarakat Parakan ini juga melekat pada keluarga Mohamad Roem. Dulkarnaen, ayah Roem sangat peduli akan kehidupan agama dalam keluarganya. Ia menyerahkan pendidikan agama anak-anaknya kepada Pak Wongso. Melalui kyai inilah Roem mempelajari Islam. Dulkarnaen,- sebagaimana diakui Roem- sebenarnya bukanlah seorang ahli agama, bahkan dari berbagai segi menunjukkan adanya pembauran antara nilai Jawa dan Islam sehingga mempersulit masuk dalam kelompok santri.<sup>34</sup> Menurut Roem, ayahnya adalah orang yang selalu berusaha menerapkan ajaran Islam dalam keluarganya setiap hari. Keluarga Djojosasmito sangat menghayati kehidupan Muslim dalam rumah tangganya.<sup>35</sup>

Lingkungan ini memberikan kecenderungan khusus bagi pilihan hidup keluarganya. Usman, kakaknya, yang mati tertembak dalam Agresi Militer Belanda II, memilih menjadi Kepala Jawatan Agama Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan istri Usman merupakan aktivis organisasi Islam, Muslimat. Kakak perempuan Roem, Muti'ah juga aktivis Muhammadiyah di Pekalongan. Hanya satu saudaranya yang menggantikan ayahnya sebagai lurah Desa Klewogan.

---

<sup>34</sup> Fachry Ali, Mohamad Roem Diplomat Pejuang, dalam *Prisma*, no. 6, tahun 1984.

<sup>35</sup> *Ibid.*



Dalam kehidupan keluarga Djojomasmito, neneklah yang mempunyai peran dominan. Nenek memegang peranan penting terutama dalam hal mendidik anak. Sementara ayahnya yang bertindak sebagai kepala keluarga justru memegang peranan kedua. Tetapi hal itu tidak membuat Roem dan saudara-saudaranya tidak patuh dan hormat kepada ayahnya. Dalam beberapa hal mereka tetap melihat kepada ayahnya yang hanya memerankan peranan kedua. Sikap ayahnya yang tetap menentukan.

Selama Roem kecil tinggal di Parakan perkembangan kepribadiannya banyak dipengaruhi oleh sistem pengasuhan anak yang saling bertolak belakang antara ayah dan neneknya. Disatu sisi, neneknya menerapkan pola pengasuhan anak yang cenderung feodalistik, sedangkan di sisi lain ayahnya menerapkan pola yang lebih demokratis.<sup>36</sup> Namun sebagai seorang ayah sekaligus anak, Dulkarnaen Djojomasmito tidak bersifat konfrontatif terhadap nenek Mohamad Roem yang menerapkan pola pengasuhan anak yang kurang demokratis.

Sistem pengasuhan anak tersebut diterapkan dalam pergaulan Roem kecil. Nenek yang cenderung konservatif melarang Roem untuk bergaul dengan anak kampung. Hal itu dilakukan karena Roem adalah anak seorang lurah yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat lain. Pandangan seperti ini merupakan sesuatu yang umum dalam masyarakat Jawa, yang berpandangan bahwa kedudukan dan pangkat seseorang akan membuat seseorang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Maka oleh

---

<sup>36</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit.*, hlm. 2.

masyarakat di kampungnya Roem kecil dipanggil dengan sebutan “*Den Roem*”, sedangkan ayahnya dipanggil “*Den Lurah*”.<sup>37</sup> Tetapi ayahnya mempunyai pandangan yang berbeda. Roem tetap diperbolehkan untuk bergaul dengan siapapun dan dari kalangan manapun. Sehingga meskipun ia adalah anak seorang lurah ia tetap bergaul dan bermain dengan anak-anak desa lainnya.

Selain berpandangan konservatif, nenek Roem percaya pada hal-hal yang berbau mistik dan bersifat takhayul seperti kepercayaan orang Jawa pada umumnya.<sup>38</sup> Neneknya percaya akan kekuatan jimat-jimat tertentu. Beberapa hal yang ia anggap tidak diperbolehkan untuk dilakukan ia sebut dengan kata “*ora ilok*”. Sedangkan Roem dan ayahnya lebih percaya akan kekuatan Tuhan. Tetapi meskipun demikian, ayahnya tetap menghormati kepercayaan neneknya.

Roem kecil tinggal di Parakan hanya sampai umur 11 tahun. Karena pada tahun 1919 ia terpaksa dipindahkan ke Pekalongan. Di sekitar tahun 1919 tersebut daerah Parakan terserang wabah pes, influenza dan kolera yang sangat mematikan. Ketiga penyakit ini menjadi penyakit yang sangat ditakuti penduduk. Siapa saja yang terkena pada umumnya akan meninggal. Melihat situasi yang demikian, ayahnya tidak mau berpikir panjang untuk segera memindahkan Roem dan adik bungsunya ke Pekalonga. Ia tidak ingin Roem dan adik bungsunya tertular virus yang sangat mematikan tersebut. Selama di

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bpk. H.Hasyim Affandi, Mantan Bupati Magelang Periode tahun 1998-2003, Beliau adalah cucu dari Pak Wongso, Guru mengaji Mohamad Roem, tinggal di Kampung Besar Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

<sup>38</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 3.

Pekalongan Ia tinggal bersama kakaknya yang tertua, Muti'ah, yang biasa ia panggil Yu Tik, kakaknya telah menikah dengan Ranuwihardjo, seorang aktivis oorganisasi di Pekalongan.

Roem kecil mendapat situasi yang berbeda pada masa-masa awal tinggal di Pekalongan. Perbedaan yang ia rasakan adalah mengenai pemakaian bahasa Jawa. Orang Pekalongan memakai bahasa Jawa tidak sebagaimana mestinya, karena orang-orang di kampung dimana Roem tinggal berbahasa Jawa ngoko dengan dengan orangtuanya dan dengan siapapun.<sup>39</sup> Roem beserta kakak dan adiknya tinggal di kampung Derpowangsan. Orang-orang di kampung ini pada umumnya adalah orang berada, tingkat pengetahuan dan pendidikannya sudah lebih tinggi. Di kota ini, Roem di usia 11 tahun mengalami proses sosialisasi gerakan sosial Islam. Lingkungan keluarga yang kental dengan Islam semakin memperdalam pendidikan agamanya.

Pekalongan menjadi tempat penting bagi Roem karena kota ini merupakan salah satu pusat gerakan reformis Islam di Jawa.<sup>40</sup> Ide-ide tentang sosialisme Islam gagasan Tjokroaminoto berpadu dengan semangat puritanisme Muhammadiyah. Roem tinggal dalam sebuah keluarga yang menjadi anggota gerakan itu. Kakak iparnya menjabat sekretaris PSII dan sekaligus tokoh Muhammadiyah Pekalongan. Seperti halnya suaminya, Yu Tik juga aktif dalam kegiatan organisasi. Ia bersama suaminya aktif dalam organisasi Muhammadiyah.

<sup>39</sup> Roem, *Diplomasi, op.cit*, hlm. 110.

<sup>40</sup> Fachry Ali, *op.ci*, hlm. 25.

Kehidupan Roem selama tinggal di Pekalongan memberikan arti penting bagi kehidupannya selanjutnya. Dari keluarga inilah ia memperoleh pendidikan agama dari kakaknya sekaligus menjadi awal ketertarikannya pada bidang politik. Pendidikan agama yang diperoleh selama di Pekalongan maupun di Parakan merupakan landasan fundamental dalam dirinya yang terkristal dalam pribadi Muslim sejati.<sup>41</sup> Maka ketika ayah Roem meninggal pada tahun 1920, yang kemudian disusul ibunya 6 tahun kemudian, ia memutuskan untuk menetap di Pekalongan. Selain untuk melanjutkan studi di Pekalongan, Roem juga telah menemukan kehidupan baru yang akan menjadi awal perjalanan hidupnya.

Mohamad Roem menikah dengan Markisa Dahlia yang merupakan teman semasa ia aktif dalam organisasi. Mereka kemudian menikah 13 Juni 1932 dan dikaruniai dua orang anak yaitu Roemoso Roem dan Rumeisa Roem.

## **B. Latar Belakang Pendidikan**

Kemampuan Mohamad Roem untuk berdiplomasi melambungkan namanya menjadi seorang diplomat ulung. Tetapi kemampuannya tersebut tidak akan secara sempurna ia miliki tanpa pengetahuan dan ketrampilan yang sempurna pula. Sebagai seorang pribadi ia memang seorang yang cerdas, sabar, ulet dan selalu menghargai orang lain. Sifat inilah yang kemudian menjadi bekalnya untuk berjuang di depan meja perundingan menghadapi

---

<sup>41</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 7.

diplomasi Belanda. Kepandaian dan keuletannya tidak terlepas dari perhatian ayahnya akan pendidikannya. Ayahnya ingin Roem dan saudara-saudaranya menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negaranya kelak. Keinginan itu pada akhirnya terwujud. Seorang putra Parakan telah muncul sebagai seorang diplomat dan politikus yang disegani tidak hanya di dalam negeri tetapi juga diluar negeri.

Bekal utama yang ia dapat menjadi seorang diplomat dan politikus adalah pendidikan yang ia tempuh dari tahun 1915. Pendidikan yang ia tempuh telah mampu mengasah bakatnya menjadi seorang diplomat. Perhatian ayahnya akan pendidikan Roem diwujudkan ketika Roem mulai beranjak dewasa.

Roem baru mulai masuk sekolah setelah berumur 9 tahun. Pada waktu itu dikalangan rakyat Parakan sedang berkembang semangat untuk menanamkan pendidikan dikalangan rakyat. Hal itu merupakan akibat dari menjalarnya gerakan Sarekat Islam yang membuka mata rakyat menuju kemajuan. Sebelum Roem bersekolah, hanya menghabiskan waktunya hanya untuk bermain dan mengaji. Pada waktu siang ia bergembala kambing disawah bersama anak-anak desa lainnya dan diwaktu malam Roem mengaji dirumah Pak Wongso. Sementara saudara-saudaranya yang lebih tua waktu itu mulai memasuki kursus karena tidak dapat diterima lagi dalam sekolah karena sudah besar.

Ayah Roem memasukkannya di *Sekolah Desa ( Volkschool )* ketika ia dinilai cukup untuk memulai pendidikannya. Roem termasuk sebagian anak-



anak Jawa yang beruntung. Ia bisa masuk sekolah karena ia adalah anak seorang lurah. Jabatan ayahnya ini memberinya kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan. Selain itu, tahun-tahun itu merupakan masa dilaksanakannya kebijakan baru penjajah yang lebih memperhatikan bumiputera. Kritik kaum sosialis dan kaum etis Belanda yang dilancarkan sejak tahun 1891 telah mendorong lahirnya kebijaksanaan baru program pemerintah Belanda tentang Hindia. Dengan perubahan kebijaksanaan ini, perlahan-lahan pemerintah Belanda memperluas kesempatan kepada anak-anak Indonesia golongan atas untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah yang berbahasa Belanda.<sup>42</sup>

Setelah Roem menempuh pendidikannya di *Volkschool* selama dua tahun, Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke *HIS (Holland Inlandsche Schoo)* di Temanggung. Setiap hari ia harus naik kereta api untuk menempuh perjalanan dari Parakan ke Temanggung. Ia bisa secara mudah masuk ke HIS itu juga karena ayahnya adalah seorang lurah. Untuk masuk ke HIS terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi yaitu harus anak pegawai negeri atau yang lain, dengan sponsor yang menjaminkannya.<sup>43</sup>

Roem mengikuti pendidikan di HIS Temanggung hanya sampai kelas 3, karena pada tahun 1919 Ia dipindahkan ke Pekalongan oleh ayahnya untuk menghindari bahaya wabah pes, influenza dan kolera. Di Pekalongan ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIS pekalongan pada tahun 1919-1924. Setelah tamat dari HIS Ia berhasil mengikuti ujian masuk *STOVIA*

<sup>42</sup> John Ingleson, *Jalan Menuju Pengasingan, Pergerakan Nasional Indonesia tahun 1927-1934*, Jakarta, LP3ES, hlm. 1.

<sup>43</sup> Soemarso Soemarsono, *op.cit*, hlm. 4.



(*School Tot Opleiding voor Indische Artsen*) di Jakarta sekaligus memperoleh beasiswa. STOVIA merupakan salah satu lembaga pendidikan yang diusahakan oleh pemerintah Belanda, khusus untuk mendidik dokter pribumi. Pendidikan di STOVIA diikutinya selama 10 tahun, yang dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian persiapan selama 3 tahun dan bagian *Geneeskunding (kedokteran)* selama 7 tahun. Sehingga untuk menjadi seorang dokter Jawa atau *Indische Artsen*, ia harus menempuh pendidikan di STOVIA selama 10 tahun.

Roem menyelesaikan pendidikannya di STOVIA bagian persiapan pada tahun 1927. Pada tahun tersebut STOVIA dihapuskan oleh Belanda karena alasan politis. Bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya diberi kesempatan untuk memilih sekolah. Saat itu alternatif yang diberikan adalah *NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School)* di Surabaya dan *AMS (Algemere Middelbare School)*.

Roem memutuskan untuk melanjutkan ke AMS. Selama mengikuti pendidikan di STOVIA pada 2 tahun pertama, Roem tinggal di asrama STOVIA yang terletak di Gedung Kwini. Tetapi ketika gedung tersebut berubah menjadi gedung AMS, maka kelas tambahan dipindahkan ke asrama Jan Pieterzoon Coen di jalan Guntur, Jakarta.

Sebagai seorang pelajar Roem juga pernah mengalami kegagalan, tetapi hal itu tidak membuatnya patah semangat untuk terus belajar. Kegagalan tersebut ia alami ketika mengikuti ujian masuk untuk melanjutkan pendidikannya ke *GHS (Geeneskundige Hoge School atau Sekolah Tinggi*

*Kedokteran*). Roem gagal dalam dua kali mengikuti ujian masuk GHS. Selama dua tahun menganggur karena gagal masuk GHS, Roem mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah ikut aktif dalam organisasi. Ia kemudian masuk menjadi anggota PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia). Kemudian pada tahun 1932, Roem masuk ke *RHS (Rechts Hoge School atau Sekolah Tinggi Hukum)* di Jakarta. Setelah lulus dari RHS Ia memperoleh gelar "*Mester in de Rechten*" atau Sarjana Hukum dan memulai kariernya sebagai pengacara serta membuka kantor pengacara dengan nama "Mr. Mohamad Roem" di Jakarta.

### C. Awal Karier Politik Mohamad Roem sebagai Seorang Politisi.

Pekalongan sebagai rumah kedua bagi Mohamad Roem memberikan arti penting bagi perkembangan dan pemikirannya terhadap dunia politik. Ditempat inilah Mohamad Roem mulai mengenal dunia politik terutama dalam bidang keorganisasian melalui kakak iparnya, Mas Ranuwihardjo.

Mas Ranuwihardjo merupakan anggota PSII sekaligus tokoh Muhammadiyah Pekalongan. Dalam organisasi PSII, Mas Ranu menjabat sebagai sekretaris. Jabatan ini semakin melapangkan jalannya untuk lebih mengenal dunia politik dan tokoh-tokohnya. Beberapa tokoh politik yang ia kenal baik tidak hanya dari kalangan PSII saja tetapi dari kalangan orang-orang Muhammadiyah.

Keaktifan Mas Ranu dalam kegiatan politik terutama dalam bidang keorganisasian memberikan kesan tersendiri bagi Mohamad Roem. Ia

kemudian juga tertarik untuk mengikuti jejak Mas Ranu terjun dalam kancah kapartaian. Ketertarikannya semakin kuat ketika ia berhasil masuk STOVIA, maka ketika ia menjadi pelajar STOVIA, ia kemudian masuk menjadi anggota organisasi pemuda atau pelajar seperti Jong Java dan Jong Islamieten Bond yang berkembang dilingkungan STOVIA. Meskipun Jong Java (pada awal berdirinya) dan JIB bukan organisasi politik, justru melalui kedua organisasi pemuda inilah Mohamad Roem berkenalan dengan dunia perpolitikan sehingga wajar bila karier politik Mohamad Roem diawali dari keanggotaannya dalam Jong Java dan JIB yang kemudiaan dilanjutkan dengan kiprahnya dalam Partai Sarekat Islam dan Gerakan Penyardar.<sup>44</sup>

Jong Java merupakan organisasi pemuda Indonesia pertama yang bersikap netral dalam asas kebangsaan. Berdasarkan sejarah berdirinya, Jong Java yang terbentuk pada 12 Juni 1918 adalah kelanjutan dari *Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia)* yang berdiri pada 7 Maret 1918.<sup>45</sup> *Tri Koro Dharmo* merupakan organisasi yang bersifat Jawa sentris karena cita-citanya lebih tertuju kepada cinta tanah air serta memperluas persaudaraan dan mengembangkan kebudayaan Jawa.<sup>46</sup> Organisasi ini didirikan oleh R.Satiman Wirjosandjojo dan Soenardi.

Sifat Jawa sentris yang kental dalam *Tri Koro Dharmo* menimbulkan ketidaksenangan di kalangan pemuda diluar pulau Jawa, seperti pemuda – pemuda suku Sunda dan Madura. Untuk menghindari perpecahan antara

<sup>44</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 14.

<sup>45</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hlm. 99.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 99.

pemuda-pemuda suku Jawa dan non Jawa dalam tubuh Tri Koro Dharmo, pada kongresnya di Solo, pada 12 juni 1912 Tri Koro Dharmo mengubah organisasinya menjadi Jong Java. Menurut anggaran dasar yang ditetapkan pada kongres Jong Java keempat di Bandung tahun 1921, Jong Java bertujuan membangun cita-cita Jawa Raya dengan jalan mengembangkan rasa bersatu diantara golongan-golongan orang Indonesia di Jawa, Madura dan Bali untuk mencapai kemakmuran dan kekayaan batin.<sup>47</sup>

Mohamad Roem masuk menjadi salah satu anggota Jong Java ketika ia menempuh pendidikan di STOVIA. Jong Java tumbuh dilingkungan STOVIA seperti organisasi kepemudaan lainnya, dimana setiap anggotanya disesuaikan dari suku mana ia berasal. Karena Mohamad Roem adalah orang Jawa maka sudah barang tentu ia akan masuk keanggotaan Jong Java.

Jong Java yang tumbuh dilingkungan STOVIA menjadi organisasi kepemudaan yang maju karena mempunyai berbagai macam kegiatan yang bermanfaat bagi pelajar STOVIA yang menjadi anggotanya. Pada tahun 1924 Jong Java dipimpin oleh Sjamsuridjal, seorang pemuda Jawa yang maju dan merupakan pelajar dari Rechts School. Ia mempunyai pemikiran yang mendalam dan jauh kedepan tentang tugas yang ia akan kerjakan dalam masyarakat bagi kepentingan bangsa.<sup>48</sup>

Sebagai seorang ketua umum, Sam mengajukan usul yang sederhana, agar dikalangan Jong Java dibuka kesempatan mempelajari agama Islam. Usul ini muncul dengan pertimbangan bahwa sebagai calon pemimpin masyarakat,

---

<sup>47</sup> A.K Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat, Djakarta, 1964, hlm. 96.

<sup>48</sup> Mohamad Roem, *Diplomasi, op.cit*, hlm. 127.



anggota Jong Java hendaklah memahami masyarakat yang akan dipimpinnnya dengan mengenal sikap, kecenderungan serta keyakinan masyarakat itu, dan lebih banyak bergaul dengan mereka. Kedua segi ini hanya dapat dikembangkan jika mereka lebih mengenal agama yang dianut oleh sebagian masyarakat itu, yaitu Islam. Sam berpendapat bahwa usul tersebut adalah wajar dan dapat dipertanggungjawabkan karena pendeta-pendeta Katolik dan Protestan juga telah mengadakan kursus pelajaran agama mereka untuk anggota-anggota peminat dari Jong Java.<sup>49</sup>

Dalam pemungutan suara yang diadakan dalam rangka usul Sam tersebut ternyata oleh sebagian anggota Jong Java usul tersebut ditolak setelah dalam dua kali pemungutan suara, suara yang dihasilkan jumlahnya sama besar antara setuju dan tidak setuju. Kegagalan ini membawa hikmah besar karena menurut Mohamad Roem, jika usul Sjamsuridjal diterima mungkin tidak akan ada organisasi pemuda Islam seperti sekarang ini, karena penolakan itu justru menjadi ilham tersendiri bagi berdirinya Jong Islamieten Bond atau Pemuda Persatuan Islam (JIB) pada tahun 1925.<sup>50</sup>

Meskipun usulnya ditolak oleh sebagian anggota Jong Java, tetapi usul tersebut justru mendapat restu dari tokoh Islam yang cukup berpengaruh, yaitu Haji Agus Salim, Haji Ahmad Dahlan dan H.O.S Tjokroaminoto. Maka pada tanggal 1 Januari 1925 dibentuklah Jong Islamieten Bond. Berdirinya JIB memberikan kesempatan tidak saja bagi Mohamad Roem tetapi juga para

<sup>49</sup> Deliar Noer, " JIB ( Persatuan Pemuda Islam ) ", dalam Soemarso Soemarsono, *Mohamad Roem 70 tahun : Pejuang Perunding*, Bulan Bintang, Djakarta, 1978, hlm. 141-142.

<sup>50</sup> *Ensiklopedi Islam Jilid 2*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1993, hlm. 327.



anggota JIB. Meskipun telah resmi menjadi anggota JIB, keanggotaannya dalam Jong Java tidak dilepaskannya.

Dalam JIB sifat keanggotaannya lebih terbuka karena siapa saja dan dari daerah manapun berasal diperbolehkan masuk menjadi anggotanya. Asas dan tujuan JIB sebagaimana tercermin dalam anggaran dasar pertamanya antara lain :

1. Mempelajari Islam dan menganjurkan agar ajaran-ajarannya dilaksanakan.
2. Mengembangkan rasa simpati terhadap Islam dan para pengikutnya, selain menunjukkan sikap toleran positif terhadap pemeluk agama lain.<sup>51</sup>

Sebagai organisasi yang mempunyai tujuan seperti diatas, melalui kongresnya yang pertama pada bulan Desember 1925, JIB lebih menekankan kegiatan-kegiatannya pada studi Islam sebagai langkah utama mentaati peraturan dan ajaran-ajaran Islam.<sup>52</sup> Kegiatan JIB lebih difokuskan pada kegiatan yang bersifat keagamaan misalnya kursus-kursus dan ceramah-ceramah agama. Selain itu JIB juga menerbitkan buku dan majalah berbahasa Belanda. Sebagai organisasi yang sifanya terbuka, JIB membuka kesempatan kepada para anggotanya untuk mengkritik, membandingkan dan lebih menekankan dalam meneliti Islam. Anggota JIB juga tidak dipaksa untuk melaksanakan sholat atau menjalankan puasa. JIB lebih menekankan pada proses pemahaman dalam beragama sehingga mereka dengan kesadaran sendiri akan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai perintah agama.

---

<sup>51</sup> Mohamad Roem, "JIB yang Saya Alami", dalam *Panji Masyarakat*, No. 348, Tahun XXIV, 2 Januari 1982, hlm. 21'.

<sup>52</sup> Deliar Noer, *op.cit*, hlm. 245.

Untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan para anggotanya, JIB kemudian mendirikan suatu bagian khusus berupa kepanduan dengan nama *National Indonesische Padvinderij* atau *Natipij (Organisasi Pandu Indonesia)*. Natipij merupakan organisasi kepanduan biasa tetapi dengan perbedaan yang penting, yakni para anggotanya diwajibkan mempelajari dan menaati ajaran-ajaran Islam.<sup>53</sup> Dalam organisasi ini Mohamad Roem bertindak sebagai salah satu ketuanya. Selain pernah menjadi pemimpin Natipij Mohamad Roem juga pernah menjadi Ketua Persiapan Kongres JIB tahun 1930 yang dilaksanakan di Jakarta, yakni bertempat di Gedung Kesenian yang persiapannya ia lakukan selama 6 bulan.<sup>54</sup>

Keaktifan Mohamad Roem dalam JIB dan Natipij menuntun langkahnya untuk berkenalan dengan Haji Agus Salim, yang pada saat itu menjadi penasehat JIB. Melalui Agus Salim inilah Mohamad Roem mendapatkan berbagai pelajaran dan pengalaman. Hubungan yang dekat antara Mohamad Roem dengan Haji Agus Salim sangat mempengaruhi langkah politik Mohamad Roem kelak dikemudian hari.<sup>55</sup> Melalui hubungan ini pula Mohamad Roem, mulai tertarik terhadap partai politik khususnya Partai Sarekat Islam Indonesia ( PSII ) karena pada waktu itu Haji Agus Salim merupakan salah satu tokoh penting dalam PSII.

Mohamad Roem kemudian masuk menjadi anggota PSII pada tahun 1932, tetapi meskipun demikian ia tidak melepaskan keanggotannya dalam

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 250.

<sup>54</sup> Suratmin, *Mohamad Roem, Karya dan Pengabdianya*, Depdikbud, Jakarta, 1986, hlm. 31.

<sup>55</sup> Jin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 20

Jong Java dan JIB. Hal itu disebabkan karena keikutsertaannya dalam dunia politik bukan atas nama JIB melainkan atas nama perorangan. ia masuk dalam keanggotaan PSII tanpa menjadi anggota *SIAP (Syarikat Afdeling Pandu)* atau Pemuda Muslim terlebih dahulu. Keaktifannya dalam PSII semakin mendekatkannya kepada tokoh-tokoh penting lain selain Haji Agus Salim seperti Abdul Mutholib Sangaji serta mantan anggota JIB yang sudah menjadi anggota PSII seperti Surowijoyo, Sjamsuridjal dan Mohamad Sarjan.<sup>56</sup>

Roem sangat mengagumi Agus Salim, bahkan ia juga sering berkunjung ke rumah Agus Salim bersama-sama Kasman Singodimedjo, Soeparno dan lain-lain. Hubungan Roem dan Salim semakin kental karena pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah keislaman Salim untuk JIB serta tulisannya di surat kabar Hindia Baru, Tajuk dan Mimbar Jum'at. Keindonesiaan Roem semakin kuat setelah mendengar pidato Agus Salim pada kongres JIB pertama tahun 1926 di Yogyakarta. Agus Salim waktu itu menyatakan bahwa betapa masyarakat Hindia terutama kalangan intelektual dicekam di bawah superioritas Barat. Selain itu, dalam gerakan perlawanan dan usaha melepaskan diri dari dominasi Barat, Indonesia bergerak dan dibawah pimpinan langsung atau tidak langsung, menurut garis yang diberikan Barat.<sup>57</sup> Mungkin karena itulah Roem pernah berkata bahwa ketika Ia dan kawan-kawan aktif dalam Jong Java dan JIB, mereka umumnya

---

<sup>56</sup> Suratmin, *op. cit.*, hlm. 36.

<sup>57</sup> Mohamad Roem, "Memimpin adalah Menderita : Kesaksian Haji Agus Salim", dalam Taufik Abdullah, et. al, (ed.), *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, Djakarta, LP3ES, 1978, hlm. 103.

menyadari bahwa dengan berorganisasi kelak dapat menjadi pemimpin bangsa.<sup>58</sup>

Pengaruh Agus Salim kelak menentukan arah langkah-langkah politik Mohamad Roem. Dengan kesadaran itulah Roem semakin aktif di JIB sejak tahun 1925 dan menjadi anggota *National Indonesische Papvinderij (Natipij)*, organisasi kepanduan JIB. Meski demikian, kegiatan Roem di JIB tidak terlalu lama. Segera setelah menjadi mahasiswa *Recht Hoge School (Sekolah Tinggi Hukum)* Roem melepaskan aktivitasnya di JIB. Sebagai gantinya, bersama Jusuf Wibisono ia mendirikan *Studen Islamitische Studie Club*.<sup>59</sup> Bahkan dalam waktu yang bersamaan Roem telah aktif di berbagai kegiatan politik PSII dalam arti sebenarnya, walaupun sebelum menjadi anggota resmi PSII ia telah menjadi ketua panitia kongres PSII di Jakarta.

Roem secara resmi masuk menjadi anggota PSII pada tahun 1932. Sebagai mahasiswa hukum, ia aktif membela nasib atau perkara orang-orang PSII dimuka pengadilan pemerintah Belanda. Sebagian besar perkara yang dibelanya adalah menyangkut persoalan tanah partikelir dan sikap tuan tanah yang sewenang-wenang terhadap bawahan. Semua kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama dengan Agus Salim.

Ketika Roem masuk PSII, semangat radikalisme organisasi ini semakin surut, semangat kooperasi jauh lebih besar daripada nonkooperasi. Agus Salim melihat bahwa tekanan-tekanan yang diberikan Belanda terhadap gerakan nasionalisme merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Menurut

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 122-123.

<sup>59</sup> Deliar Noer, "JIB (Persatuan Pemuda Islam)", dalam Soemarso Soemarsono, *op.cit*, hlm. 249.





Agus Salim agar PSII tidak terisolir, maka harus melaksanakan kebijaksanaan kooperasi. Akan tetapi sebagian besar anggotanya tidak bersimpati terhadap pendapat Salim, akibatnya Ia telear dari organisasi.

Haji Agus Salim yang bertindak sebagai Ketua Dewan Partai ini mengusulkan kepada Lajnah Tanfidziyah dibawah pimpinan Abikusno Tjokrosujoso untuk meneliti kembali politik hijrah sehubungan dengan keluarnya peraturan yang lebu ketat dari pemerintah Belanda dalam menghadapi kegiatan partai politik yang bersifat nonkooperasi.<sup>61</sup> Ia berpendapat bahwa politik Hijrah harus ditinggalkan dan menjalankan politik kooperasi karena peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda akan membuat partai menjadi lumpuh.<sup>62</sup>

Dalam rapat gabungan Dewan Partai dan Lajnah Tanfidziyah, usul Haji Agus Salim ditolak. Abikusno Tjokrosujoso menuduh usul Haji Agus Salim ini diajukan karena ambisi pribadinya yang ingin duduk dalam volksraad. Kondisi semakin meruncing ketika dalam rapat-rapat selanjutnya masalah tersebut tidak dibicarakan sama sekali, bahkan dalam kongres PSII pada tanggal 8-12 Juli 1936 masalah tersebut tetap tidak dibahas. Pada kongres tersebut justru dipilih Abikusno Tjokrosujoso sebagai ketua partai, sedangkan Haji Agus Salim hanya menjadi pengurus.

Diangkatnya Abikusno sebagai ketua justru semakin memperkeruh suasana karena banyak kalangan melihat pecahnya anggota menjadi beberapa kelompok yang saling menuduh telah menimbulkan banyak fitnah. Melihat

<sup>61</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia tahun 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1980, hlm. 159.

<sup>62</sup> In Nur Insaniwati, *op.cit.*, hlm. 22.



situasi tersebut Haji Agus Salim kemudian mendirikan Barisan Penyardar PSII tahun 1936. Melalui Barisan Penyardar ini Haji Agus Salim kemudian membentuk partai baru yaitu Pergerakan Penyardar.

Pembentukan partai ini ternyata menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota PSII. Sebagian mendukung Haji Agus Salim dan sebagian menentang bahkan menganggapnya sebagai lawan. Bersama Mohamad Roem yang juga aktif dalam pergerakan ini Haji Agus Salim mencoba untuk menyadarkan kawan-kawan seperjuangannya dari bahaya yang muncul sebagai akibat dari adanya perpecahan tersebut. Beberapa orang yang mendukung Haji Agus Salim seperti A.M Sangadji, Haji Zainal dan lain-lain kemudian mengadakan musyawarah yang menetapkan bahwa Barisan Penyardar PSII melepaskan diri dari tubuh PSII dan secara resmi menjadi organisasi yang berdiri sendiri dengan nama *Pergerakan Penyardar*.

Pergerakan Penyardar sesuai kesepakatan para anggotanya, bergerak dalam bidang politik dan tidak berhaluan nonkooperasi seperti yang dianut oleh PSII. Jika politik nonkooperasi diterapkan dalam Pergerakan Penyardar maka akan menimbulkan kesulitan karena pemerintah Belanda akan bersikap tegas terhadap partai-partai yang tidak mau diajak kerjasama dan bersikap radikal.

Dalam pergerakan Penyardar, Mohamad Roem duduk sebagai Ketua Komite Sentral Eksekutif (*Lajnah Tanfidziyah*), sementara Soedjono menjabat sebagai Ketua Komite Eksekutif. Partai ini bersifat kooperasi dengan Belanda, dalam arti bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus dicapai dengan radikal,

tetapi dengan jalan perundingan. Oleh karena itu, Penyadar mendukung Petisi Soetardjo dari Persatuan Pegawai-pegawai *Binnerlands Bestuur (PPBB)*. Sebab, petisi itu berisi tuntutan yang sejalan dengan sikap Agus Salim dan Roem, yang meminta agar dalam waktu 10 tahun diadakan konferensi untuk membicarakan Hindia Belanda bersiri sendiri.

Latar belakang dukungan itu sebenarnya adalah agar Penyadar memperoleh legitimasi politik dan landasan dalam aktivitasnya. Ini dilakukan karena memburuknya keadaan akibat penindasan terhadap gerakan kemerdekaan. Jangankan menyebut 'merdeka', sebutan 'Indonesia' saja dilarang, terlebih dalam rapat-rapat anggota parpol.<sup>63</sup>

Dalam situasi inilah Mohamad Roem melihat pandangan Agus Salim yang paling realistis. Baginya, penekanan untuk mencapai kemerdekaan harus diubah, yaitu dengan perundingan, bukan secara radikal. Roem pun ikut berunding dengan Tjarda Starckenborgh Stakhouwer, Gubernur Jenderal Belanda, mengenai masa depan Indonesia.

Dalam perundingan itu, Agus Salim mengusulkan kesediaan rakyat Hindia membantu Belanda dalam Perang Dunia II dengan syarat Indonesia harus merdeka. Sampai Indonesia merdeka, Tjarda tidak memperhatikan usul tersebut. Ketika Jepang masuk tahun 1942, seluruh partai politik dibubarkan termasuk Penyadar. Meski demikian pengalaman dengan Agus Salim memberikan arah aktivitas politik Roem sebagai pejuang dan perunding.

---

<sup>63</sup> Fachry Ali, *op.cit*, hlm. 26.

Dalam konteks Agus Salim inilah Roem harus dipahami, yakni dalam sikap realistis dan berusaha berdialog dengan kenyataan. Interaksinya dengan Salim ia pergunakan dengan baik untuk mengebangkan pribadinya. Rumusan pandangan realistis dituangkannya dengan pribadi yang bebas dan tidak terlalu terikat pada kelompok atau organisasi. Bentuk sikap inilah yang kemudian menentukan putusan-putusan politik pribadinya.<sup>64</sup>

Faktor yang amat kuat mempengaruhi roem sebagai diplomat dan perunding, bukanlah semata-mata bakat atau warisan ketrampilan yang diperoleh dari Agus Salim, melainkan bentukan pribadi yang bebas. Dengan bentukan itu, ia terbebas dari rasa risih untk bertindak sebagai perunding sebab waktu itu kelompok-kelompok kekuatan perlawanan terhadap Belanda lebih menekankan perjuangan fisik daripada perundingan.<sup>65</sup>

Makna bentukan pribadi yang bebas bagi Roem- yang diejawantahkan untuk lebih memilih lapangan diplomasi dalam tarik-menarik kekuatan pro dan kontra perundingan- akan bisa dipahami dengan melihat situasi semacam ini, sedikitnya Roem bisa ditempatkan pada perjuangan kemerdekaan penuh yang mendapat pengakuan formal dari dunia internasional, khususnya Belanda. Dengan itu pula, sekaligus menempatkan perjuangan diplomasi pada lokasi tersendiri dalam perjuangan kemerdekaan.

Sebagai putra Jawa yang mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan, Roem tampil sebagai salah seorang dari kaum intelektual yang melahirkan gagasan nasionalisme Indonesia. Mereka yang memperoleh

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Idem.*

pendidikan Barat menyadari bahwa masa depan kemerdekaan politik Indonesia tidak akan berarti jika tidak disertai kemerdekaan ekonomi. Kritik kaum sosialis Belanda yang dilancarkan sejak tahun 1891 telah mendorong dilahirkannya kebijakan baru program pemerintah Belanda tentang Hindia.

Belanda ingin memperbaiki kesejahteraan rakyat, karena Belanda merasa telah berutang budi kepada rakyat Hindia akibat eksploitasi yang dilakukan Belanda telah memberikan keuntungan yang berlimpah kepada Belanda. Maka secara perlahan Belanda memperluas kesempatan kepada anak Indonesia golongan atas untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah yang berbahasa Belanda. Roem termasuk salah seorang diantara anak Hindia Belanda yang terpilih memperoleh kesempatan tersebut.

Munculnya kaum intelektual baru yang menggugat struktur sosial politik Hindia Belanda merupakan dampak terpenting dari perubahan kebijaksanaan ini. Kelompok intelektual, terutama para pelajar Hindia di Belanda, bisa berkomunikasi langsung dengan berbagai aliran pemikiran yang sedang berkembang di Eropa pada tahun 1928-an, terutama Marxisme, Leninisme dan Sosialisme. Melalui pemikiran ini-pemikiran ini mereka mendapatkan penjelasan tentang situasi penjajahan sekaligus memikirkan cara bagaimana untuk sesegera mungkin membebaskan Indonesia dari penjajahan tersebut. Maka kemudian muncul gerakan-gerakan yang menuntut kemerdekaan, mulai dari lahirnya Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), hingga Indische Sociaal Democratische Vereniging

atau ISDV (1914) sampai organisasi pemuda dari organisasi yang bersifat kesukuan sampai organisasi nasional keagamaan.

Dalam hiruk pikuk suasana gerakan nasionalisme ini Roem muncul. Sebagai orang pilihan yang memiliki kesempatan menggap dunia pendidikan- suasana semacam itu sangat mempengaruhi persepsi Roem ketika berhadapan dengan kenyataan sosial politik bangsanya. Pilihan hidup yang dijalannya kemudian, sebagaimana Roem yang dikenal sekarang menunjukkan besarnya pengaruh suasana itu kedalam dirinya. Roem tidak muncul sebagai tokoh nasionalis " *sekular* ", walau secara umum baik dengan Hatta, Soekarno, Ali Sastroamodjojo, maupun Sjahrir memiliki persepsi yang sama tentang masa depan bangsanya. Pilihan aliran pada kelompok gerakan nasionalis Islam ditentukan oleh proses sosialisasi nilai yang berlangsung ketika masih kanak-kanak dimana ia diikutsertakan untuk memperoleh pendidikan agamanya dari Pak Wongso. Maka, setelah aktif menjadi anggota JIB, PSII dan Gerakan Penyardar, Roem juga turut andil dalam pembentukan Masyumi (*Majelis Syuro Indonesia*).

Pembentukan Masyumi berawal ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah Jepang menyerah, Indonesia berhasil memproklamkan diri menjadi negara yang merdeka. Pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 5 November 1945 yang mengijinkan pembentukan organisasi politik.

Sebelumnya pada masa pendudukan Jepang aktifitas politik mengalami kevakuman karena pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang yang



melarang berkembangnya partai politik. Kondisi tersebut kemudian mendorong pembubaran seluruh partai politik oleh pemerintah Jepang termasuk Pergerakan Penyardar sehingga untuk sementara waktu Mohamad Roem tidak melakukan aktivitas politik. Ia kemudian melanjutkan praktik sebagai pengacara.

Mohamad Roem mulai aktif kembali dalam dunia politik ketika ia diangkat menjadi Kepala Barisan Pelopor kampung Kwintang dimana ia tinggal. Kegiatan Barisan ini pada umumnya lebih ditujukan pada pembanguna sarana sarana umum. Selain aktif dalam Barisan Pelopor, ia juga aktif dalam Barisan Hizbullah (Tentara Allah) yang didirikan pada 14 Oktober 1944.

Peranannya pada masa kemerdekaan nampak ketika menjadi anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Ia menjadi salah satu anggota dari 15 orang yang berasal dari kalangan Islam. Setelah itu ia ditunjuk sebagai ketua Komite Nasional Indonesia Jakarta Raya. Sedangkan keikutsertaanya dalam organisasi Masyumi dimulai pada tahun 1945 ketika pada kongres umat Islam sebagai awal dibentuknya Masyumi tanggal 7-8 November 1945. ia diangkat menjadi anggota bersama Mohamad Natsir, Kyai Haji Ahmad Dahlan beserta tokoh lain. Selam Masyumi berdiri yakni antara tahun 1945-1960, Masyumi telah tujuh kali mengadakan pemilihan pimpinan pusat Masyumi, yaitu tahun 1945, 1951, 1952, 1954, 1956 dan 1959.<sup>66</sup> Selama tujuh kali itulah Mohamad Roem duduk dalam Pimpinan Pusat Masyumi. Dalam

---

<sup>66</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 42.

susunan Pengurus Pusat Masyumi tersebut dapat dilihat bahwa ia termasuk salah satu anggota Pengurus Pusat Masyumi yang cukup berpengaruh. Roem dikenal mewakili sayap moderat ia adalah politikus yang lugu, tetapi sangat berpegang kepada prinsip perjuangan yang diyakininya.

Dalam Masyumi kepemimpinan partai mempunyai dua tahapan periode yang masing-masing dikendalikan oleh kelompok yang berbeda-beda dan dengan cara yang berbeda-beda. Pada periode pertama antara tahun 1945-1949 kepemimpinan Masyumi didominasi oleh dua kelompok tua, periode kedua tahun 1952-1960 didominasi kelompok muda. Kelompok tua diwakili oleh Soekiman, sedangkan kelompok muda diwakili oleh Natsir. Mohamad Roem sendiri termasuk dalam kelompok Natsir. Selama aktif dalam keanggotaan Masyumi, Mohamad Roem banyak terlibat dalam bidang pemerintahan. Keaktifannya dalam bidang pemerintahan membuat tenaga dan pikirannya lebih banyak tercurah kepada pemerintah. Ia dipercaya beberapa kali menjabat sebagai menteri di berbagai kabinet dan sekali menjabat sebagai wakil perdana menteri. Aktivitasnya dalam pemerintahan inilah yang kemudian membuat ia dipercaya sebagai anggota delegasi maupun ketua delegasi dalam beberapa perundingan dengan Belanda.

Debut pertama diplomasinya berlangsung ketika kekuasaan RI semakin lama semakin tergerogoti. Ketika ia menerima jabatan menteri dalam negeri pada Kabinet Sjahrir III, ia sangat sadar bahwa wilayah kekuasaan RI yang efektif hanya di Yogyakarta dan Aceh. Alasan ini mendorong Roem bersedia

menjadi anggota delegasi perjanjian Linggajati walau Masyumi, partainya sendiri menolak perjanjian tersebut.

Pada tanggal 13 September 1960 secara mengejutkan Partai Masyumi dibubarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan presiden yang menetapkan pembubaran partai Masyumi termasuk bagian, cabang dan ranting-rantingnya diseluruh Indonesia. Hal itu didasarkan atas anggapan pemerintah bahwa Masyumi melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Tindak lanjut dari keputusan tersebut adalah ditangkap dan dipenjaranya para pemimpin Masyumi termasuk Mohamad Roem pada tanggal 16 Januari 1962. Mohamad Roem bersama pemimpin Masyumi yang lain ditahan di Madiun Jawa Timur selama empat tahun empat bulan, kemudian baru dibebaskan oleh pemerintah Orde Baru pada bulan Mei 1966.

### BAB III

#### BENTUK PERJUANGAN MOHAMAD ROEM

##### A. Perjuangan dalam Bidang Politik

Pada masa revolusi terdapat beberapa tokoh yang dinilai cukup berperan besar dalam perjuangan bangsa Indonesia menegakan Kemerdekaan. Dalam perjuangan fisik kita mengenal nama-nama pejuang seperti Panglima Besar Jendral Soedirman, Bung Tomo, Supriyadi dan lain-lain. Beberapa tokoh tersebut telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk tampil digarda depan menghadapi pasukan Belanda. Tidak jarang yang kehilangan harta benda, keluarga bahkan nyawa sekalipun. Pengorbanan mereka itulah yang membuat para pahlawan tersebut lebih banyak dikenal oleh rakyat Indonesia pada saat ini. Tetapi apakah orang akan mengetahui bahwa masih banyak tokoh-tokoh lain yang juga turut berjuang meskipun bukan dengan senjata melainkan melalui jalur perundingan atau diplomasi. Tokoh-tokoh dibalik perundingan tersebut juga memberikan andil yang besar bagi perjuangan penegakan kemerdekaan Indonesia.

Mohamad Roem adalah salah satu tokoh dibalik perundingan tersebut. Baginya dunia diplomasi adalah suatu dunia yang tidak asing lagi.<sup>57</sup> Berawal dari ketertarikannya dalam dunia politik ketika ia menempuh pendidikan di STOVIA, ia kemudian memantapkan diri untuk terjun dalam dunia politik. Hidup dalam negara yang dikuasai oleh Kolonial justru membuat ia semakin ingin mencurahkan tenaga pikiran dan waktunya demi bangsanya agar dapat

---

<sup>57</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 58.

sesegera mungkin terlepas dari belenggu penjajahan. Maka ketika ia mendapat kesempatan untuk dapat memperoleh pendidikan, hal itu dimanfaatkan dengan baik. Dalam suasana menempuh pendidikan inilah kemudian Mohamad Roem mulai dikenalkan oleh dunia politik Hindia Belanda. Bersama para pejuang lain ia kemudian turut berjuang melalui keikutsertaannya dalam organisasi kebangsaan.

Didukung oleh kemampuannya untuk berbicara dan berdiskusi serta kedekatannya dengan tokoh-tokoh politik ternama seperti, Haji Agus Salim, ia tampil menjadi salah diplomat ulung yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kiprahnya dalam percaturan politik Indonesia pada masa pelaksanaan perundingan dengan Belanda sudah tidak diragukan lagi bahkan ketika kemudian tanggal 27 Desember 1949 Indonesia akhirnya memperoleh kedaulatannya dari Belanda itu juga merupakan hasil kerja kerasnya bersama pejuang-pejuang lain. Maka untuk mengetahui bagaimana perjuangannya sebagai wujud pengabdiaannya kepada Indonesia berikut diuraikan kiprah Mohamad Roem dalam dunia politik Indonesia dari tahun 1946 sampai 1957.

**1. Keikutsertaan Mohamad Roem sebagai Anggota Delegasi dalam Perundingan Linggajati tahun 1946.**

Selama menjadi anggota Masyumi Mohamad Roem lebih banyak terlibat dalam bidang pemerintahan. Melalui partai inilah Mohamad Roem banyak menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada pemerintah. Partai Masyumi adalah salah satu partai besar yang cukup kritis terhadap pemerintah. Dalam susunan pengurus pusatnya Mohamad Roem



merupakan salah satu anggota Pengurus Pusat Masyumi yang dibentuk dalam Mukktamar pertama tahun 1945 sampai Mukktamar yang terakhir tahun 1959.

Keaktifannya dalam bidang pemerintahan berkali-kali mendudukannya dalam jabatan menteri dalam beberapa kabinet dan sekali menjabat sebagai wakil perdana menteri. Pada masa kabinet Sjahrir III periode 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947, ia diangkat menjadi menteri dalam negeri. Jabatan tersebut membuat waktunya lebih banyak terfokus kepada masalah dalam negeri Indonesia. Pada saat ia menjabat sebagai menteri dalam negeri, Indonesia sedang berada pada masa sulit dimana, Indonesia pada saat itu sedang berusaha menemukan langkah penyelesaian sengketa dengan Belanda. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa meskipun Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum merdeka sepenuhnya karena Belanda belum mau melepaskan Indonesia sebagai jajahannya. Hal itu berakibat pada minimnya pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Untuk itu maka para pemimpin Indonesia berjuang untuk mendapat kedaulatan tersebut baik dari Belanda maupun dunia internasional sekaligus merebut wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh Belanda.

Indonesia dan Belanda kemudian sepakat mengadakan perundingan untuk menyelesaikan sengketa setelah perundingan pertama mengalami kegagalan. Sebelumnya Indonesia dan Belanda telah mengadakan perundingan yang dilaksanakan di Hoge Veluwe dekat kota

Amhen Nederland pada tanggal 14, 21, 22 dan 24 April 1946.<sup>58</sup> Saat itu Indonesia diwakili oleh Mr. Soewandi selaku menteri kehakiman, Dr. Soedarsono selaku menteri dalam negeri dan Mr. A.K Pringgodigdo selaku sekretaris kabinet. Sementara pihak Belanda diwakili oleh Perdana Menteri Willem Schermerhorn, Menteri Luar Negeri J.H.van Roijen, Gubernur Jendral Van Mook, Menteri Urusan Daerah Seberang Laut J.H Logemann, dan Menteri Sosial William Dress.

Perundingan tersebut mengalami jalan buntu, tetapi sekalipun perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, di Hoge Veluwe telah dicapai beberapa prinsip yaitu pengakuan *defacto* atas RI (sekalipun atas pulau Jawa saja) dan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk federal setelah masa peralihan tertentu.<sup>59</sup>

Kegagalan perundingan tersebut serta belum tercapainya kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda menuntut untuk segera dibukannya kembali perundingan baru guna mencari langkah penyelesaian. Perundingan kemudian dilaksanakan di Jakarta pada 7 Oktober 1946 di Konsulat Jendral Inggris di Jakarta guna membahas gencatan senjata diantara kedua negara. Masing-masing delegasi kemudian membentuk panitia gencatan senjata. Anggota panitia gencatan senjata dari pihak Belanda antara lain: 1). Prof. Willem Schermerhorn, 2). Van Mook, 3). Max Van Pool, 4). F.de Boer, sedangkan anggota dari

<sup>58</sup> Soemarso Soemarsono, *op.cit*, hlm.123.

<sup>59</sup> Ab.Lapian dan P.J Drooglever, dalam "Menelusuri Jauh Linggajati: Diplomasi dalam Perspektif Sejarah, Grafiti, Jakarta 1992, hlm.

Indonesia terdiri dari: 1). Sutan Sjahrir, 2). Mohamad Roem, 3). Sutanto Tirtoprodjo, 4). Dr Soedarsono. Perundingan ini diketuai oleh Lord Killearn, seorang diplomat senior dari Kerajaan Inggris yang khusus diberi tugas untuk membantu kedua belah pihak.<sup>60</sup>

Perundingan ini berjalan cepat dan pada tanggal 14 Oktober 1946 telah dihasilkan suatu persetujuan gencatan senjata yang berlaku pada hari itu juga. Kedudukan militer belanda RI tidak boleh diubah, dan angkatan militer kedua belah pihak pada kedudukan tersebut ditambah. Selain itu, dibentuk suatu komisi pengawas gencatan senjata yang terdiri dari wakil Inggris, Belanda dan Indonesia.<sup>61</sup>

Setelah dicapai kesepakatan gencatan senjata kedua belah pihak, perundingan kemudian dilanjutkan pada perundingan berikutnya. Perundingan ini lebih banyak difokuskan pada masalah politik. Dipilihlah suatu daerah yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dan Yogyakarta yaitu desa Linggajati wilayah kabupaten Kuningan Cirebon Jawa Barat, sebagai tempat perundingan antara Indonesia dengan Belanda.

Perundingan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 November 1946. Delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, sedangkan anggotanya adalah Mohamad Roem, Amir Sjarifuddin, Dr.A.K Gani, Susanto Tirtoprodjo, dan Dr. Leimena. Sementara delegasi Belanda diketuai oleh Prof. Willem Schermerhern, anggota-anggotanya terdiri dari

---

<sup>60</sup> Mohamad Roem, 1977, *op.cit*, hlm. 10.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 11.

F. De Boer, Dr. Max Van Pool dan Dr. van Mook selaku Letnan Gubernur Jendral untuk Hindia Belanda.<sup>62</sup>

Dalam perundingan ini Mohamad Roem sebagai anggota delegasi RI mendapat perhatian khusus dari Schermerhorn yang tertuang dalam buku hariannya. Kehadiran Mohamad Roem merupakan pribadi yang dapat diterimanya. Tetapi setelah perundingan mulai berjalan, barulah ia tau bahwa Mohamad Roem adalah seorang perunding yang bersemangat dan sering kali tidak mudah untuk dihadapi.<sup>63</sup> Prof. Schermerhorn sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang diplomat yang sangat sulit dihadapi. Hal itu terlihat ketika delegasi Belanda memperkenalkan delegasinya dengan sebutan komisi jendral bukan sebagai delegasi belanda. Pihak belanda sengaja memperkenalkannya demikian dengan maksud agar delegasi RI mengetahui bahwa komisi jendral memiliki mandat terbatas. Tetapi dengan cepat hal itu dikritik oleh Mohamad Roem. Ia berpendapat bahwa sebutan delegasi tetap dipakai oleh pihak Belanda seperti yang selama ini selalu dipakai oleh kedua belah pihak yaitu Delegasi Belanda dan Delegasi Indonesia.

Menanggapi hal itu Schermerhorn menangkis bahwa sebutan untuk Delegasi Belanda tersebut adalah suatu kekeliruan dan harus diperbaiki dengan batas-batas konstitusi Belanda yaitu komisi jendral. Perdebatan baru bisa diselesaikan setelah ada usul dari Van Pool yang mengatakan agar delegasi Belanda disebut "*The Commission General As*

---

<sup>62</sup> Soemarso. Soemarsono. *op.cit.* hlm. 125.

<sup>63</sup> In Nur Insaniwati, *op.cit.* hlm. 61.

*Nederland's Delegation*". Mengenai perdebatan ini, Schermerhorn menyebut Mohamad Roem mulai "*Meronta Kuda*" (Roem begon hiertegen te Steigeren).<sup>64</sup>

Dalam perkembangannya pihak Belanda menginginkan kehadiran wakil dari daerah-daerah diluar Jawa dan Sumatra. Sehubungan dengan pembicaraan tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan daerah-daerah diluar Jawa dan Sumatra. Menanggapi keinginan Belanda tersebut Mohamad Roem dengan tegas mengemukakan gambaran bahwa RI juga tampil mewakili daerah-daerah diluar Jawa dan Sumatra (yang masih dikuasai oleh Belanda atau mendirikan pemerintahan masing-masing dengan dorongan Belanda). Perbedaan pendapat ini menjadi perdebatan keras diantara kedua belah pihak. Karena perdebatan ini berlangsung lama, maka terpaksa sidang ditangguhkan. Oleh adanya penangguhan tersebut, maka pada sidang berikutnya sengaja tidak melanjutkan perbincangan mengenai masalah itu secara khusus sebagai suatu kebijaksanaan untuk melancarkan sidang-sidang berikutnya.<sup>65</sup>

Pada sidang berikutnya pihak Belanda mengusulkan agar perundingan berakhir pada 15 November 1946 ditutup oleh Lord Killearn. Mohamad Roem kembali mengemukakan reaksinya. Atas reaksi Mohamad Roem tersebut Schermerhorn menulis sebagai berikut :

*" Roem menjadi sangat galak dan membandel, kemudian berkata bahwa hal tersebut sangat tidak tepat, karena yang berunding toh hanya pihak Belanda dan Indonesia dan bukan bukan pihak lain sama sekali. Sayapun menjadi berang*

<sup>64</sup> Soemarso Soemarsono, *op.cit*, hlm. 126-129.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 127.



*dan mengatakan kepadanya bahwa masalah ini sudah disetujui bersama Soekarno dan karena itu semata-mata menjadi urusan intern sendiri tidak lagi menjadi urusan kami*<sup>66</sup>

Ketegangan tersebut baru berakhir ketika Amir Sjarifuddin menunjukkan secarik kertas yang berisi catatan tentang pembicaraan Schermerhorn dengan Presiden Soekarno yang menguntungkan pendirian ketua delegasi Belanda tersebut.

Pada hari ketiga perundingan, tepatnya 15 November 1946, direncanakan akan dilangsungkan sidang. Direncanakan sidang akan berjalan singkat karena agenda sidang hari itu hanya acara penandatanganan persetujuan yang tercapai di Linggajati antara Belanda dan RI. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, karena sidang tidak dapat secara cepat diselesaikan. Hal itu tidak lain karena kritikan Mohamad Roem terhadap pasal-pasal 1 persetujuan tersebut berisi :

*"Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan defacto pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatera. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan bekerjasama antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula kedalam daerah Republik. Untuk menyelenggarakan yang demikian itu, maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu supaya selambat-lambatnya pada waktu yang disebutkan dalam pasal 12, masuknya daerah-daerah tersebut telah selesai. Sedangkan pasal 12 menyatakan bahwa pemerintah Belanda dan pemerintah RI akan mengusahakan Belanda Indonesia itu telah selesai sebelum tanggal 1 Januari 1949".*<sup>67</sup>

Menurut Mohamad Roem pasal 1 dari persetujuan tersebut kurang tepat, sebab penyerahan kekuasaan wilayah yang diduduki Belanda dan

<sup>66</sup> Suratmin, *op. cit.*, hlm. 78.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 165-166.

Sekutu dirumuskan dengan pengertian *dejure*, padahal yang dimaksudkan hanya kekuasaan *defacto*. Sekali lagi Schermerhorn menanggapi dengan nada keras. Ia berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Mohamad Roem tersebut tidak dapat diselesaikan. Belum tercapainya kesepakatan atas usulan Mohamad Roem tersebut, Ketua Delegasi RI Sjahrir, akhirnya mengusulkan agar pembicaraan pada hari itu tidak tercantum dalam notulen.

Naskah persetujuan Linggajati yang terdiri dari 17 pasal akhirnya diparaf oleh ketua delegasi masing-masing pada 15 November 1946. Tetapi naskah tersebut ditentang oleh Parlemen Belanda dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Dalam perkembangannya Parlemen Belanda terlebih dahulu menyetujui naskah Linggajati yakni pada tanggal 20 Desember 1946. Sedangkan KNIP pada 5 Maret 1947. Banyak tanggapan yang muncul dalam masyarakat yang bersifat pro dan kontra.

Golongan yang menerima persetujuan Linggajati adalah Sarekat Buruh Minyak, Partai Katolik RI, Pengurus Besar Partai Rakyat, Barisan Buruh Listrik dan Gas, Pesinda (Pemuda Sosialis Indonesia), Partai Sosialis, PKI, Markas Besar Angkatan Muda Katolik RI, Partai Tani, Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil, Persatuan Pemuda Kristen Indonesia, Sarekat Buruh Gula, Persatuan Buruh Indonesia.<sup>68</sup> Mereka menganggap bahwa penerimaan rencana persetujuan Linggajati adalah

---

<sup>68</sup> Slamet Mulyana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia Jilid II*, Balai Pustaka, Djakarta, 1969, hlm. 225.

suatu syarat perjanjian baru dalam menyelesaikan revolusi nasional dengan anggapan kemerdekaan 100% harus dicapai tahap demi tahap.<sup>69</sup>

Golongan yang menolak adalah Partai Nasionalis Indonesia yang mengeluarkan ketidaksetujuannya dalam pernyataan tertanggal 28 November 1946.<sup>70</sup> Alasan penolakannya adalah karena bunyi dan makna naskah dan penjelasan-penjelasanannya tidak dapat memberi keyakinan bahwa kehidupan RI sebagai negara politis dan ekonomis terjamin.<sup>71</sup> Partai Mohamad Roem sendiri ternyata juga menolak. Pada sidang pleno Masyumi di Yogyakarta pada 20-21 November 1946 menghasilkan kesepakatan menolak persetujuan Linggajati. Melihat kondisi yang sedemikian rupa maka rencana persetujuan Linggajati dibawa ke sidang pleno KNIP (25 Februari 1947) untuk mendapat pengesahan. Akhirnya pada 5 Maret 1947 KNIP mensahkan rencana persetujuan tersebut.

Langkah KNIP tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menandatangani persetujuan Linggajati yang berlangsung pada 25 Maret 1947 di Istana negara Jakarta. Persetujuan ini meliputi pokok-pokok sebagai berikut : 1) Pengakuan defacto oleh Belanda terhadap kekuasaan RI di Jawa, Madura dan Sumatera; 2). Pengakuan terhadap RI sebagai salah satu negara dalam RIS yang akan dibentuk; 3). Pembentukan Uni Indonesia Belanda yang akan dikepalai oleh ratu dari kerajaan Belanda.<sup>72</sup> Indonesia kemudian diakui secara defacto oleh beberapa negara seperti

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 226.

<sup>70</sup> Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet Pemerintah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 56.

<sup>71</sup> Slamet Mulyana, *op.cit*, hlm. 226.

<sup>72</sup> Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Revolusi Nasional Pembangunan*, Djakarta, 1963, hlm. 24-25.

AS, Inggris dan Australia. Sedangkan negara-negara arab mengakui RI secara *de jure* atas inisiatif sendiri.<sup>73</sup>

## 2. Mohamad Roem Sebagai Anggota delegasi dalam Perundingan Renville (1947-1948).

Langkah penyelesaian yang dilakukan melalui perjanjian Linggajati ternyata tidak berjalan sesuai rencana karena pada kenyataannya Belanda tetap tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia secara *de jure* sebagai negara yang berbentuk serikat. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum pada tanggal 27 Mei 1947 yang ditunjukkan kepada pihak RI yang pada waktu itu dibawah PM Sjahrir untuk tunduk kepada intepretasi Belanda atau menghadapi perang. Akhirnya pada 20 Juni 1947, Sjahrir tunduk pada ultimatum tersebut dan memberikan konsesi yang ditekankan kepadanya dan menyetujui bahwa Belanda mempunyai hak-hak kedudukan istimewa dalam pemerintahan Indonesia sementara yang akan datang.<sup>74</sup> Akibatnya Kabinet Sjahrir III jatuh kemudian digantikan oleh kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli-11 November 1947).

Ketegangan semakin meningkat diantara Belanda dan Indonesia. Kemudian secara sepihak Belanda menyatakan tidak terikat lagi terhadap persetujuan Linggajati dan memutuskan untuk melancarkan secara besar-besaran pada 21 Juli 1947. Jawa Barat diduduki oleh pasukan Belanda. Sementara dari wilayah timur Surabaya dan Madura juga berhasil diduduki

<sup>73</sup> Mohamad Roem, Bunga Rampai Jilid II, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>74</sup> Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, Kinta, Djakarta, 1974, hlm. 210.



oleh Belanda. Karena daerah-daerah sentral dikuasai oleh Belanda, pasukan RI terpaksa bergerak mundur dalam kebingungan.<sup>75</sup>

Agresi militer yang dilancarkan Belanda tersebut segera menarik perhatian dunia dan PBB. Indonesia ternyata mendapat dukungan dari negara-negara seperti India, Australia dan Uni Soviet. Atas usul Australia melalui wakilnya Kolonel Hodgson di Lake Success, dekat New York tanggal 30 Juli 1947 masalah Indonesia diajukan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Campur tangan PBB dalam konflik antara Indonesia dengan Belanda berbuah pada gencatan senjata yang kemudian dilaksanakan 4 Agustus 1947. Dalam perkembangan selanjutnya, sidang Dewan Keamanan PBB selama beberapa kali diputuskan membentuk sebuah komisi guna menengahi konflik serta membantu pelaksanaan perundingan antara Indonesia-Belanda. Komite ini diberi nama *Komite Jasa Baik (Commission of Good Office)* yang beranggotakan wakil-wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat. Anggota-anggota Komisi Jasa Baik dikenal dengan *KTN (Komisi Tiga Negara)*, yakni Richard Kirby (Australia), Paul Van Zeeland (Belgia) dan Frank Graham (AS).<sup>76</sup>

Atas prakarsa KTN kemudian disepakati bahwa akan dibuka perundingan baru antara Indonesia dan Belanda. Pada kesempatan ini perundingan akan dilaksanakan ditempat yang dianggap netral bagi kedua belah pihak, maka ditunjuklah kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di dekat Shanghai, Cina. Perundingan tersebut kemudian dimulai

<sup>75</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terj Dharmana Hardjowijomo, UGM University Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 339.

<sup>76</sup> Mohamad Roem, *Suka Duka*, *op. cit.*, hlm. 21.



pada tanggal 8 Desember 1947.<sup>77</sup> Delegasi Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjyoatmojo, Jhr. Van Vredenburg, Dr. Soumokil, pangeran Kertanegara dan Zulkarnaen. Sementara delegasi RI terdiri dari Mr. Amir Sjarifuddin, Mr. Nassrun dan Ir. Djuanda.

Keikutsertaan Mohamad Roem dalam perundingan ini sebagai anggota delegasi bukan atas nama pribadi tapi atas nama partai Masyumi. Dalam kabinet Amir Sjarifuddin (11 November 1947-29 Januari 1948), Mohamad Roem duduk sebagai menteri dalam negeri dan turut serta sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan Renville.

Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 1948 yang ditandai dengan penandatanganan persetujuan Renville<sup>78</sup>. Dalam perundingan tersebut disepakati bahwa Belanda tetap berdaulat atas Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada RIS yang segera dibentuk, tetapi meskipun demikian Belanda dapat menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada suatu pemerintahan federal sementara sebelum RIS dibentuk. Selain itu, yang disepakati bahwa RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat akan menjadi peserta sejajar dengan Kerajaan Belanda dalam Uni Netherland Belanda dengan Raja Belanda sebagai kepala negaranya, kemudian RI akan menjadi negara bagian RIS dan dalam jangka waktu 6 bulan dan

---

<sup>77</sup> George MC. Turman Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Terjem. Nju Bakdi Sumanto, UNS Press, Surakarta, 1991, hlm. 283

<sup>78</sup> Lihat lampiran 5 hal. 138.

selambat-lambatnya itu supaya diadakan pemilu untuk membentuk Dewan Konstitusi RIS.<sup>79</sup>

Perundingan ini ternyata tetap memiliki hambatan seperti perundingan-perundingan sebelumnya karena pada umumnya perundingan ini ditolak oleh sebagian rakyat Indonesia karena dengan adanya persetujuan ini semakin memperlemah kedudukan RI dan semakin memperkecil wilayah RI. Beberapa Partai termasuk Masyumi juga ikut menolak persetujuan ini dengan menarik menteri-menterinya yang duduk dalam kabinet.<sup>80</sup> Penolakan juga diberikan PNI, akibatnya atas desakan partai ini Kabinet Amir Sjarifuddin dibubarkan dan mengembalikan mandatnya kepada presiden 23 Januari 1948.

Pembubaran kabinet ini menuntut untuk segera di bentuk kabinet baru. Maka dibentuklah kabinet baru yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Kabinet Hatta mempunyai tugas berat karena harus memikul konsekuensi persetujuan Renville yang sangat berat bagi bangsa Indonesia. Kemudian atas prakarsa KTN, perundingan antara RI dan Belanda dimulai kembali pada pertengahan Maret 1948. Sebagai ketua delegasinya ditunjuklah Mohamad Roem, Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakilnya dan Mr. Latuharhary, Dr. Tjoa Sik len, Mr. Nasrun, Prof. Dr. Seopomo serta Prof. Mr. Susanto Kolopaking sebagai anggotanya.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Deliar Noer, *Partai Islam dalam Pentas Nasional*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1987, hlm. 165.

<sup>80</sup> A.H Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 7: Periode Renville*, Disjarah AD dan Angkasa, Djakarta, 1976, hlm. 11

<sup>81</sup> Susanto Tirtoprodjo, *op.cit*, hlm. 26

Sebagai ketua delegasi Mohamad Roem harus bekerja keras karena mengatur siasat dan taktik untuk menghadapi Belanda. Mengingat perundingan Renville sangat merugikan RI. Maka ia harus berusaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya berjuang memperoleh kedaulatan penuh seperti yang sudah diperjuangkan Indonesia sejak dulu. Disini Mohamad Roem dituntut untuk mempertahankan wilayah RI yang terlanjur berkurang agar tidak semakin sempit.

Dalam perkembangannya perundingan antara RI dan Belanda menemui jalan buntu. Hal itu bersumber pada perbedaan pendapat mengenai pemerintahan federal sementara. Belanda berpendapat bahwa pemerintah itu harus dipimpin wakil tinggi mahkota Belanda, sedangkan RI berpendirian bahwa pemerintah federal sementara harus bersifat nasional jadi harus terdiri dari orang Indonesia saja.

Perbedaan lain bersumber pada masalah hubungan luar negeri RI dengan negara-negara lain. Belanda menuntut penghapusannya sedangkan RI tetap mempertahankannya.<sup>82</sup>

Untuk mengatasi ketegangan, anggota KTN yaitu Du Bouis wakil dari AS dan Critchley (wakil Australia) pada Juni 1948 membuat suatu nota untuk kedua delegasi berkaitan dengan cara mempercepat pelaksanaan pemilihan untuk menentukan daerah di tiap-tiap negara bagian.<sup>83</sup> Pihak RI sebetulnya bersedia menerima nota tersebut, tetapi pihak Belanda menolak untuk merundingkannya bahkan menuduh wakil

---

<sup>83</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm.74.

AS dan Australia bertindak melampaui wewenangnya, apalagi anggota KTN yang ketiga (Belgia) tidak ikut serta.<sup>84</sup> Hal itu berakibat pada macetnya perundingan diantara kedua belah pihak. Dalam situasi tersebut Belanda justru melakukan blokade ekonomi yang bertentangan dengan persetujuan Renville. Akibatnya RI mengalami defisit dan inflasi.

Kondisi semakin parah ketika kelompok kiri yang bergabung dengan PKI MUSO dan dikepalai oleh bekas Perdana Menteri Amir Sjarifiddin mengadakan perebutan kekuasaan (*Coup d'etat*) di Madiun pada 18 September 1948.<sup>85</sup> Pemberontakan ini semakin memperlemah kedudukan RI khususnya dalam bidang militer.

Mengetahui posisi Indonesia yang sudah semakin lemah Belanda melancarkan agresinya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.

Agresi tersebut dilancarkan oleh Belanda secara mendadak menyerang Yogyakarta sebagai Ibukota RI. Daerah disekitar Maguwo di bom, Belanda juga mendaratkan pasukannya di Yogya dan menduduki kota Yogyakarta. Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa menteri serta tokoh-tokoh politik seperti Sutan Sjahrir, Ki Hajar Dewantara, Natsir, Pamutjak, Mr. Mohamad Roem, Mr. Arsaat dan Mr.A.G. Pringgodigdo, Komodor Surjadarma, Kombes Polisi Soemarto, Prof.Dr. Asikin Widjoyokusuma serta Ali Sastroamidjoyo.<sup>86</sup> Mereka diasingkan ke Bangka dan Prapat. Belanda melaksanakan agresinya dengan tujuan untuk

---

<sup>84</sup> Mohamad Hatta, *Memoir*, Tintamas, Jakarta, 1978, hlm. 527.

<sup>85</sup> Moedjanto, *op. cit*, hlm. 27.

<sup>86</sup> Ali Sastroamidjojo, *op. cit*, hlm. 243-244.



menjatuhkan kota Yogyakarta, diharapkan dengan jatuhnya Yogya sebagai Ibukota RI sekaligus menyingkirkan para pemimpinnya RI akan dengan mudah dilenyapkan.

Rencana Belanda tersebut ternyata meleset karena sebelum pemimpin RI ditawan, Presiden Soekarno sempat mengirimkan radiogram kepada Menteri Kemakmuran Sjarfruddin Prawiranegara yang sedang mengadakan perjalanan di Sumatera. Radiogram tersebut berisi pemberian kekuasaan untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI). Presiden Soekarno juga sudah menyiapkan rencana jika PDRI tidak dapat dilaksanakan. Ia memerintahkan Soedarsono, Palar dan Maramis yang berada di New Delhi untuk membentuk pemerintah Pelarian atau *exile government*.

Pada tanggal 22 Desember 1948 Presiden Soekarno bersama Menteri Luar Negeri H. Agus Salim serta Sutan Sjahrir dipindahkan ke Prapat, sementara Wakil Presiden Hatta, Mr. Asaat, Mr.A.G. Pringgodigdo dan Komodor Suryadarma dipindahkan ke Bangka didaerah Merumbing. Mohamad Roem dan Ali Sastroamidjojo pada 31 Desember 1948 akhirnya menyusul dipindahkan ke Bangka bergabung dengan Mohamad Hatta dan kawan-kawan.<sup>87</sup> Penawanan ini membuat perundingan antara RI-Belanda untuk sementara ditunda.

---

<sup>87</sup> Mohamad Roem, *Tiga Peristiwa Bersedjarah*, Sinar Hudaya, Djakarta, 1972, hlm 49.



### 3. Mohamad Roem sebagai Ketua Delegasi dalam Perundingan Roem-Royen (1949)

Perundingan Roem-Royen yang menghasilkan pernyataan Roem-Royen (7 Mei 1949) merupakan salah satu perundingan penting yang melambungkan nama Mohamad Roem sebagai seorang diplomat ulung Indonesia sekaligus mencatatkan namanya dalam tinta emas dalam sejarah Indonesia. Berbagai peristiwa yang mengawalinya menuntut untuk segera dibukanya kembali perundingan antara Belanda Indonesia. Prinsip-prinsip yang telah dicapai dalam Renville telah dilanggar oleh Belanda. Tidak jarang negara-negara diberbagai kawasan mengecam keras tindakan Belanda tersebut. Tuntutan dari berbagai pihak menuntut Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadakan sidang guna menyelesaikan konflik Indonesia Belanda yang sudah semakin meluas.

Perhatian dunia atas masalah Indonesia tercermin dari diselenggarakannya Konferensi Intern Asia di New Delhi pada 20-23 Januari 1949 atas prakarsa Pandit Jawaharlal Nehru . Konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil Afganistan, Australia, Arab Saudi, Birma, Ethopia, India, Irak, Mesir, Libanon, Pakistan, Piliphina, Sri langka dan Yaman serta RCC, Nepal, Selandia Baru dan Muangthai memiliki acara tunggal yakni agresi Belanda di Indonesia.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Moedjanto, *op.cit*, hlm. 46.

Konferensi Inter Asia ini menghasilkan sebuah resolusi yang segera dikirimkan oleh Nehru ke DK PBB.<sup>89</sup> Resolusi yang dihasilkan tersebut harus dikompromikan dengan DK PBB yang dirumuskan pada 28 Januari 1949 dan menyerukan kedua belah pihak untuk segera melakukan gencatan senjata dan agar tawaran politik RI untuk segera dibebaskan dan mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta. Diantara dua belah pihak yang harus mengadakan perundingan dibawah pengawasan *UNCI (United Nation Commission for Indonesia atau Komisi PBB untuk Indonesia)*. UNCI merupakan pengganti KTN yang kelak akan memprakarsai perundingan dengan wakil-wakil daerah di Indonesia guna membentuk pemerintahan sementara serta menyelenggarakan Pemilu untuk anggota Majelis Konstituante sebelum berdirinya RIS. Selain itu UNCI juga akan memprakarsai bagi penyerahan kedaulatan RIS selambat-lambatnya 1 Juli 1949.

Pihak Belanda menolak usul yang disampaikan dalam konferensi tersebut. Sebagai tidak lanjutnya akhirnya pihak UNCI memberikan ultimatum yaitu berupa pemberian waktu kepada Belanda untuk menarik pasukannya sampai tanggal 15 Februari 1949 dan apabila ultimatum tersebut tidak dipenuhi, maka akan dilaporkan kepada DK PBB.

Mendapat ultimatum dari UNCI Belanda dengan wakilnya Dr. Beel (Wakil Mahkota Kerajaan Belanda untuk Indonesia) mengajukan usul baru. Gagasan Beel tersebut kemudian dikenal dengan "*Rencana Beel*"

---

<sup>89</sup> Mestika Zed, *PDRI Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hlm. 224.

yang mengusulkan mempercepat pengesahan, mengadakan konferensi meja bundar dan membicarakan Uni Indonesia-Belanda.<sup>90</sup>

Tanggal 25 Maret 1949 pihak UNCI (KTN) dibawah pimpinan Merle Cochran mendorong kedua belah pihak agar secepatnya melakukan perundingan. Pada tanggal 2 April 1949 Mohamad Roem mengirimkan surat kepada UNCI yang menyatakan bahwa RI siap mengadakan perundingan dengan Belanda. Pada 12 April 1949, Dr.Van Royen, wakil Belanda di PBB ditunjuk menjadi kedua delegasi Belanda ke pertemuan di Jakarta oleh pemerintahnya tiba di Jakarta.

Pertemuan delegasi RI dan Belanda dimulai dibawah naungan UNCI pada 14 April 1949 bertempat di Hotel des Indes Jakarta.<sup>91</sup> Delegasi RI dipimpin oleh Mohamad Roem sedangkan wakil ketuanya adalah Ali Sastroamidjojo, anggota delegasi terdiri dari 4 orang yaitu Dr.J. Leimena, Ir. Djuanda, Prof.Dr. Soepomo dan Mr. Laturahary, sedangkan penasehat penasehatnya adalah Sutan Sjahrir, Ir. Laoh, Mohammad Natsir, Dr. Darmasetiawan, Wakil Kepala Kepolisian Soenarto, Mr.Dr.A Kusumaatmodjo dan Sekretaris Umum Mr.A.K. Pringgodigdo. Dari pihak Belanda delegasinya diketuai oleh Dr.J.A.Van Royen, sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari Mr. Bloom, Mr.Jacob, Dr.Van der Valde, Dr. Koets, Mr.Van Hoogstraten, Dr. Geiben, Elink Schuurman dan Kolonel Thomson.

---

<sup>90</sup> Ajib Rosidi, *Sjariffudin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, Idayu Press, Jakarta, 1986, hlm. 110.

<sup>91</sup> Lihat lampiran 7 hal. 140.

Seperti halnya perundingan-perundingan sebelumnya, perundingan yang sedianya akan dilakukan ini juga mengalami kemacetan saat baru berjalan satu minggu. Hal itu disebabkan oleh adanya penafsiran Van Royen bahwa pemerintah Belanda akan memulihkan pemerintah dan pemimpin-pemimpin RI hanya sesudah RI memerintahkan kesatuan-kesatuan bersenjata untuk menghentikan gerilya mereka bekerjasama dalam memulihkan perdamaian dan memelihara ketertiban dan keamanan serta bersedia menghadiri KMB.<sup>92</sup>

Pendapat RI sebaliknya, pihak RI tidak mungkin melakukan hal-hal diatas karena pasukan RI berpencar-pencar dan tidak ada kontak satu sama lain. Oleh karena itu pihak RI menuntut pemulihan pemerintahan terlebih dahulu sebelum senjata diadakan.<sup>93</sup>

Hal ini baru dapat diselesaikan setelah Hatta dan Van Royen mengadakan pertemuan atas anjuran Merle Cochran. Keduanya sepakat bahwa kembalinya pemerintah RI pada 25 April 1949 ke Yogya dipandang sebagai langkah rencana menyelenggarakan Revolusi DK-PBB 28 Januari 1949.<sup>94</sup>

Pertemuan tersebut akhirnya berbuah pada kesepakatan pada 7 Mei 1949. Dalam kesempatan ini Mohamad Roem mengawali pembicaraan dengan menyatakan bahwa dirinya sebagai Ketua Delegasi RI diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad

---

<sup>92</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 81.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>94</sup> Mohamad Hatta, *op.cit*, hlm. 548.

Hatta untuk mengatakan kesanggupan mereka pribadi dan memberi jaminan :

- a. Mengeluarkan perintah kepada penganut-penganut republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya;
- b. Kerjasama untuk memulihkan dan mempertahankan ketertiban dan keamanan;
- c. Turut serta dalam KMB dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan rakyat kepada Negara Indonesia Serikat yang penuh dan tanpa syarat.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta berusaha mendesak supaya politik demikian diterima oleh pemerintah RI selekas-lekasnya setelah dipulihkan di Yogyakarta.

Pernyataan Ketua delegasi RI itu disambut oleh Van Royen dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berhubungan dengan keterangan yang diucapkan ketua delegasi Republik. Maka pemerintah Nederland menyetujui mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta dan membentuk panitia-panitia bersama, dibawah pimpinan panitia PBB untuk Indonesia, yang akan membuat aturan-aturan sementara untuk menghentikan perang gerilya dan pemeliharaan hukum dan ketertiban;
- b. Pemerintah Republik harus bebas dan mempunyai kesempatan penuh untuk menjalankan fungsinya di Karisidenan Yogyakarta;



- c. Pihak Belanda akan segera mengakhiri operasi militernya dan membebaskan semua tahanan politik sejak 11 Desember 1948;
- d. Pemerintah Nederland akan menghentikan pembentukan atau pengakuan daerah di wilayah yang dikuasai oleh Republik sebelum tanggal 17 Desember 1948.
- e. Pemerintah Nederland menyetujui adanya Republik sebagai negara bagian dalam negara Indonesia Serikat dengan suara sepertiga dari jumlah suara dalam badan perwakilan federal;
- f. KMB yang diadakan segera sesudah pemerintah Republik dikembalikan ke Yogyakarta akan membicarakan bagaimana mempercepat penyerahan kedaulatan kepada RIS yang benar-benar penuh tanpa syarat sesuai dengan prinsip Renville.
- g. Pemerintah menyetujui bahwa daerah-daerah diluar daerah Yogyakarta, dimana pemerintah sipil dan polisi Republik mesti menjalankan tugasnya, akan tetap berfungsi.<sup>95</sup>

Pernyataan diantara kedua belah pihak ini kemudian dikenal dengan pernyataan "*Roem-Royen atau Roem-Royen Statements*" (lihat lampiran 2 hal. 131).

Banyak reaksi yang muncul atas dikeluarkannya pernyataan ini baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Belanda. Di negara Belanda, pernyataan Van Royen dalam perundingannya dengan Mohamad Roem dianggap sebagai janji kosong yang tidak memberikan keuntungan bagi Belanda. Sementara di Indonesia sendiri, reaksi muncul dari berbagai

---

<sup>95</sup> Mohamad Roem, 1977, *op.cit*, hlm 47-48.

kalangan. Dalam tubuh Masyumi dimana Mohamad Roem ikut didalamnya terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan adanya pro dan kontra terhadap pernyataan Roem-Royen.

Mohamad Roem berpendapat bahwa persetujuan yang dibuat membuka pintu yang lebar bagi Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingannya. Ia menyarankan kepada rekan-rekannya untuk tidak melihat suatu persetujuan sebagai final karena perjuangan belum berakhir, sebab menurut Mohamad Roem perjuangan tidak akan ada yang selesai. Tetapi menuju pada pengakuan dari segenap dunia terhadap eksistensi RI. Menurut Mohamad Roem dengan pengakuan ini RI dapat melanjutkan perjuangan lagi, juga secara internasional kedudukan RI bertambah kuat dibandingkan sebelumnya dan kedudukan yang bertambah kuat inilah yang perlu dimanfaatkan selanjutnya dalam perundingan dengan pihak Belanda.<sup>96</sup>

Beberapa pihak melihat bahwa Mohamad Roem sebagai ketua delegasi RI hanya mendapat mandat dari Soekarno dan Hatta yang tidak mempunyai wewenang lagi karena pada waktu itu mereka bukan lagi sebagai presiden dan wakil presiden. Selain itu mereka juga berada dalam tahanan Belanda. Hendaknya hal ini dirundingkan terlebih dahulu kepada Sjafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI. Disamping itu, perundingan ini terlalu cepat diselesaikan. Dalam hal ini ia lebih suka melihat bila perkembangan-perkembangan pembicaraan disampaikan

---

<sup>96</sup> Deliar Ncer, *op.cit*, hlm. 194.

terlebih dahulu kepada PBB sehingga dengan demikian delegasi dapat mengulur waktu untuk menentukan kedudukan mengingat gerilyawan bertambah kuat didaerah-daerah.<sup>97</sup> Walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam tubuh masyumi, partai ini akhirnya menyetujui pernyataan Roem-Royen pada 28 Mei 1949.<sup>98</sup>

Selain itu perundingan Roem-Royen tersebut juga mendapatkan reaksi baik dari Panglima Besar Jendral Soedirman maupun dari pimpinan PDRI Sjafrudin Prawiranegara. Sebagai bentuk reaksi terhadap perundingan Roem-Royen, Sjafruddin Prawiranegara mengadakan musyawarah besar PDRI yang berlangsung pada tanggal 14-17 Mei 1949 di Sumpur Kudus. Dalam rapat tersebut Sjafruddin Prawiranegara menyesali langkah-langkah diplomatik yang ditempuh oleh Soekarno dan Hatta. Para pemimpin PDRI menyatakan penyesalannya dan menentang perundingan tersebut sebagai konsekuensi atas sikap PDRI Sjafruddin Prawiranegara dalam pertemuan tersebut mendesak keras untuk secepatnya mengembalikan mandat yang dipegangnya kepada Soekarno-Hatta.<sup>99</sup>

Sementara itu Panglima Besar Soedirman mengatakan bahwa sejak semula kurang setuju bila diadakan perundingan kembali antara RI dan Belanda, sebab pada saat itu angkatan bersenjata dan laskar-laskar

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 192.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 194.

<sup>99</sup> Meztika Zed, *op. cit*, hlm. 274.

rakyat yang berjuang secara bergerilya berada pada posisi yang menguntungkan untuk memukul mundur pasukan Belanda.<sup>100</sup>

Soedirman juga merasa tersinggung berkaitan dengan pasal 1 pernyataan Ketua Delegasi RI Mohamad Roem yang menyebutkan kata-kata penganut-penganut politik Republik Indonesia yang bersenjata dalam pernyataan Roem-Royen tersebut.

Kata-kata tersebut menurut Panglima Besar Jendral Soedirman secara terang-terangan telah menyepelkan TNI, dan secara formal penggunaan kata-kata itu seakan-akan tidak mengakui lagi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Untuk itu maka Soedirman meminta Mohamad Roem untuk segera menghubunginya. Mengenai hal itu, walaupun Mohamad Roem sendiri tidak pernah menerima perintah itu dari Sjafruddin Prawiranegara di Sumatra sebagaimana disinggung dalam radiogram tanggal 22 Juni 1949, tetapi Mohamad Roem mengakui kekeliruannya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menyepelkan tentara.<sup>101</sup>

Kelompok yang paling merasa kecewa dengan perundingan tersebut adalah kelompok PDRI dibawah pimpinan Sjafrudin Prawiranegara sangat menyesalkan oleh adanya perundingan tersebut karena dalam perundingan sebelumnya Indonesia selalu dirugikan. Sebagai pimpinan PDRI yang sah memimpin negara pada saat itu, ia

---

<sup>101</sup> Ali Sastroamidjojo, *op.cit*, hlm. 267.

merasa dilangkahi. Menurutnya jika Indonesia mungkin mengadakan perundingan hendaknya hal itu dilakukan oleh pemimpin PDRI bukan kepada Soekarno-Hatta yang sedang berada dalam penawanan.

Melihat kondisi itu maka Hatta bersama rombongannya berangkat ke Aceh pada 5 Juni 1949 untuk menemui Sjafruddin Prawiranegara guna menunjukkan bahwa para pemimpin di Bangka sama sekali tidak mangabaikan PDRI.

Akhirnya pada tanggal 14 Juni 1949 PDRI Sjafruddin Prawiranegara bersedia menerima Pernyataan Roem-Royen dengan syarat:

- a. Angkatan bersenjata Republik harus berada dalam posisi yang saat itu didudukinya.
- b. Angkatan bersenjata Belanda berangsur-angsur ditarik dari posisi yang saat itu didudukinya.
- c. Pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta dilakukan tanpa syarat.
- d. Kedaulatan Republik atas Jawa, Sumatera, Madura dan pulau-pulau sekitar (dekat dengan pantai) harus diakui oleh hegemoni Belanda sejalan dengan persetujuan Linggajati.<sup>102</sup>

Walaupun pada akhirnya PDRI bersedia menerima Pernyataan Roem-Royen, tetapi Mohamad Hatta masih berupaya untuk menemui Sjafruddin Prawiranegara kembali. Ia kemudian mengirimkan suatu

---

<sup>102</sup> Kahin, *op.cit*, hlm. 541



delegasi yang terdiri dari Mohamad Nasir, Dr. Halim, dan Dr.J Leimena menemui Sjafruddin Prawiranegara. Pada tanggal 2-3 Juli 1949 mereka tiba di Padang, sedangkan pada 6-7 Juli 1949 diadakan perundingan antara utusan Mohamad Hatta dan PDRI yang berlangsung di Koto Kociak, Padang Panjang Payakumbuh. Setelah melalui perundingan yang alot dan menegangkan akhirnya Sjafruddin Prawiranegara dengan pertimbangan demi menjaga persatuan dan kesatuan RI bersedia kembali ke Yogyakarta, asalkan tuntutananya dipenuhi oleh pemerintah pusat.

Sebagai realisasi dari perjanjian Roem-Royen pada tanggal 24 Juni 1949 tentara Belanda mulai meninggalkan Yogyakarta dan seluruh tanggungjawab pemerintah dan keamanan di Yogyakarta dipegang oleh HB IX. Hal itu diikuti dengan dibebaskannya Soekarno dan Hatta bersama menteri yang ditawan di Bangka pada tanggal 6 Juli 1949.

Terlepas dari pro dan kontra yang mewarnai dikeluarkannya pernyataannya 7 Mei 1949 bangsa Indonesia tidak dapat menyangkal bahwa perundingan tersebut membawa hikmah bagi pencapaian kedaulatan Indonesia.

Hasil yang didapat melalui perundingan ini diakui telah membawa jalan pada perundingan berikutnya yaitu KMB, yang pada kesempatan itulah pada akhirnya Indonesia memperoleh kedaulatannya.

Apa yang dicapai Mohamad Roem dalam pernyataan itu merupakan puncak perjuangannya dalam bidang diplomatik. Hasil dari karya diplomat tersebut merupakan suatu pernyataan Van Royen dan

Mohamad Roem yang merupakan dokumen bersejarah yang penting bagi kelanjutan tegaknya RI. Dengan demikian dokumen Roem Royen menempati kedudukan yang khas yang dikenal oleh seluruh dunia.<sup>102</sup>

Menanggapi keberhasilan tersebut Mohamad Roem berpendapat :

*"Bukan karena kepintaran saya tetapi adalah rahmat Allah semata-mata. Tuhan mengetahui keinginan rakyat dan bangsa Indonesia sebesar-besarnya hendak merdeka sehingga tidak peduli habis harta benda dan jiwa. Karena itu, pertolongan yang datang, Tuhanlah yang membantu perjuangan kita, karena kita jalankan dengan jujur dan ikhlas."<sup>103</sup>*

Perjuangannya telah membawa Indonesia memperoleh kemenangan dengan memperoleh kedaulatannya.

#### 4. Wakil Ketua Delegasi Indonesia dalam KMB tahun 1949

Tindak lanjut dari pernyataan Roem Royen yang tercapai pada 7 Mei 1949 adalah dilakukannya Konferensi Meja Bundar (KMB). Konferensi itu dilaksanakan pada 23 Januari 1949 di Den Haag. Untuk persiapannya maka pada 24 Juli 1949 dibentuk delegasi RI ke KMB.<sup>104</sup>

Delegasi Indonesia diketuai oleh Mohammad Hatta dan wakilnya adalah Mohamad Roem. Sementara para anggotanya adalah Dr. Soekirman Windjosandjojo, Dr.J.Leimena, Mr.Ali Sastroamidjojo, Mr. Sujono Hadinoto, Kol. TB.Simatupang, Ir.Djuanda, Prof.Mr.Dr.Soepomo dan Dr.Soemitro Djojohadikusomo sebagai delegasi diangkat kurang

<sup>102</sup> Soemarso Soemarsono, *op.cit*, hlm. 154.

<sup>103</sup> ST Rais Alamsja, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Mutiara, Djakarta, 1952, hlm 61.

<sup>104</sup> Lihat lampiran 4 hal. 137.

lebih orang ahli di beberapa bidang antara lain Mr. Moh. Yamin, Dr. Darmasetiawan, Prof. Mr. Sunanto Kolopaking, Mr. Dr. A. Kusumaatmadja, R. Sawaka, R. Suprpto dan R. Soediro.

KMB dilaksanakan pada 23 Agustus-2 November 1949 yang resmi dibuka oleh Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Dress. Delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Van Marseveen, dari UNCI diketuai oleh Merle Cohran dari AS sedangkan delegasi BFO diketuai oleh Sultan Hamid II.

Dalam pelaksanaannya, perundingan diwarnai dengan kesulitan-kesulitan untuk mencapai kata sepakat antara Indonesia dengan Belanda sehingga tidak jarang menimbulkan kemacetan dalam persidangan.<sup>105</sup>

Beberapa hal yang menimbulkan kemacetan berkaitan dengan perumusan bentuk dan isi Uni-Indonesia Belanda. Belanda menuntut agar Uni dikepalai oleh raja negeri Belanda yang dalam pelaksanaannya kepala Uni tidak hanya sebagai lambang belaka seperti halnya yang terjadi pada persemajukan bersama Inggris, melainkan sebagai Kepala Negara Uni dengan wewenang yang mengingatkan kepala seseorang kepala negara konstitusional.<sup>106</sup> Menurut usul Belanda kepala Uni harus dinamakan "Mahkota Uni" yang dipegang oleh Ratu Juliana secara turun temurun.

Tidak tercapainya kesepakatan membuat perundingan mengalami kemacetan. Untuk mengatsi hal itu maka dibentuk panitia kecil yang terdiri dari Van Royen, Mohamad Roem dan Anak Agung Gde Agung.

---

<sup>105</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 93.

<sup>106</sup> *Ibid.*

Dalam pembicaraannya disepakati bahwa Belanda mau membentuk UNI yang dikepalai oleh raja Belanda untuk mengurus kepentingan bersama.

Dalam perkembangannya KMB berhasil mengatur masalah kerjasama militer dan hak milik orang asing dan hak istimewa. Dalam bidang ekonomi bagi bangsa Belanda di Indonesia persoalan yang paling rumit dan berat dalam KMB adalah persoalan yang berkaitan dengan utang piutang dari Irian Barat.

Tetapi Belanda tetap tidak mau melepaskan Irian Barat karena tidak ada kata sepakat, maka ketua delegasi Mohamad Hatta memutuskan untuk menanggukkan persoalan Irian Barat.

KMB diakhiri dengan penandatanganan suatu perjanjian pada 2 November 1949 dan diberi nama Persetujuan KMB yang terdiri dari 2 pokok bagian yaitu induk dan anak persetujuan.<sup>107</sup> Ketentuan yang paling penting adalah Piagam penyerahan kedaulatan yang lengkap tanpa syarat selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949 oleh Belanda kepada RIS kecuali Irian Barat dan RIS terdiri dari RI dan RIS dan 15 negara bagian (daerah) ciptaan Belanda.<sup>108</sup>

Kabinet baru yang ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RIS sesuai hasil KMB adalah kabinet Hatta. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1945 dilakukan upacara penyerahan kedaulatan di Istana Op den Dam Amsterdam Belanda dan Istana Merdeka Jakarta. Upacara penyerahan

---

<sup>107</sup> Lihat lampiran 6 hal. 139.

<sup>108</sup> Mohamad Hatta, *op.cit*, hlm. 556.

kedaulatan kerajaan Belanda dihadiri oleh Ratu Juliana yang berwenang menandatangani Piagam Penyerahan Kedaulatan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta yang disertai beberapa menteri diantaranya Sultan Hamid II. Penyerahan kedaulatan di Jakarta dilakukan oleh wakil kota Belanda di Indonesia yaitu HVK ( Hoge Vertegen Wordigen Van den Kroon ) Lovink kepada wakil RIS yaitu HB IX didampingi Mohamad Roem.

## **B. Perjuangan dalam Bidang Pemerintahan Pasca KMB (1949-1957).**

### **1. Menteri Negara Tanpa Portofolio Dalam Kabinet Hatta (1949-1950)**

Dalam Kabinet Hatta yang dibentuk pada 19 Desember 1949, merupakan satu-satunya kabinet pada masa RIS dimana Mohamad Roem duduk didalamnya sebagai menteri negeri tanpa portofolio.<sup>109</sup> Kabinet Hatta telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan menyelenggarakan penyerahan kedaulatan. Tetapi tugas kabinet ini tidak berhenti sampai disini karena kabinet ini harus bekerja kembali untuk menyelesaikan program-program berikutnya. Tetapi jabatan Mohamad Roem sebagai menteri negara tanpa portofolio tetap disandanginya bahkan ia harus menerima tugas baru yaitu menjadi komisaris agung dinegeri Belanda pada 19 Januari 1950.

Sebagai Komisaris Agung di Belanda yang berkedudukan di Den Haag, Mohamad Roem harus mengalihkan kantor Commissariat Voor Indische Zaken dengan 1500 pegawai yang sebagian besar terdiri dari

---

<sup>109</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 97.



orang-orang Belanda atau orang Indonesia yang berjiwa kolonial. Dari 1500 pegawai, Mohamad Roem berhasil merampingkannya menjadi beberapa ratus saja.<sup>110</sup>

Tugas lain Mohamad Roem adalah mempersiapkan alam pikiran Belanda untuk melepaskan Irian Barat dari penguasaannya. Dalam hal ini Mohamad Roem menyatakan usahanya tidak berhasil.<sup>111</sup> Masalah Irian Barat merupakan masalah yang rumit karena Belanda tidak mau melepaskan Irian Barat ke tangan Indonesia.

Situasi politik Indonesia pada tahun 1950 merubah bentuk negara federal yang berbentuk RIS berubah menjadi NKRI pada 15 Agustus 1950, menyebabkan dipanggil kembalinya Mohamad Roem ke tanah air untuk diberi jabatan baru menteri luar negeri dalam kabinet Natsir yang dibentuk pada 6 September 1950 menggantikan kabinet Hatta III. Kedudukannya di Belanda sebagai Komisaris Agung digantikan oleh wakilnya yaitu Mr.Djamhana.

## **2. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Natsir (1950-1951).**

Dalam kabinet Natsir Mohamad Roem dipercaya untuk mengemban tugas sebagai menteri luar negeri. Jabatan ini baru pertama kali disandangnya setelah dalam kabinet sebelumnya ia menjabat sebagai menteri dalam negeri dan menteri negara tanpa portofolio.

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>111</sup> Soemarso Soemarsono, *op. cit*, hlm. 162.

Sebagai menteri luar negeri, Mohamad Roem harus segera menentukan haluan politik terhadap luar negeri, yang berhaluan politik bebas dan netral.<sup>112</sup> Ia menegaskan bahwa dalam politik tersebut Indonesia harus bebas dari pengaruh-pengaruh dua blok dunia yang sedang dalam keadaan perang dingin yaitu Amerika Serikat dan Uni Sovyet.

Kesempatan menjabat sebagai menteri luar negeri membuat Mohamad Roem sering berkunjung ke luar negeri. Hal itu dimanfaatkannya untuk menjalin hubungan yang baik antara Indonesia dengan negara-negara lain. ia juga berkesempatan menghadiri sidang PBB di Lake Success, setelah Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Saat itu delegasi Indonesia, diketuai oleh Mohamad Roem sedangkan wakil ketuanya adalah L.N. Palar, sementara anggota delegasinya adalah Dr. Darmasetiawan, Mr. Sujono, Prawoto Mangkusasmito, Mr. Sumarang, dan Mr. Tambunan. Dengan kecakapan yang ia miliki Mohamad Roem berhasil memperlihatkan kepada dunia Internasional mengenai eksistensi RI yang diperjuangkan rakyatnya selama ini dalam sidang Pleno PBB.

Selain berkesempatan menghadiri sidang PBB, Mohamad Roem jadi diberi tugas untuk menyelesaikan masalah pengembalian Irian Barat. Tetapi pada kenyataannya Belanda tetap tidak mau melepaskan Irian Barat meskipun Perdana Menteri Natsir pada 22 Desember 1949 telah

---

<sup>112</sup> lin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 106.

menawarkan kepada Belanda bahwa negeri tersebut akan mendapatkan hak-hak luar biasa di Irian Barat dalam bidang ekonomi.<sup>113</sup>

Mohamad Roem menjabat sebagai menteri luar negeri hanya selama 8 bulan saja karena pada 21 maret 1951 kabinet Natsir dinyatakan demisioner. Jatuhnya kabinet ini antara lain disebabkan kegagalan kabinet tersebut pada masalah Irian Barat yang menimbulkan pertentangan antara Perdana Menteri Mohammad Natsir dengan Presiden Soekarno. Tetapi faktor yang paling menentukan adalah pengaturan daerah yaitu yang berkaitan dengan peraturan pemerintah RI No.39 tahun 1950.<sup>114</sup>Parlemen menuntut agar peraturan tersebut dicabut tetapi kabinet tidak menyetujuinya sehingga terpaksa mengundurkan diri.

### **3. Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Wilopo (1952-1953).**

Kabinet Natsir yang jatuh pada 21 Maret 1950 digantikan oleh kabinet Wilopo yang dibentuk pada 30 Maret 1952 dan dilantik pada 3 April 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara PNI, PSI dan Masyumi. Sebagai wakil Masyumi Mohamad Roem kembali menjabat menteri dalam negeri setelah dalam kabinet sebelumnya yaitu kabinet Soekiman ia tidak memegang jabatan apapun dalam pemerintahan.

Dalam kabinet ini Mohamad Roem sebagai menteri dalam negeri mengalami masa sulit karena menghadapi persoalan dalam negeri yang

---

<sup>113</sup> Soeprapto, *op.cit*, hlm. 31.

<sup>114</sup> Moedjanto, *op.cit*, hlm. 81.

cukup berat. Persoalan tersebut mengenai peristiwa Tanjung Morawa yang berkaitan dengan persoalan daerah perkebunan tembakau di Deli Sumatera Utara.

Pada masa penjajahan Belanda daerah tersebut merupakan daerah penghasil tembakau yang cukup terkenal didunia. Para pengusaha tembakau yang bergabung dalam DPV (Deli Planters Vereniging) memiliki 255.000 hektar tanah korsesi sebelum PD II. Ketika pecah PD II dan Jepang masuk ke Indonesia, orang-orang Indonesia ditahan dan beribu-ribu pekerja yang dulu disebut kuli kontrak tidak bekerja seperti biasa. Mereka menduduki tanah-tanah tersebut, tidak dengan mudah untuk diusir.<sup>115</sup>

Ketika persoalan ini mulai diselesaikan pada tahun 1951 oleh menteri dalam negeri Kabinet Soekiman, Mr. Iskak, pemerintah setuju mengembalikan kepada PDV 130.000 hektar dari jumlah semula 255.000 hektar.

Penyelesaian ini dapat dicapai dengan memberikan tanah kepada petani yang menduduki tanah tidak sah, tetapi terpaksa oleh keadaan. Setiap orang mendapat satu hektar bila berupa sawah atau dua hektar bila berupa kebun. Dengan demikian kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan; perkebunan Belanda bisa mendapatkan perkebunan yang cukup, sementara para petani juga mendapatkan tanah dalam hak sah, yang semula belum jelas hak dan hukumnya.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 103.

<sup>116</sup> Soemarso Soemarsono, *op.cit*, hlm. 72.

Tetapi jauh sebelum persetujuan tersebut dilaksanakan sampai memperoleh langkah penyelesaian, kabinet Soekiman jatuh, sehingga terpaksa pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merupakan kabinet yang keempat setelah penyerahan kedaulatan. Pada waktu itu Mohamad Roem yang bertindak sebagai menteri dalam negeri melaksanakan persetujuan tersebut karena kabinet Wilopo telah menyetujuinya meskipun ditentang oleh PKI.

Persetujuan tersebut tetap dijalankan, tetapi dalam pelaksanaannya orang-orang yang tinggal di kampung Tanjung Morawa ternyata menolaknya. Sebagian petani di daerah ini adalah orang-orang keturunan Cina. Pada awalnya mereka bersedia untuk pindah, meski sudah diperingatkan mereka tetap membangkang. Ternyata para petani yang pada umumnya adalah keturunan Cina komunis tersebut terpengaruh oleh hasutan PKI. Mereka secara terang-terangan menolak persetujuan tersebut, sampai kemudian pemerintah daerah mengeluarkan ultimatum dengan memberi batas waktu.<sup>117</sup>

Sampai batas waktu yang diberikan para petani tetap tidak mau mengosongkan tanah, maka pemerintah terpaksa meminta bantuan polisi. Atas perintah gubernur Abdul Hakim pada tanggal 16 Maret 1953, tanah-tanah tersebut harus ditraktor menggunakan alat-alat berat. Tentu saja hal itu mendapat perlawanan dari para petani. Maka terjadilah insiden

---

<sup>117</sup> Momamad Roem, *Kabinet Wilopo sebuah Team : Pengalaman Pribadi dibawah Pimpinan PM Wilopo*, dalam IN. Subagijo, *Wilopo 70 tahun*, Gunung Agung, Jakarta, 1979. hlm. 319.



penembakan yang menewaskan 6 orang, 21 orang terkena sasaran tembakan polisi dan yang lainnya mengalami luka berat dan ringan.<sup>118</sup>

Menurut pendapat Mohamad Roem tindakan pemerintah tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku. Tetapi PKI justru mencemoohnya dengan sebutan “Mohamad Roem traktor maut”. PKI terus berusaha dengan berbagai cara untuk mengangkat masalah ini ke parlemen dengan mengajukan mosi oleh Sidik Kertapati yang mengetuai SAKTI (Serikat Tani Indonesia). Mosi itu menuntut adanya pengetahuan pengosongan tanah yang diberikan PDV sesuai dengan keputusan pemerintah Soekiman. Mereka juga meminta tahanan yang terkait dalam peristiwa ini untuk segera dibebaskan. Tetapi sebelum mosi diputuskan oleh parlemen kabinet Wilopo mengembalikan mandat kepada presiden pada 3 Juli 1953.<sup>119</sup>

Meskipun telah mengembalikan mandat kepada presiden kabinet Wilopo berhasil membuat UU pemilu, yang waktu itu wakil PM Prawoto Mangokusasmito menyerahkan tugas kepada menteri kehakiman Mr. Lukman Wiriadinata dan Mohamad Roem sebagai menteri dalam negeri untuk menyusunnya. Setelah dibicarakan dalam berbagai sidang, akhirnya rancangan Undang-undang PEMILU tersebut disahkan oleh parlemen sebagai UU Pemilu yang pertama tahun 1955.

Didalamnya tercantum sistem pemilu yang didasarkan pada sistem demokrasi dan sistem kepartaian seimbang. Didalamnya juga terdapat

---

<sup>118</sup> H. Mohamad Said, *Wilopo dan Tanjung Morawa*, dalam *Ibid*, hlm. 337.

<sup>119</sup> Suprpto, *op.cit*, hlm. 149.

kebebasan mencalonkan diri seluas-luasnya kepada partai maupun golongan maupun perkumpulan yaitu segolongan orang yang bergabung untuk mencalonkan seorang calon/lebih. Hak pilih dan hak dipilih sebagai hak asasi diakui dan dilaksanakan dengan sebesar-besarnya dengan rules of the game yang dihormati oleh semua golongan dan dilindungi oleh orang yang berkuasa secara adil. Siapa saja dengan syarat minimal boleh memajukan diri sebagai calon, sendiri atau rombongan, tidak perlu mendirikan partai, golongan atau organisasi terlebih dahulu.<sup>120</sup>

Dari hasil pemilu tersebut muncul 4 partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI. Meskipun keberhasilan pelaksanaannya terjadi dalam kabinet Baharuddin Harahap tetapi kabinet Wilopo juga turut menunjang keberhasilan tersebut dengan mengesahkan UU pemilu 1955.

#### **4. Wakil PM I dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957).**

Mohamad Roem kembali berkiprah dalam pemerintahan baru setelah kabinet Wilopo jatuh. Kabinet yang baru dibentuk tersebut adalah kabinet Ali Sastroamidjojo II periode 24 Maret 1956-9 April 1957. Perlu diketahui bahwa kabinet ini merupakan kabinet pertama dan terakhir yang pembentukannya diselenggarakan di Indonesia atas imbalan kekuatan dalam parlemen hasil pemilu yang diselenggarakan di Indonesia era demokrasi parlementer.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Mohamad Roem, *Tinjauan Pemilu I dan II dari Sudut Hukum*, Hidayana Dokumenta, Djakarta, 1971, hlm. 6.

<sup>121</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 108.

Melihat kemampuan Mohamad Roem yang sudah tidak diragukan lagi maka Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo segera menunjuk Mohamad Roem sebagai wakilnya.

Beberapa persoalan muncul diawal jabatannya sebagai wakil perdana menteri, dari masalah dalam negeri yang menyangkut perubahan personalia pemerintah, pemilihan gubernur bank, tuduhan korupsi menlu Roeslan Abdulgani sampai pada masalah kericuhan di tubuh ABRI. Meskipun demikian ia tetap memberikan masukan-masukan yang berarti bagi penyelesaian masalah itu, termasuk ketika penunjukan gubernur bank. Ia mencalonkan Sjafruddin Prawiranegara untuk menduduki jabatan itu dan pada akhirnya memang Sjarifuddinlah yang terpilih menjadi gubernur bank.

Dalam masalah isu korupsi Roeslan Abdulgani Mohamad Roem ditunjuk sebagai ketua panitia adhoc guna menangani isu tersebut. Roeslan Aabdulgani dituduh terlibat korupsi bersama Lie Han Thay, campur tangan KSAD (Kepala Staf AD) Jendral A.H. Nasution dengan Kolonel Lubis justru semakin memperkeruh suasana, karena Kolonel Lubis tidak suka dengan KSAD Nasution. Setelah melalui beberapa tahap pemeriksaan dokumen-dokumen terhadap Roeslan Abdulgani panitia berkesimpulan bahwa tidak ada tindakan korupsi terhadap diri Roeslan Abdulgani.

Selain masalah-masalah tersebut diatas kabinet ini juga menghadapi persoalan yang cukup sulit yaitu terjadinya pergolakan diberbagai daerah seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Permesta di Sulawesi dan lain-

lain. Persoalan ini segera mendapat kritikan dari Masyumi yang ditindaklanjuti dengan menarik menteri-menterinya dalam kabinet. Tak lama kemudian kabinet jatuh dan mengembalikan mandat kepada presiden Soekarno pada 14 Maret 1957 dan diganti dengan kabinet Djuanda. Tetapi dalam kabinet ini Mohamad Roem tidak mendapat kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan. Ia kemudian lebih memfokuskan kegiatannya pada bidang sosial-keagamaan.

### **C. Perjuangan dalam Bidang Sosial-Keagamaan.**

Setelah tidak menjabat apapun dalam kabinet Djuanda, Roem lebih memfokuskan kegiatannya pada bidang sosial-keagamaan. Dengan kepekaan sosial yang kuat serta modal agama yang ia miliki ia berusaha menyumbangkan segala kemampuannya untuk kegiatan kemanusiaan.

Sejak masih aktif dalam pemerintahan sebenarnya Ia sudah sering terlibat dalam kegiatan yang bersifat sosial keagamaan. Kegiatan diwujudkan dalam keikutsertaannya dalam Conference for Moslem and Christian Cooperation pada Februari 1955 di Iskandariyah, Mesir. Konferensi ini merupakan konferensi antar agama yang dihadiri oleh wakil-wakil agama baik Islam, Katholik, Kristen maupun beberapa sekte. Kemudian pada tahun yang sama, atas undangan Yayasan Townhall Foundation di New York, bersama undangan lainnya dari Asia dan Middle East Towahal Mission untuk melakukan safari muhibah ke Amerika



Serikat guna memperkenalkan negara dan bangsa Asia dan Timur Tengah kepada Amerika Serikat. Tak jarang Ia diundang sebagai penceramah di berbagai tempat di Amerika Serikat.

Dalam urusan dalam negeri, ia lebih banyak menggunakan ilmu hukum yang diperolehnya guna membela teman seperjuangannya yang terkena masalah. Saat itu Mohamad Roem diminta untuk menjadi pembela atas kasus keterlibatan Kasman Singodimedjo dengan organisasi PRRI di Sumatera. Terkait dengan hal itu Mohamad Roem bersama anggota yang lain seperti Datuk Singo Mangkuto, Aisjah Amini, Dalyono, Ny. Maduretno Haznam dan lain-lain ikut menjadi pembela Kasman dalam pengadilan. Tetapi putusan hakim tetap tidak dapat ditolak. Kasman dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, potong masa tahanan 2 tahun.

Selain perkara Kasman Singodimedjo, Mohamad Roem juga ditunjuk sebagai penuntut oleh Prawoto Mangkusasmito atas perkara pembubaran Masyumi. Meski telah dilayangkan surat gugatannya kepada ketua pengadilan Moh. Roehjani Soe'od pada 11 Oktober 1960, Pengadilan Negeri Istimewa tetap menyatakan tidak berwenang menangani masalah tersebut. Karena tidak puas maka Mohamad Roem naik banding. Belum sampai masalah tersebut disidangkan kembali Ia terlanjur ditangkap sebagai tahanan politik selama 4 tahun 4 bulan di Madiun.

Setelah dibebaskan pada masa pemerintahan orde baru ia lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada masalah pendidikan dan ilmu



paling baik dimana pelaksanaan KB hendaknya dilakukan dengan menanamkan pengertian bukan paksaan. Rakyat akan mampu menjalankan KB jika telah mengerti dan memahami apa itu KB.

Dalam bidang keagamaan ia aktif berceramah dan konferensi-konferensi yang ia hadiri di Luar Negeri. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Eksekutif dalam Mukhtamar Alam Islamy untuk menganti kedudukan dalam Abdul Kalam Mutakin. Ia menghadiri Mu'tamar tersebut pada tahun 1973 di Mira Saudi Arabia. Pada tahun 1977 ia juga berkesempatan untuk mengikuti konferensi internasional mengenai agama dan perdamaian di Arab Saudi atau ACRP (*Asian Conference of Religion for Peace*). Dalam konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai agama yang berasal dari berbagai negara di dunia. Mohamad Roem ditunjuk sebagai wakil Indonesia dalam konferensi tersebut.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Lihat lampiran 8 hal.141.

**BAB IV**

**PENGABDIAN MOHAMAD ROEM KEPADA BANGSA INDONESIA**

**A. Pengabdian sebagai Seorang Pejuang dan Perunding.**

Dalam perjuangan penegakan kemerdekaan Indonesia, perjuangan diplomasi mempunyai peran yang sangat besar. Kemerdekaan dan kedaulatan penuh yang berhasil diraih tidak hanya dicapai melalui pertempuran fisik saja tetapi juga dicapai melalui jalur perundingan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan diplomasi memberikan andil besar bagi tetap tegaknya negara Indonesia, sekaligus memperoleh kedaulatan penuh dari Belanda. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa diplomasi adalah ujung tombak perjuangan RI.

Tanpa adanya jerih payah serta perjuangan para pejuang, kemerdekaan tidak akan diraih, tetapi kedaulatan penuh juga tidak akan diraih tanpa ada kegigihan para diplomat dalam berunding. Ketika pertempuran fisik tidak mampu menyelesaikan masalah, perundingan menjadi satu-satunya alternatif pemecah masalah. Perang tidak akan berakhir sebelum ada pemenangnya, tetapi dengan berunding kesepakatan masih bisa didapat. perjuangan diplomasi menjadi penting ketika Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa apakah Indonesia akan melanjutkan perjuangan fisik- dengan resiko kedaulatan penuh masih harus diperjuangkan sampai masa yang belum bisa ditentukan- atau bersedia berunding dengan segala kemungkinan yang tersedia. Saat itu kondisi semakin sulit karena setelah Yogyakarta jatuh praktis

tidak ada lagi kekuasaan efektif lain bagi RI kecuali PDRI di Sumatera Barat dan Aceh yang tidak lagi dikuasai Belanda.

Melihat situasi yang demikian sulit maka para pemimpin RI berusaha mencari celah agar pihak Belanda bersedia diajak berunding. Mohamad Roem adalah salah satu tokoh dibalik perundingan-perundingan tersebut. Perannya dalam dunia diplomasi tidak dapat kita abaikan begitu saja. Ketika kekuasaan RI sudah semakin tergerogoti, ia tampil menjadi salah satu anggota delegasi dalam Perjanjian Linggajati meskipun Masyumi, partainya sendiri menolak perjanjian tersebut. Hal itu justru membuktikan bahwa sesungguhnya ia adalah seorang pejuang sejati yang lebih mengutamakan kepentingan bangsanya daripada kepentingan partainya. Roem sadar tidak akan mudah baginya menghadapi situasi dimana ia dihadapkan pada kenyataan bahwa partainya sendiri akan menentangnya bahkan akan menganggap ia tidak loyal terhadap partainya. Tetapi hal itu ia abaikan karena keinginannya yang kuat akan kedaulatan bangsanya telah mampu membangun semangat nasionalismenya untuk ikut berjuang dalam meja perundingan.

Roem mempunyai bakat besar untuk menjadi seorang pejuang sekaligus perunding. Sebagai seorang pribadi ia adalah seorang yang cerdas, ulet dan sabar. Kepribadiannya itulah yang kemudian menjadi salah satu bekalnya untuk berjuang untuk berjuang. Bahkan karena kesabarannya itulah yang sering membuat lawan rundingnya mudah naik darah. Dalam menghadapi lawan dimeja perundingan ia memang cenderung diam dan sangat hati-hati. Ketika para diplomat Belanda sedang mengemukakan

pendapatnya ia justru diam tanpa memberikan reaksi apapun baik sanggahan, kritikan maupun tanggapan. Hal itu justru dimanfaatkannya untuk berpikir mencari akal guna mematahkan pendapat Belanda dan berusaha segala usul, pendapat dari pihak RI bisa diterima oleh Belanda. Ia menunggu diplomat Belanda mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu baru kemudian ia akan berkomentar. Sebagai salah satu anggota delegasi ia dinilai sebagai seorang kritikus yang tidak disukai oleh Belanda karena kritiknya yang keras, tajam dan cenderung santai dalam menghadapi Belanda.

Sebagai seorang pribadi ia mempunyai semangat juang tinggi dalam berjuang. Disamping sifat sebagai pejuang tersebut, juga menonjol kemampuannya untuk tampil sebagai pemimpin yang mencita-citakan persatuan bangsanya dan menuntunnya melalui jalan bermusyawarah tanpa mengorbankan prinsip pendiriannya. Maka selain sebagai seorang pejuang, Mohamad Roem juga tampil sebagai seorang perunding (diplomat) yang memperoleh kesempatan emas dalam sejarah kehidupannya untuk mengembangkan kemampuannya tersebut dengan sebaik-baiknya.

Selain karena faktor pengalaman pendidikan, ada satu faktor lagi yang ikut mendukung kemampuannya yaitu keyakinan yang mendalam akan kebenaran ajaran agama Islam yang dipeluknya. Islam dijadikannya dasar dalam segala hal, sebab faktor demokrasi dan hak asasi manusia dalam Islam dijunjung tinggi mengingat Islam sendiri memandang kedudukan manusia dihadapan Allah SWT adalah sama, yang membedakan adalah ketaqwaan kepada Allah STW. Dengan berlandaskan keimanan yang kuat, Mohamad

Roem sangat gigih mempertahankan segala sesuatu yang dianggap benar dan adil. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang benar dan adil bila diperjuangkan dengan gigih, cepat atau lambat akan memperoleh kemenangan.<sup>126</sup>

Mohamad Roem adalah seorang muslim sejati. Sebagai seorang muslim, Roem mempunyai komitmen pribadi kepada ajaran Islam serta sikap kemasyarakatannya terjadi disertai pemahaman yang tepat kepada prinsip-prinsip umum ajaran agamanya itu.<sup>127</sup> Ia layak disebut sebagai seorang pengabdikan karena pengabdian yang besar kepada bangsa dan negaranya. Sebagai seorang abdi negara ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik yang ia bisa tanpa mempertimbangkan keuntungan apapun. Seseorang yang menjadikan segala usahanya bertumpu pada apa yang diperintahkan kepadanya, tidak akan mengisi waktunya dengan sia-sia, tidak untuk memperebutkan kursi kebanggaan dan juga tidak untuk memperbanyak harta demi kemegahan.<sup>128</sup>

Menurut Quraish Shihab, "Seorang abdi tidak menganggap apa yang berada dibawah genggaman tangan atau wewenangnya sebagai milik pribadi karena seorang abdi tidak memiliki sesuatu. Dirinyapun adalah milik tuannya. Seorang abdi juga menjadikan segala aktifitasnya berkisar pada apa yang diperintahkan atau menjauhi apa yang dilarang oleh tuannya. Selain itu juga bahwa seorang abdi tidak memastikan sesuatupun kecuali setelah ada ijin dari

<sup>126</sup> Iin Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm.59.

<sup>127</sup> Nurcholis Madjid, dalam *Surat-surat Politik Nurcholis Madjid-Mohamad Roem : Tidak ada Negara Islam*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 59.

<sup>128</sup> Quraish Shihab, *Ibid*.



yang diabdikan. Dan kepada siapapun ia mengabdikan, baik kepada Tuhan, negara maupun seorang manusia ketika persyaratan tersebut harus terpenuhi demi kesempurnaan pengabdian.” Mohamad Roem telah memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Sebagai seorang pengabdikan, Roem secara ikhlas mengabdikan dirinya tanpa menginginkan imbalan apapun karena yang ia inginkan semata hanya kemerdekaan dan kedaulatan secara penuh dari Belanda.

Sekalipun Mohamad Roem dalam sejarahnya menduduki jabatan sebagai negarawan, diplomat dan politikus, tetapi ia adalah seorang yang tidak mengutamakan kedudukan tetap baginya yang terpenting adalah pengalaman dari kedudukan tersebut. Mohamad Roem bukan seorang filsuf dan juga bukan seorang pemikir serta kyai atau ustadz, tetapi ia mempelajari teori kenegaraan, agama Islam dan mempelajari ilmu politik tidak untuk menjadi orang kenamaan serta mencari kekuasaan atau menjadi kyai, melainkan semuanya itu dipelajari serta dihayati untuk diamalkan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu amal baktinya itulah ia menjadi orang yang terkenal dan mendapat kedudukan.<sup>129</sup>

Sejak kecil ayahnya menaruh perhatian besar kepada dirinya. Ayahnya ingin ia kelak menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Pada akhirnya keinginan itu terwujud karena Mohamad Roem berhasil menjadi seorang pejuang sejati yang secara ikhlas mampu memberikan sesuatu yang berguna bagi negara dan bangsanya. Parakan dan Pekalongan

---

<sup>129</sup> Subadio Sastrosatomo, dalam *Soemarso Soemarsono. Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 268.

sebagai tempat dimana ia lahir dan berkembang telah memberikan banyak pelajaran baginya. Ia memperoleh pendidikan agamanya untuk pertama kali di desa Klewogan, desa tempat ia lahir. Pak Wongso, guru mengajinya sewaktu masih tinggal di Parakan memberikan kesan tersendiri baginya. Keteguhan agamanya yang sampai akhir hayatnya ia anut adalah berkata pelajaran yang ia terima dari Pak Wongso. Kemudian ketika ia pindah ke Pekalongan ajaran agamanya semakin diperdalamnya berkat pengaruh dari keluarga kakaknya yang merupakan keluarga muslim sejati.

Pak Wongso sebagai seorang kyai memngingatkan kepada sutau hal bahwa Parakan sebagai tempat lahir Mohamad Roem merupakan kota santri, dimana ditempat inilah kyai Parak sebagai cikal bakal lahirnya kota Parakan memberikan andil yang besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kyai Parak dengan sabar memberikan berbagai pelajaran dan ilmunya serta berbagai jimat yang berupa *ketapel*, *sujen sakti*, *tongkat bambu runcing*, dan *penthung kayu* kepada para pejuang yang pada umumnya adalah para santri. Kyai ini dengan caranya sendiri mampu membangkitkan semangat berjuang para pejuang dalam menghadapi Belanda. Mereka itulah yang kemudian gugur sebagai Syuhada bangsa yang kelak akan menjadi penghuni surga.

Demikian pula halnya dengan Pak Roem, yang juga harus ikut langsung merasakan panasnya pelor tentara Belanda, tetapi tentu Pak Roem menempuh jalan dengan menggunakan cara yang berbeda dari kyai Parak tersebut. Ketapel digantinya dengan wawasan politik nasional yang jauh kedepan, tongkat bambu kuning ditukarnya dengan ketabahan berunding,

sujen sakti diubahnya menjadi keunggulan dalam beragumentasi, penthung kayu berjimat baginya ialah kemantapannya yang tak tergoyahkan kepada diri sendiri dan pedang samurai seolah lambang ketangkasan lisannya menghadapi diplomat musuh. Dengan senjata itu ditangan, Pak Roem berperan sebagai peletak salah satu tiang pancang RI yang paling kokoh.<sup>130</sup>

Untuk itu tidak berlebihan jika nama Pak Roem seharusnya diletakkan sejajar pada urutan ketiga setelah Bung Karno dan Bung Hatta. Sebab dalam pertumbuhan Republik peristiwa penting apalah kiranya yang lebih penting dari Proklamasi dan Perundingan Roem-Royen yang mengawali KMB yang kemudian menghasilkan Pernyataan Kedaulatan Resmi. Apalagi jika diingat pada waktu itu wilayah RI hanya meliputi beberapa Karisidenan di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebelah selatan. Dalam keadaan Republik yang ibarat kepepet ke tembok tanpa ruang gerakan sedikitpun itu, Pak Roem maju ke depan dengan ketapel, tongkat, penthung, sujen dan pedang samurai diplomasinya dan Pak Roem berhasil gemilang. Dan secara tiba-tiba wilayah RI yang semula ibarat hanya selebar daun kelor itu kemudian mekar meliputi seluruh tanah air. Setelah sekian tahun rakyat di desa dan di kota yang semula diliputi rasa ketakutan karena suasana perang kini menjadi lebih aman dan bebas.

Pak Roem tidak saja hanya menghentikan permusuhan tetapi juga akhirnya menghasilkan pengakuan kedaulatan secara resmi dari pihak Belanda kepada Republik. Berdirinya Republik ini adalah bukti pengabdianya kepada

---

<sup>130</sup> Nurcholis Madjid, "In Memoriam : Pak Roem", dalam *Panji Masyarakat*, No. 410, tahun XXV, 11 Oktober 1983.

bangsa Indonesia. Pak Roem memang tidak sendirian dalam mewujudkannya tetap dapat dikatakan bahwa tanpa tuah diplomasi Pak Roem mungkin perkembangan Indonesia tidak selancar seperti sekarang.

Jika kyai berarti orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam akan faham ajaran agama Islam. Maka, Pak Roem harus disebut demikian, meski kekyaiannya tidak bisa diukur dengan standar-standar konvensional. Tetapi dengan ukuran yang lebih fundamental tentang keberhasilannya menangkap makna-makna dasar ajaran Islam dan pemfungsionalan fahamnya dalam kehidupan sehari-hari, pribadi maupun sosial. Ini tercermin dalam tema-tema perjuangan Pak Roem yang kesemuanya itu berkisar pada dambaan akan nilai-nilai luhur individual dan sosial seperti kesalihan pribadi, patriotisme, kejujuran, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, keadilan sosial dan hak asasi manusia dan lain-lain.<sup>131</sup>

Sebagai wujud pengorbanannya, Pak Roem pernah mengalami peristiwa penembakan terhadap dirinya oleh tentara NICA. Akibat peristiwa tersebut, luka tembak pada kakinya membuat ia menjadi pincang dan harus menggunakan tongkat. Peristiwa penembakan tersebut terjadi pada November 1945 di rumah Pak Roem sendiri. Tentara NICA secara tiba-tiba masuk kedalam rumah Pak Roem yang disangka menyimpan senjata. Pak Roem yang saat itu bersembunyi didalam kamar terkena tembakan ketika hendak membuka pintu kamar. Peluru mengenai bagian bawah perut kesamping kanan belakang antara paha dan pantat. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

untuk mendapat perawatan. Pak Roem dirawat selama 70 hari, kemudian demi proses penyembuhan Pak Roem dibawa kerumah Dokter Gularso di Kebumen. Disana Pak Roem dirawat selama 7 bulan. Walau akhirnya sembuh tetapi kaki kanannya menjadi pincang. Dengan kaki pincang inilah ia memulai debutnya dalam pemerintahan Indonesia antara tahun 1946-1957, serta berkecimpung dalam partai Masyumi antara tahun 1960-1968. Ia tetap ikhlas menjalaninya hari-harinya dengan kondisi fisik seperti itu demi terus berjuang dan mengabdikan dirinya kepada Indonesia.

Dalam pemerintahan ia mampu menjabat beberapa posisi penting. Jabatan itu tidak membuatnya merasa bahwa ia adalah seorang negarawan besar. Pak Roem tetap merasa bahwa ia adalah seorang yang semata hanya ingin memberikan yang terbaik yang ia bisa kepada bangsa dan negaranya. Jika ia bukanlah seorang pengabdian, yang ingin mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negaranya., tentunya ia tidak akan mau menerima jabatan apapun yang diberikan kepadanya, termasuk ketika ia ditunjuk sebagai salah satu anggota delagasi RI dalam perundingan dengan Belanda. Kiprahnya dalam organisasi, pemerintahan dan berbagai perundingan dari tahun 1924 sampai akhir hayatnya tahun 1983 telah menjadi bukti bahwa ia layak disebut sebagai seorang pejuang dan pengabdian.

## **B. Pengabdian di Hari Tua.**

Jabatan Mohamad Roem sebagai wakil perdana menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II menjadi jabatan terakhirnya dalam pemerintahan. Pada



pemerintahan berikutnya ia tidak mendapat kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan. Tetapi hal itu tidak membuat perjuangan dan pengabdianya berhenti sampai di situ. Waktunya ia manfaatkan dengan baik untuk mengerjakan sesuatu yang berguna. Pak Roem justru lebih leluasa dalam memanfaatkan dan mengisi waktunya meski ia tidak lagi duduk dalam pemerintahan.

Ketika tidak lagi aktif dalam pemerintahan, Pak Roem kembali menekuni profesinya sebagai pengacara. Ia tidak menyia-nyiakan pengetahuannya sebagai pengacara sewaktu menempuh pendidikan di RHS. Pada waktu ia masih aktif dalam pemerintahan ia telah membuka sebuah kantor pengacara dengan namanya sendiri. Tidak jarang ia diberi kesempatan untuk membela perkara orang lain yang pada umumnya perkara yang ditanganinya adalah menyangkut tanah partikelir dan sikap tuan tanah yang sewenang-wenang terhadap bawahannya.

Pak Roem pernah menjadi pembela rekannya, Kasman Singodimedjo, yang pada saat itu sedang menghadapi tuntutan sehubungan dengan gerakan PRRI di Sumatera. Kasman dituduh telah memberi bantuan kepada musuh, yaitu pemimpin PRRI Sumatera melalui pidatonya di Bioskop Roxy Magelang.<sup>132</sup> Menurut Kasman, pidato yang dilakukannya pada tanggal 31 Agustus 1958 di Bioskop Roxy, Magelang tidak ditujukan kepada para pemimpin PRRI tetapi pidato sebagaimana seorang pemimpin seperti yang

---

<sup>132</sup> Mohamad Roem, *Diplomasi*, *op. cit.*, hlm. 103.

biasa dilakukannya, karena pidato tersebut berisi tentang wejangan dan sajak-sajak Ronggowarsito.<sup>133</sup>

Sehubungan dengan pidatonya tersebut, pada tanggal 5 Desember 1958, Kasman Singodimedjo ditahan dirumah tahanan militer Jakarta. Kemudian pada tahun 1960 perkaranya mulai disidangkan di Pengadilan Magelang. Dalam perkara ini, Mohamad Roem diminta menjadi salah satu seorang pembelanya. Ketika sidang mulai dilaksanakan, tujuh orang pembela Kasman yaitu, Mohamad Roem, Datuk Singomakuto, Dalyono, Sudjono Hardjosudiro, Ny. Maduretno Haznam, Iman Suhadi dan Aisjah Amini, secara bergantian membacakan pembelaan mereka yang mencapai rekor 12 jam 20 menit. Tetapi usaha mereka untuk membela Kasman gagal karena hakim tetap memutuskan Kasman bersalah dan menjatuhkan hukuman kepada Kasman selama 3 tahun penjara dengan potong masa tahanan 2 tahun.

Sewaktu masalah Kasman belum tuntas, terdapat tugas baru yang diberikan kepada Mohamad Roem dari Prawoto Mangkusasmito sehubungan dengan pembubaran Masyumi, yang kemudian dituangkan kedalam Kepres No.2 tahun 1960. Melalui Mohamad Roem. Prawoto Mangkusasmito mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Tuntutannya yang diajukan dalam surat gugatan yang ditulis oleh Mohamad Roem pada intinya berisi mengenai Penetapan Presiden No.7 tahun 1957 dan PP No.13 tahun 1960 tentang pembubaran Partai Masyumi adalah cacat hukum.

---

<sup>133</sup> In Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 112.

Gugatan diajukan oleh Mohamad Roem pada tanggal 9 Agustus 1960. Pada waktu itu Prawoto sebagai penggugat masih berstatus sebagai anggota Masyumi. Kemudian sehari sebelum Masyumi dibubarkan tepatnya tanggal 12 September 1960, terjadi perubahan surat kuasa, yang semula Prawoto Mangkusasmito sebagai Ketua Masyumi berubah menjadi Prawoto Mangkusasmito selaku warga negara Indonesia, sebab Partai Masyumi dinyatakan bubar pada 13 September 1960.<sup>134</sup>

Sehubungan dengan pembubaran Masyumi Presiden Soekarno mengatakan bahwa Masyumi merupakan partai yang tidak sejalan dengan pemerintah. Maka ketika Mohamad Roem menggugat kesalahan pemerintah akan pembubaran Masyumi, Pengadilan Negeri Istimewa melalui ketuanya Moh. Rochjani pada 11 September 1960, mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Istimewa merasa tidak berwenang untuk menangani masalah tersebut karena menyangkut keputusan politik tertinggi. Mohamad Roem kemudian naik banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Tetapi sebelum ia menyelesaikan kasusnya membela Kasman maupun mengenai pembubaran Masyumi, ia terlanjur ditangkap dan dipenjara sebagai tahanan politik pada tanggal 16 Januari. Ia dipenjara selama 4 tahun 4 bulan di Madiun.

Pak Roem mengatakan bahwa penahanan terhadap dirinya dihubungkan dengan peristiwa Cenderawasih, yaitu tentang percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno saat berkunjung ke Makasar. Ia mengatakan bahwa sedikitpun dirinya tidak terlibat dalam peristiwa tersebut

---

<sup>134</sup> In Nur Insaniwati, *op.cit*, hlm. 112.

dan tidak menyangka bahwa dirinya akan ditangkap. Meskipun ia dinyatakan bersalah terhadap kesalahan yang tidak ia lakukan, ia tetap menerima dengan ikhlas dan lapang dada kenyataan bahwa ia harus dipenjara, berpisah dari keluarganya untuk waktu yang cukup lama. Sekali lagi hal itu membuktikan bahwa sebenarnya ia adalah seorang pejuang sejati.

Setelah menjalani hukuman selama 4 tahun 4 bulan di Madiun, ia kemudian dibebaskan pada pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966. Para pemimpin Masyumi menaruh harapan besar kepada pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto agar segera memperbaharui nama Masyumi yang dianggap sebagai parta terlarang. Dalam kurun waktu yang sama pemerintah juga mengizinkan Partai Murba yang semula dibubarkan untuk hidup kembali. Hal itu semakin memunculkan rasa optimisme para pemimpin Masyumi dalam usahanya merehabilitasi nama Masyumi.

Namun harapan tersebut tidak menjadi kenyataan, sebab tanggal 21 Desember 1966, rapat Panglima-panglima daerah ABRI mengeluarkan pernyataan yang isinya antara lain menyebutkan bahwa Masyumi senafas dengan PKI sebagai partai yang menyeleweng dari UUD 1945.<sup>135</sup> Tentu saja para pemimpin Masyumi menolak pernyataan tersebut. Prawoto Mangkusasmito, yang bertindak sebagai ketua Masyumi yang terpilih dalam Mukhtamar Masyumi yang terakhir di Yogyakarta tahun 1955, mengatakan bahwa Masyumi senantiasa berusaha menjunjung konstitusi, sedangkan PKI senantiasa melawann UUD. Prawoto kemudian mengirim surat kepada Jendral

---

<sup>135</sup> Soemarso Soemarsono, *op.cit*, hlm.98.

Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera, mohon kesempatan untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Jendral Soeharto membalas permohonan tersebut dengan mengirim surat pada tanggal 6 Januari 1967. Didalamnya ia menegaskan bahwa ia tidak akan mengabulkan usaha rehabilitasi Masyumi yang didasarkan pada Ketentuan Presiden No.7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No.13 tahun 1960 tentang pembubaran Masyumi. Akhirnya disimpulkan bahwa karena alasan yuridis, ketatanegaraan dan psikologis telah membawa ABRI pada satu pendirian, bahwa ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi Masyumi.

Terhalangnya usaha rehabilitasi Masyumi, mendorong para pendukung partai tersebut untuk menempuh jalan baru berupa ikhtiar untuk mendirikan partai baru. Maka dibentuklah partai Islam baru dengan nama Partai Muslimin Indonesia dengan Ketua Umum Djarwani Hadikusumo, yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 7 tanggal 20 Februari 1968. Beberapa tokoh Masyumi yang tergabung didalamnya dianggap telah membentuk partai Masyumi dengan wajah baru. Tetapi hal itu disanggah oleh para pemimpin Masyumi. Mereka mengatakan bahwa partai Islam yang baru dibentuk tersebut tidak ada hubungan apapun dengan Masyumi.

Partai Muslimin Indonesia kemudian mengadakan Mukhtamar pada tanggal 2-7 November 1968 di Malang. Dalam Mukhtamar tersebut Mohamad Roem terpilih menjadi ketuanya secara aklamasi. Namun ia tidak pernah bisa melaksanakan tugasnya sebagai ketua partai karena dalam sidang kabinet yang berlangsung tanggal 20 November 1968, beberapa hari setelah mukhtamar,



Presiden Soeharto menegaskan bahwa berdirinya Partai Muslimin Indonesia bukan berarti rehabilitasi Masyumi. Sedangkan pembentukan PMI semata hanya menampung ormas-ormas Islam yang belum mempunyai wadah.<sup>136</sup> Akibatnya kepemimpinan Mohamad Roem praktis tidak berjalan. Inilah akhir dari perjalanan karier politik Mohamad Roem. Tetapi meskipun demikian bukan berarti akhir dari perjalanan hidupnya.

Setelah istirahat dari aktivitas politik, Mohamad Roem lebih banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masalah sosial, pendidikan dan keagamaan. Kegiatan tersebut ia wujudkan pada penulisan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan RI, ceramah diberbagai tempat, menulis diberbagai surat kabar dan menerbitkan buku. Tokoh yang namanya diasosiasikan dengan suatu peristiwa bersejarah dalam waktu yang lalu, kadang-kadang merasakan adanya semacam beban dalam mengisi hidup mereka secara bermakna dan kreatif. Mereka itu seakan-akan diharapkan untuk menghabiskan waktunya sebagai sejenis monumen saja. Pak Roem nampaknya telah berhasil untuk membebaskan dirinya dari beban seperti itu. Diantara kegiatan yang kreatif dan bermakna yang dilakukannya adalah memberikan sumbangan dalam penulisan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menulis karangan, cermah yang berhubungan dengan sejarah tersebut.<sup>137</sup>

Dalam kegiatannya mengenai penulisan sejarah perjuangan Indonesia, Pak Roem banyak melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka suatu proyek penulisan sejarah diplomasi Indonesia. Ia bersama Ny. Markisa Dahlia

---

<sup>136</sup> Fachry Ali, *op.cit*, hlm. 26.

<sup>137</sup> T.B Simatupang, dalam Soemarso Soemarsono, *op.cit*, hlm. 293.

berkunjung ke Mesir, Nederland dan Amerika Serikat untuk mengumpulkan bahan-bahan bagi buku tersebut. Untuk keperluan pengumpulan bahan-bahan tersebut Pak Roem memperoleh sponsor dari *Prins Bernhard Fonds* dan *Asia Society* di New York yang sponsornya adalah *Rockefeller ke III*.<sup>138</sup>

Sebagai seorang pelaku sejarah, Pak Roem memang memberikan perhatian lebih terhadap penulisan sejarah perjuangan Indonesia. Ia mempunyai tujuan yang mulia yaitu ingin melestarikan nilai-nilai perjuangan rakyat Indonesia di bidang diplomatik sejak Proklamasi sampai pada Pengakuan Kedaulatan. Selain itu ia ingin menanamkan kepada generasi muda agar selalu menghargai pengorbanan para pejuang yang telah dengan susah payah membangun negara Indonesia. Untuk kepentingan itu pula, Pak Roem menulis di surat kabar dan ceramah diberbagai tempat. Tema-tema yang diusungnya dalam tulisannya selain mengenai sejarah perjuangan Indonesia juga mengenai pengalamannya selama ikut berjuang dalam bidang diplomasi. Bahkan tema-tema aktual tentang peristiwa yang sedang terjadi dalam berbagai bidang pun ia jadikan tema dalam tulisannya. Banyak karyanya yang kemudian dibukukan untuk kepentingan agama. Buku yang ia terbitkan diantaranya adalah *Bunga Rampai Sejarah Jilid I-III*, *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI*, *Suka Duka Berunding dengan Belanda dan Tinjauan Pemilu I dan II dari Sudut Hukum*.

Khusus untuk masalah Pemilu, Pak Roem memberikan perhatian khusus. Ia mengikuti perkembangan politik Indonesia meskipun ia sendiri sudah tidak

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 98.

berkecimpung dalam dunia politik. Pada Pemilu I, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa bekas anggota partai Masyumi dan PSI tidak diizinkan untuk ikut serta dalam pemilu. Pak Roem menjadi salah satu diantaranya. Tetapi meskipun demikian ia tetap menerimanya. Ia tetap memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan beberapa kali memberikan tanggapan dan komentar secara tertulis melalui media surat kabar atau majalah, atau diterbitkan sendiri dalam bentuk brosur.

Selain melakukan kegiatan tersebut, Pak Roem juga aktif dalam kegiatan olahraga. Selain berenang, Pak Roem juga sangat menyukai olahraga berkuda. Bahkan karena kegemarannya tersebut Pak Roem aktif dalam keanggotaan *Perkumpulan Batavia-Bogorsche Wedloop Societeit*.

Pada tahun 1955, Pak Roem berkesempatan diundang oleh suatu yayasan di New York yaitu *Townhall Foundation*. Ia bersama undangan lainnya yang berasal dari kawasan Asia dan Timur Tengah berjumlah 12 orang. Rombongan ini dinamakan *Asia and Middle East Townhall Mission*. Kegiatan yang dilakukan adalah berkeliling ke Amerika Serikat dalam kunjungan muhibah, memperkenalkan negara dan bangsa Asia dan Timur Tengah kepada organisasi serta rakyat Amerika. Dalam berkeliling ke Amerika selama 2 bulan tersebut, Pak Roem telah berceramah tidak kurang dari 45 kali diberbagai tempat. Kesempatan itu digunakannya dengan baik untuk memperkenalkan Indonesia dihadapan rakyat Amerika, terutama tentang sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1983 Pak Roem telah memasuki usia 75 tahun. Bagim kebanyakan orang usia tersebut digunakan untuk istirahat dari segala aktivitas untuk menikmati hari tua. Tetapi hal itu tidak terjadi dalam diri Pak Roem, karena meskipun usianya telah memasuki usia 75 tahun, ia tetap melakukan banyak kegiatan terutama kegiatan yang berhubungan dengan dunia generasi muda. Begitu dekatnya pakm Roem dengan generasi muda, ia banyak memiliki kawan yang bersasal dari kalangan muda yang usianya jauh dibawahnya. Salah seorang daintaranya adalah cendekiawan Muslim Drs. Nurcholis Majid. Hubungan diantara Mohamad Roem dan Nurcholis Majid terjalin dalam hubungan surat-menyurat. Keduanya terlibat dalam bidang korespondensi ketika Nurcholis Majid tengah menempuh pendidikan S2 di Amerika Serikat. Dalam suratnya Nurcholis Majid mengetengahkan tema-tema politik terutama tema disekitar masa revolusi dan menegnai keterlibatan Mohamad Roem dalam Masyumi. Hasil korespondensi diantar keduanya kemudian dibukukan untuk kepentingan pendidikan.

Memasuki usia 75 tahun kesehatan Pak Roem mulai tidak stabil . Daya tahan tubuhnya terhadap penyakit mulai berkurang. Hal itu lebih disebabkan karena faktor usia dan kegiatan Pak Roem yang masih banyak dilakukan. Penyakit yang sejak tahun 1955 dideritanya adalah penyakit radang paru-paru. Usaha yang telah Ia lakukan untuk memperingannya adalah dengan berobat ke Amerika Serikat yang sudah sejak tahun 1955 ia jalani. Tetapi karena stamina dan daya tahan tubuhnya sudah semakin

tidak stabil, penyakit yang dideritanya semakin buruk dan harus segera dibawa ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Akhirnya pada tanggal 25 September 1983 pukul 13.00 Pak Roem meninggal dalam usia 75 tahun. Pak Roem dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta. Meskipun kini Pak Roem telah wafat namun namanya tetap harum sebagai salah satu Syuhada, peletak dasar Republik ini. Perjuangan serta pengabdianya sejak tahun 1924 sampai akhir hayatnya akan terus dikenang dalam sejarah Indonesia.





## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karier politik Mohamad Roem dimulai pada tahun 1924 ketika ia masuk keanggotaan Jong Java yang berkembang di lingkungan STOVIA, tempat dimana ia belajar. Ketertarikannya akan dunia politik diawali dari ketertarikannya akan dunia organisasi. Beberapa organisasi yang ia ikuti diantaranya adalah Jong Java, JIB, PSII, Gerakan Penyardar dan Masyumi. Melalui organisasi-organisasi inilah, Mohamad Roem pada akhirnya terjun dalam dunia politik Indonesia sekaligus tampil menjadi salah satu diplomat Indonesia. Kedekatannya dengan tokoh-tokoh politik Indonesia, terutama Haji Agus Salim, memberikan banyak pengaruh kepada kehidupan politiknya. Agus Salim-lah yang kemudian menjadi penuntun langkah-langkah politik Mohamad Roem. Melalui konteks Agus Salim inilah Mohamad Roem harus dipahami, yakni dalam sikap realistik berusaha berdialog dengan kenyataan. Interaksinya dengan Agus Salim, ia pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan pribadinya. Rumusan pandangan realistik dituangkannya dengan bentukan pribadi yang bebas dan tidak terlalu terikat pada kelompok atau organisasi. Bentukan sikap inilah yang kemudian menentukan putusan-putusan politik pribadinya. Berbekal kemampuannya dalam berargumentasi, Mohamad Roem mampu tampil menjadi salah satu diplomat terkenal Indonesia dalam berbagai perundingan dengan Belanda. Faktor yang amat

mempengaruhi Roem sebagai diplomat dan perunding bukanlah semata-mata bakat atau warisan ketrampilan yang diperoleh dari Agus Salim, melainkan bentukan pribadi yang bebas. Dengan hal itulah, ia terbebas dari rasa risih untuk bertindak sebagai perunding sebab pada waktu itu kelompok-kelompok kekuatan perlawanan terhadap Belanda lebih menekankan perjuangan fisik daripada perundingan.

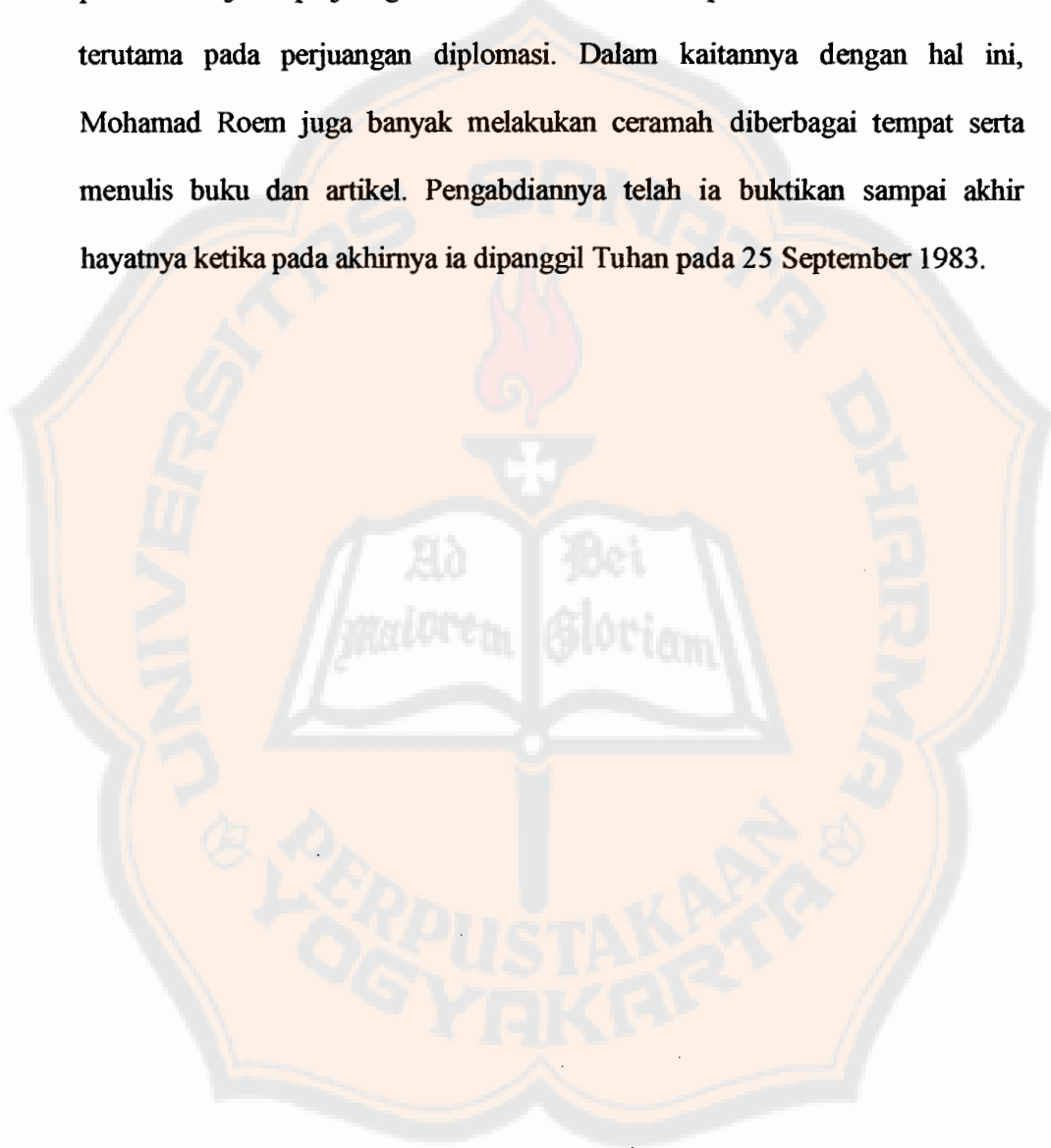
2. Perjuangan Mohamad Roem nampak dalam beberapa bidang. Dalam bidang politik perjuangan Mohamad Roem dibuktikannya melalui kepiawaiannya dalam berunding dengan Belanda dalam berbagai perundingan antara tahun 1946-1949. Debut pertama diplomasinya dimulai ketika ia tampil sebagai anggota delegasi dalam Perundingan Linggajati tahun 1946. Dalam Perundingan Renville Mohamad Roem dipercaya sebagai salah satu anggota delegasi. Pada tahun 1949, Mohamad Roem dipercaya untuk menjadi wakil Indonesia dalam Perundingan Roem-Royen. Perundingan inilah yang kemudian membuka jalan bagi Indonesia dalam memperoleh kedaulatannya dari Belanda sekaligus melambungkan nama Mohamad Roem sebagai salah satu diplomat besar Asia. Perjuangan Mohamad Roem dalam bidang pemerintahan pasca KMB tahun 1949-1957 nampak ketika ia dipercaya menjabat beberapa posisi penting dalam pemerintahan, diantaranya yaitu Menteri Negara tanpa Portofolio pada Kabinet Hatta tahun 1949-1950, Menteri Luar Negeri pada Kabinet Natsir tahun 1950-1951, Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Wilopo tahun 1952-1953, dan Wakil Perdana Menteri I pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II tahun 1956-1957. Jabatan ini menjadi

jabatan terakhir Mohamad Roem dalam pemerintahan sebab dalam kabinet selanjutnya ia tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat posisi apapun dalam pemerintahan. Perjuangannya dalam bidang sosial-keagamaan nampak pada keaktifannya dalam berbagai organisasi dan perhatiannya serta kepeduliannya akan masalah sosial-keagamaan. Kegiatannya yang paling menonjol adalah ceramah mengenai masalah-masalah sosial-keagamaan, pendidikan, kehidupan keluarga, perkawinan. Selain berceramah, Mohamad Roem mengisi kegiatannya dengan menulis buku serta artikel dalam berbagai surat kabar Indonesia.

3. Pengabdian Mohamad Roem kepada Bangsa Indonesia, ia wujudkan dalam perjuangannya sebagai pejuang dan perunding saat tampil dimeja perundingan menghadapi Belanda. Sebagai seorang pribadi, Mohamad Roem adalah seorang yang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk berjuang. Disamping sifat sebagai pejuang tersebut, juga menonjol kemampuannya untuk tampil sebagai pemimpin yang mencita-citakan persatuan bangsanya dan menuntunnya melalui jalan bernusayawarah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip pendiriannya. Maka, selain sebagai seorang pejuang, Mohamad Roem juga tampil sebagai seorang perunding yang memperoleh kesempatan-kesempatan emas dalam sejarah kehidupannya untuk mengembangkan kemampuannya tersebut dengan sebaik-baiknya. Tahun 1968 menjadi akhir dari karier politik Mohamad Roem. Meskipun ia tidak lagi berkecimpung dalam dunia politik, ia tetap mengabdikan dirinya kepada bangsa Indonesia dengan memberikan perhatian besar kepada masalah-masalah dalam negeri



Indonesia. Masalah-masalah yang mendapat perhatian Mohamad Roem terutama adalah masalah kehidupan politik Indonesia dan pendidikan. Mohamad Roem juga lebih banyak memfokuskan kegiatannya dalam penulisan sejarah perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan terutama pada perjuangan diplomasi. Dalam kaitannya dengan hal ini, Mohamad Roem juga banyak melakukan ceramah diberbagai tempat serta menulis buku dan artikel. Pengabdianya telah ia buktikan sampai akhir hayatnya ketika pada akhirnya ia dipanggil Tuhan pada 25 September 1983.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Aboe Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi, Kenangan Pelaku dan Saksi*, UI-Press, Jakarta, 1998.

Agus Edi Santosa,(ed), *Tidak Ada Negara Islam-Surat-surat Politik Nurcholis Madjid-Mohamad Roem*, Djambatan, Jakarta, 1997.

Ajib Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut kepada Allah*, Idayu Press, Jakarta, 1986.

Ali Satroamidjojo, *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, Kinta, Jakarta, 1974.

Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet Pemerintahan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Bowo Asianto,dkk, *Temanggung : Tempo Dulu, Sekarang serta Prospek di Masa Datang*, Pemda Tk II Temanggung, Temanggung, 1997.

Deliar Noer, " *JIB ( Persatuan Pemuda Islam )* ", dalam Soemarso Soemarsono, *Mohamad Roem 70 Tahun : Pejuang Perunding*, Bulan Bintang, Djakarta, 1978.

\_\_\_\_\_, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1980.

\_\_\_\_\_, *Partai Islam dalam Pentas Nasional*, Pustaka Utama Grafiti. Jakarta, 1987.

Echols, John & Hasan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990.

Gottchalk, Luis, *Mengerti Sejarah*, trjm. Nugroho Notosusanto, UI Press, Jakarta, 1969.

Ide Anak Agung Gde Agung, *Pernyataan Rum-Van Roijen (Rum-Van Roijen Statements)*, 7 Mei 1949, Yayasan Pustaka Nusatama, Jakarta, 1991.



- \_\_\_\_\_, *Persetujuan Linggajati, Prolog dan Epilog*, Yayasan Pustaka Nusatama & UNS-Press, Surakarta, 1995.
- \_\_\_\_\_, Renville, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Iin Nur Insaniwati, *Mohamad Roem, Karier Politik dan Perjuangannya*, Indonesiatara, Magelang, 2002.
- Inglesson, John, *Jalan Menuju Pengasingan Pergerakan Nasional Tahun 1924-1934*, LP3ES, Djakarta, 1963.
- Kahin, George Mc. Truman, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, trjm. Nju Bakdi Sumanto, UNS-Press, Surakarta, 1991.
- Lapian, AB & P.J Drooglever, *Menelusuri Jejak Linggajati, Diplomasi dalam Perspektif Sejarah*, Grafiti, Jakarta, 1992.
- Mestika Zed, *PDRI, Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.
- Moedjanto, G, *Indonesia Abad ke-20 Jilid I dan II*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Mohamad Roem, *Bunga Rampai Sedjarah Jilid II* Bulan bintang, Djakarta, 1972.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Sedjarah Jilid II*, Bulan Bintang, Djakarta, 1977
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Sedjarah Jilid III*, Bulan Bintang, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, "Kabinet Wilopo Sebuah Team : Pengalaman Pribadi dibawah Pimpinan PM Wilopo, dalam I.N Subagijo, *Wilopo 70 Tahun*, Gunung Agung, Djakarta, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Tiga Peristiwa Bersedjarah Kongres Nasional I Lahirnya Pancasila Kembali Ke Jogja*, Sinar Hudaya, Djakarta, 1972.
- \_\_\_\_\_, "Memimpin adalah Menderita : Kesaksian Agus Salim, dalam Taufik Abdullah, et.al (ed). *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, LP3ES, Djakarta, 1973.

\_\_\_\_\_, *Suka Duka Berunding dengan Belanda*, Idayu Press, Djakarta, 1972.

\_\_\_\_\_, *Tinjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum*, Hidayat Documenta, Djakarta, 1971.

Mohamad Said, "Wilopo dan Tanjung Morawa", dalam I.N Subagijo *Wilopo 70 Tahun*, Gunung Agung, Djakarta, 1979.

Nasution, A.H, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VII*, Disjarah AD dan Angkasa, Djakarta, 1976.

\_\_\_\_\_, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid IX*, Disjarah AD dan Pustaka, Bandung, 1979.

N.N, *Ensiklopedi Islam Jilid 2*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 5, 9, 12*, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990.

Noto Suhardjo, *Dokumen KMB, Sebelum, Sesudah dan Pembubarannya*, Endang Press, Djakarta, 1956.

Ongkokham, *Runtuhnya Hindia Belanda*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Djakarta, 1976.

Pringgodigdo, A.K, *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, Kinta, Djakarta, 1974.

Quraish Shihab, *Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Mizan, Bandung, 1994.

Rickflets, M.C, *Sejarah Indonesia Modern*, trjm. Dharmana Hardjowijono, UGM-Press, Yogyakarta, 1991.

Slamet Mulyana, *Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia Jilid II*, Balai Pustaka, Djakarta, 1969.

Soemarso Seomarsono, *Mohamad Roem 70 Tahun : Pejuang Perunding*, Bulann Bintang, Djakarta, 1978.

Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1994.

Suratmin, *Mohamad Roem Karya dan Pengabdianannya*, Depdikbud, Jakarta, 1986.

Susanto Tirtoprodjo, *Sedjarah Revolusi Nasional, Pembangunan, Djakarta, 1963.*

Suratmin, *Mohamad Roem Karya dan Pengabdianannya*, Depdikbud, Jakarta, 1986.

Majalah :

Fahry Ali, "Mohamad Roem Diplomat Pejuang", dalam *Prisma*. Jakarta : No. 6 Tahun XIII, 1 Juni 1983.

Mohamad Roem, "Beralih ke Negara Kesatuan", dalam *Panji Masyarakat*. Jakarta : No. 369, Tahun XXVI, 2 Agustus 1983.

\_\_\_\_\_, "JIB yang Saya Alami", dalam *Panji Masyarakat*. Jakarta : No. 384, Tahun XXIV, 2 Januari 1982.

Nurcholis Madjid, "In memoriam : Pak Roem", dalam *Tempo*. Jakarta : No. 410, Tahun XXV, 11 Oktober 1983.

\_\_\_\_\_, "Pahlawan dari Parakan", dalam *Tempo*. Jakarta : No. 32, Tahun XIII, 8 Oktober 1988.

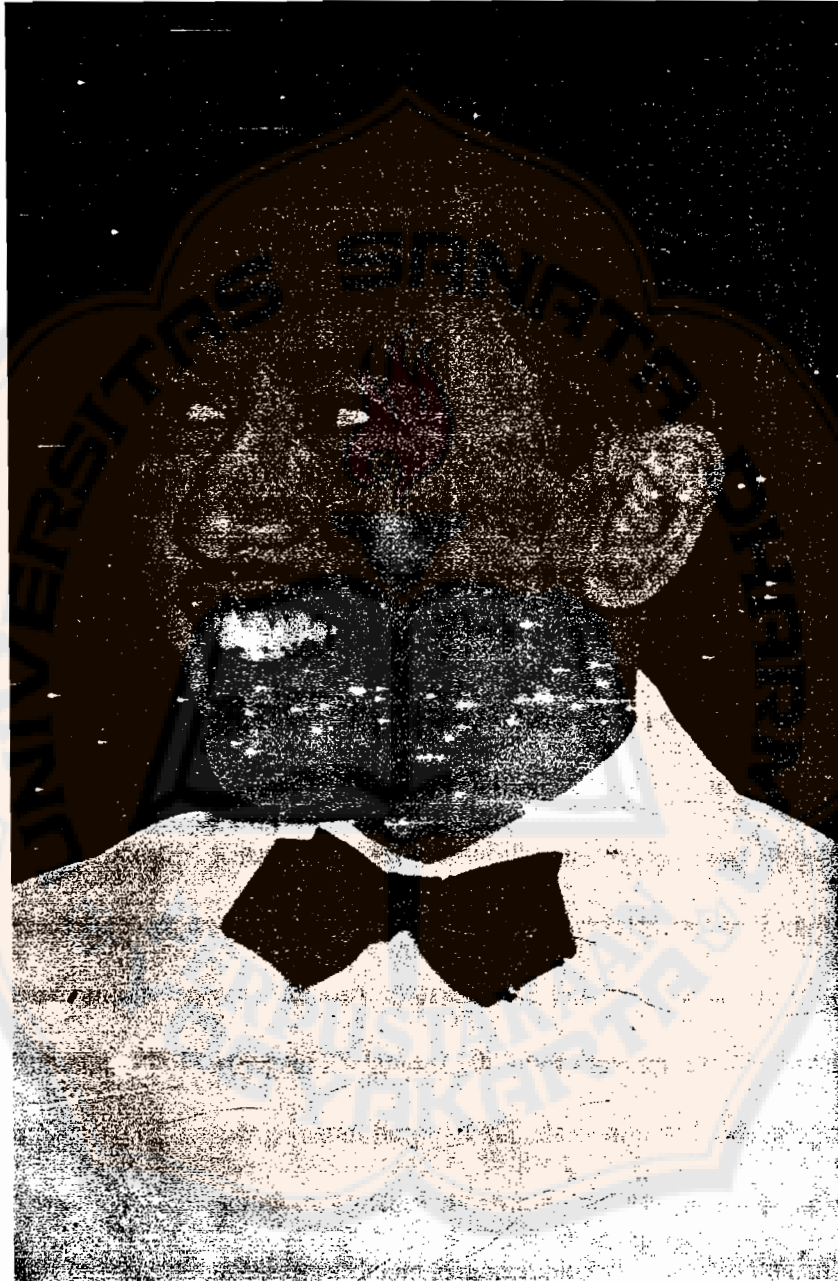
Ridwan Saidi, "Mr. Mohamad Roem, Selamat Jalan....Kami Menyusul !", dalam *Panji Masyarakat*. Jakarta : No. 409, Tahun XII, 1 Oktober 1983.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

# LAMPIRAN



Lampiran 1. Gambar Mohammad Roem



Sumber : ST. Rais Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Jakarta: Mutiara, 1952.



Lampiran 2 :

**KETERANGAN ROEM-VAN ROYEN**

**7 Mei 1949**

Persetujuan Permulaan

Mengenai Kembalinya Pemerintahan republik

ke Jogjakarta

Statement Delegasi Republik Indonesia dan statement Delegasi Belanda dalam pertemuan formil di bawah *auspices* UNCI di Jakarta tanggal 7 Mei 1949.

I. Statement Delegasi Republik

(Diucapkan oleh Mr. Mohamad Roem)

Sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia saya diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka sendiri (*persoonlijk*), sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 untuk memudahkan tercapainya :

1. pengeluaran perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya;
2. kerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, dan

3. turut serta pada Konfrensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat, dengan tidak bersyarat.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta akan berusaha mendesak supaya politik demikian itu diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia selekas-lekasnya setelah dipulihkan di Jogjakarta.

## II. Statement Delegasi Belanda

(Diucapkan oleh Dr. Van Royen)

1. Delegasi Belanda diberi kuasa menyatakan bahwa, berhubung dengan kesanggupan yang baru diucapkan oleh Mr. Roem, ia menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta. Delegasi Belanda selanjutnya menyetujui pembentukan satu panitia-bersama atau lebih di bawah *auspices* UNCI dengan maksud :
  - a. mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Jogjakarta,
  - b. mempelajari dan memberi nasihat tentang tindakan-tindakan yang akan diambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerjasama dalam hal

mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.

2. Pemerintah Belanda setuju bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan jabatannya yang sepatutnya di daerah yang meliputi Karisidenan Jogjakarta dan bahwa ini adalah suatu langkah yang dilakukan sesuai dengan maksud petunjuk-petunjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949.
3. Pemerintah Belanda menguatkan sekali lagi kesanggupannya untuk menjamin penghentian segera daripada semua gerakan-gerakan militer dan membebaskan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik yang ditangkanya sejak tanggal 17 Desember 1948 dalam Republik Indonesia.
4. Dengan tidak mengurangi hak-hak bagian bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai yang diakui dalam asas-asas Linggajati dan Renville, Pemerintah Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara atau daerah-daerah di atas daerah yang dikuasai oleh Republik sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan daerah Republik tersebut.
5. Pemerintah Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai suatu *staat* yang nanti akan duduk dalam Negara Indonesia Serikat. Apabila suatu Badan Perwakilan Sementara

untuk seluruh Indonesia dibentuk dan karena itu perlu ditetapkan jumlah perwakilan Republik dalam badan tersebut, jumlah itu ialah daripada jumlah anggota-anggota semua, di luar anggota-anggota Republik.

6. Sesuai dengan maksud dalam petunjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949 yang mengenai Konfrensi Meja Bundar di Den Haag supaya perundingan-perundingan yang dimaksud oleh Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dapat diadakan secepat-cepatnya, maka Pemerintah Belanda akan berusaha sesungguhnya supaya konfrensi itu segera diadakan sesudahnya Pemerintah kembali ke Jogjakarta.

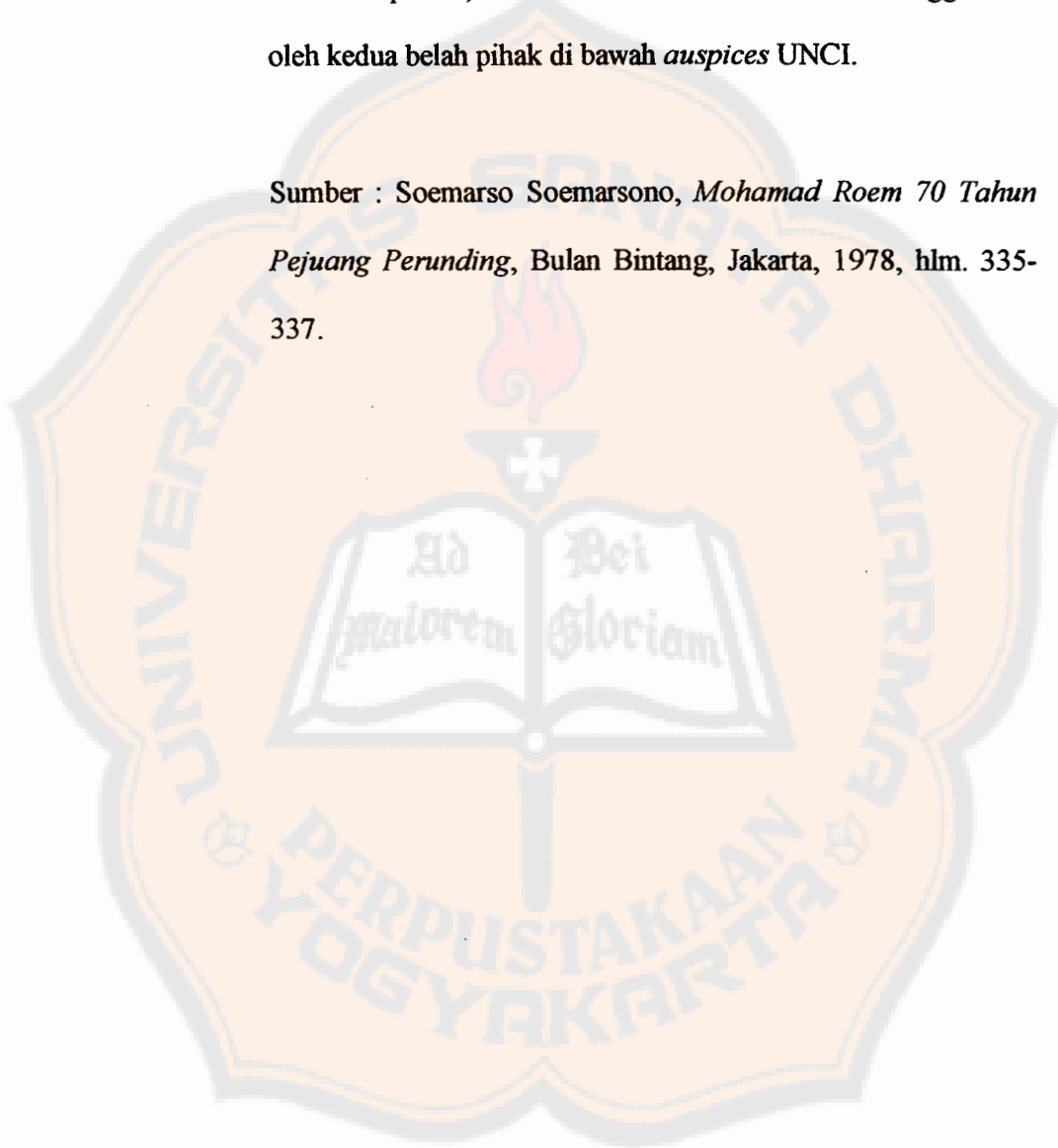
Pada konfrensi itu perundingan-perundingan akan diadakan tentang cara bagaimana mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat sesuai dengan asas-asas Renville.

7. Berhubung dengan keperluan kerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, Pemerintah Belanda setuju bahwa dalam segala daerah di luar Karisidenan Jogjakarta dimana pegawai sipil, polisi dan pegawai Republik lainnya yang masih terus bekerja, akan tetap dalam jabatan mereka.

Dengan sendirinya pembesar-pembesar Belanda membantu Pemerintah Republik dalam hal keperluan-keperluan yang

dikehendaki menurut pertimbangan yang pantas untuk perhubungan dan konsultasi dengan segala orang Indonesia, terhitung juga mereka yang bekerja dalam jabatan sipil dan militer Republik, dan detail-detail teknik akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak di bawah *auspices* UNCI.

Sumber : Soemarso Soemarsono, *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 335-337.



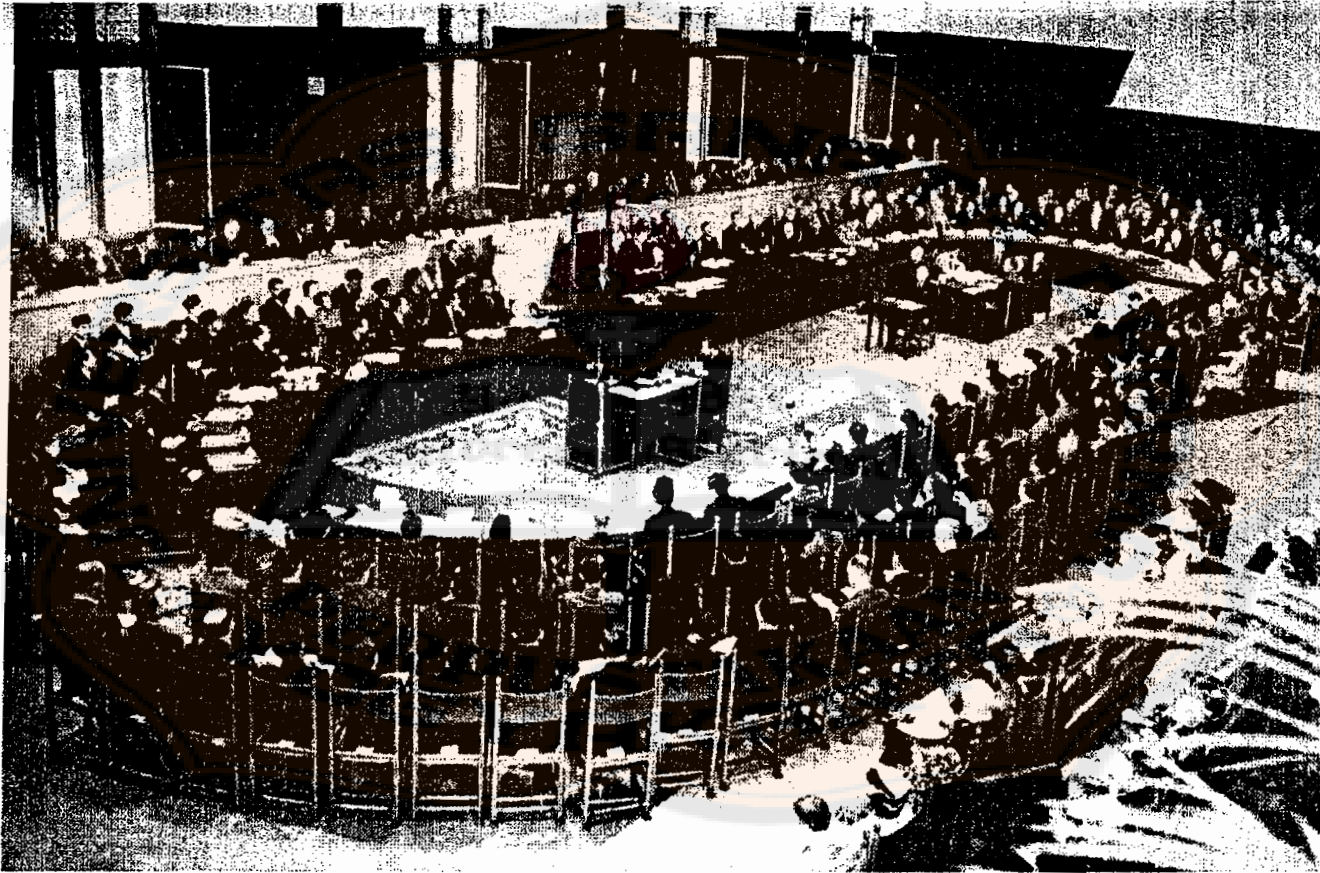


**Lampiran 3. Penandatanganan Perundingan Linggajati Tahun 1946**



Sumber : Soemarso Soemarsono, *Mohammad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Lampiran 4. Suasana Perundingan KMB Tahun 1949



Sumber : Soemarso Soemarsono, *Mohammad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Lampiran 5. Suasana Perundingan Renville Tahun 1947



Sumber : Soemarso Soemarsono, *Mohammad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978



**Lampiran 6. Penandatanganan Piagam Penyerahan Kedaulatan Tahun 1949**



Sumber : Soemarso Soemarsono, *Mohammad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Lampiran 7. Suasana Perundingan Roem-Royen Tahun 1949



Sumber : Soemarso Soemarsono, *Mohammad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978



Lampiran 8. Gambar Mohammad Roem Saat Menghadiri Sidang Pimpinan dari ACRP (Asian Conference of Religion for Peace) Konferensi Asia dari Agama untuk Perdamaian Tahun 1977



Sumber : Soemarso Soemarsono, *Mohammad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*,  
Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Lampiran 9 :

**SILABUS**  
**Sekolah Menengah Atas**

Mata Pelajaran : Sejarah  
 Kelas/Semester : XII / Genap  
 Alokasi Waktu : 4 x 45 menit  
 Standar Kompetensi : Kemampuan memahami perjalanan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan sampai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru.

Kompetensi Dasar	Kemampuan menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.
Hasil Belajar	Menguraikan sejarah perjuangan serta pengabdian Mohamad Roem tahun 1924-1983.
Indikator Hasil Belajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan awal perjalanan karier politik Mohamad Roem sebagai seorang diplomat dan politikus.</li> <li>2. Menjelaskan bentuk perjuangan Mohamad Roem di Indonesia di kurun waktu antara 1946-1957.</li> <li>3. Menjelaskan wujud pengabdian Mohamad Roem bagi bangsa Indonesia.</li> </ol>
Tujuan Pembelajaran	Siswa mampu menjelaskan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Awal perjalanan karier politik Mohamad Roem sebagai seorang diplomat dan politikus.</li> <li>2. Bentuk perjuangan Mohamad Roem di Indonesia di kurun waktu antara tahun 1946-1957.</li> <li>3. Menjelaskan wujud pengabdian Mohamad Roem bagi bangsa Indonesia.</li> </ol>

<p>Langkah Pembelajaran</p>	<p><b>I. Pendahuluan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apersepsi</li> <li>• Penyampaian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.</li> </ul> <p><b>II. Kegiatan Inti</b></p> <p>Menjelaskan materi pelajaran melalui ceramah dan diskusi tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Awal perjalanan karier politik Mohamad Roem sebagai seorang diplomat dan politikus.</li> <li>2. Bentuk perjuangan Mohamad Roem di kurun waktu antara tahun 1946-1957 :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perjuangan dalam bidang politik.</li> <li>b. Perjuangan dalam bidang pemerintahan.</li> <li>c. Perjuangan dalam bidang sosial-keagamaan.</li> </ol> </li> <li>3. Wujud pengabdian Mohamad Roem :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengabdian sebagai seorang pejuang dan perunding.</li> <li>b. Pengabdian di hari tua.</li> </ol> </li> </ol>
<p>Sarana dan Sumber Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana Pembelajaran :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gambar Mohamad Roem.</li> <li>b. Gambar suasana perundingan antara Indonesia-Belanda.</li> <li>c. Dokumen penting hasil perundingan Roem-Royen dan KMB.</li> </ol> </li> <li>2. Sumber Pembelajaran :</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Iin Nur Insaniwati, 2002, <i>Mohamad Roem Karier Politik dan Perjuangannya</i>, Magelang, Indonesiatara.</li> <li>b. Mohamad Roem, 1972, 1977, 1983, <i>Bunga Rampai Sejarah jilid I-III</i>, Jakarta, Bulan Bintang.</li> <li>c. Mohamad Roem, 1983, <i>Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI</i>, Jakarta, Gramedia.</li> <li>d. Mohamad Roem, 1972, <i>Suka Duka Berunding dengan Belanda</i>, Jakarta, Idayu Press.</li> <li>e. Suratmin, 1986, <i>Mohamad Roem Karya dan Pengabdianannya</i>, Jakarta, Depdikbud.</li> </ol>
<p><b>Penilaian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami Perjuangan dan Pengabdian Mohamad Roem tahun 1924-1968 dapat dilakukan dengan tes tertulis berbentuk essay baik secara tertutup maupun portfolio.</li> <li>2. Memberikan tugas kepada siswa :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganalisis bagaimana perjuangan Mohamad Roem bagi penegakan kemerdekaan Indonesia.</li> <li>- Menganalisis bagaimana pengabdianannya kepada bangsa Indonesia.</li> </ul> </li> <li>3. Mencatat serta mengamati kegiatan siswa selama dalam proses belajar dan diskusi di kelas.</li> <li>4. Portofolio :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru mencatat aktivitas setiap siswa sesuai dengan kategori kegiatan yang ditentukan.</li> <li>- Guru mengumpulkan seluruh kegiatan</li> </ul> </li> </ol>

	siswa, baik secara individual atau kelompok.
Alat Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jelaskan awal perjalanan karier Mohamad Roem sebagai seorang diplomat dan politikus ?</li><li>2. Jelaskan bentuk perjuangan Mohamaad Roem bagi penegakan perjuangna kemerdekaan Indonesia diantara kurun waktu 1946-1957 ?</li><li>3. Jelaskan wujud pengabdian Mohamaad Roem sebagai seorang pejuang dan perunding ?</li></ol>

Yogyakarta, September 2005

Guru Bidang Studi

Endah Retno Riyanti

